

**EFEKTIFITAS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PRASARANA
KOTA DALAM MENDUKUNG KINERJA PUSAT
PERTUMBUHAN DI KABUPATEN CIREBON**

T E S I S

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Kota

Oleh :

**YUDI YUSTIAWAN
L4D000136**



**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2002**

**EFEKTIFITAS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PRASARANA KOTA
DALAM MENDUKUNG KINERJA PUSAT PERTUMBUHAN
DI KABUPATEN CIREBON**

Tesis diajukan kepada
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Oleh :

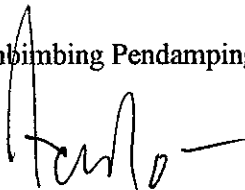
**YUDI YUSTIAWAN
L4D000136**

Diajukan pada Sidang Ujian Tesis
Tanggal 29 Agustus 2002

Dinyatakan Lulus
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Teknik

Semarang, 29 Agustus 2002

Pembimbing Pendamping



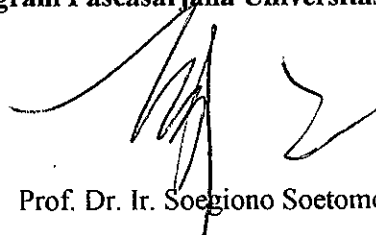
Ir. Jawoto Sih Setyono, MDP

Pembimbing Utama



Ir. Ragil Haryanto, MSP

**Mengetahui,
Ketua Program Studi
Magister Teknik Pembangunan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro**




Prof. Dr. Ir. Soegiono Soetomo, DEA.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Semarang, 29 Agustus 2002



YUDI YUSTAWAN

NIM L4D 000 136

Dunia Penjelasan Dan Penalaran Bukanlah Eksistensi

TO MY BELOVED PARENTS, MY WIFE AND MY SON

ABSTRAK

Posisi Kabupaten Cirebon yang strategis serta perannya dalam konstelasi wilayah pengembangan timur Jawa Barat, menuntut kinerja perekonomian dan perkembangan wilayah yang optimal. Hal ini hanya akan terwujud apabila struktur tata ruang yang dimiliki Kabupaten Cirebon mendukung kinerja perekonomian yang secara keruangan telah memiliki 4 (empat) kota yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan, yaitu Kota Arjawinangun, Kota Sumber, Kota Astanajapura dan Kota Ciledug. Kota-kota ini diharapkan mampu berperan sebagai penggerak utama perekonomian wilayah yang pada gilirannya akan mengembangkan kota-kota yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon.

Kondisi yang ada saat ini ternyata memperlihatkan kota-kota yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon perkembangannya relatif konstan dan tidak berkembang baik secara fisik maupun ekonomi. Secara teoritis pusat pertumbuhan tersebut harus dapat menyebarkan pertumbuhan ke daerah belakangnya serta menimbulkan efek pengganda (*multiplier effect*) yang berhubungan dengan faktor-faktor tenaga kerja dan pendapatan. Dalam upaya mendukung strategi pusat pertumbuhan, aspek kebijakan pembangunan prasarana terutama pembangunan prasarana kota di kota-kota pusat pertumbuhan sangat memegang peranan penting karena prasarana kota dapat menstimulasi masuknya investasi kedalam wilayah pengembangan (Parr, 1999:1260) dan mendukung kinerja dari kota-kota pusat pertumbuhan itu sendiri.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi kebijakan pembangunan prasarana terutama pembangunan prasarana kota di kota-kota pusat pertumbuhan yang ada di Kabupaten Cirebon dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian "Efektifkah Kebijakan Pembangunan Prasarana Kota Dalam Mendukung Kinerja Kota-Kota Pusat Pertumbuhan di Kabupaten Cirebon?". Selain itu penelitian ini juga ingin melihat bagaimana efektifitas pembangunan prasarana kota dalam menarik investasi dan menganalisis pengaruh pembangunan prasarana kota terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cirebon. Metoda penelitian yang digunakan adalah metoda kualitatif terutama untuk menganalisis kebijakan pembangunan prasarana kota dan menggunakan analisis statistik deskriptif untuk melihat bagaimana efektifitas pembangunan prasarana kota dalam menarik investasi dan analisis statistik deskriptif dengan uji korelasi untuk melihat pengaruh pembangunan prasarana kota terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cirebon.

Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa kebijakan pembangunan prasarana kota yang telah dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon efektif untuk meningkatkan kinerja pusat pertumbuhan, namun efektifitas ini tidak disertai dengan kemampuan kota-kota pusat pertumbuhan untuk menarik investasi sektor industri, kecuali Kota Astanajapura. Untuk itu direkomendasikan, pertama membuat kebijakan pembangunan prasarana kota diarahkan untuk menarik investasi khususnya untuk kota-kota pusat pertumbuhan serta mengubah struktur ruang wilayah yang ada dengan 2 (dua) kawasan pertumbuhan dan 3 (tiga) kota penunjangnya.

THESIS ABSTRACT

The strategic position of Cirebon Regency and its function in West Java's East Development Region strives for optimal economics performance and regional developing. It will be formed if the structure of space of Cirebon regency supporting the performance of its economic which have four regional growth center, Arjawinangun, Sumber, Astanajapura and Ciledug. These towns are expected to be the region economic prime mover role that develop the cities in the Cirebon regency's region.

The present condition shows that all cities in Cirebon regency's region physical and economical does not grow as well. Theoretically the growth centers should induct the growth into their hinterland and generates multiplier effect which have correlation with labour and income. In efforts to support its growth center strategy, infrastructure development policy aspect especially infrastructure development in the growth center cities, are very important. The infrastructure can stimulate the investment flow into development region (Parr, 1999:1261) and supports the growth center city performance itself.

The objectives of the research are analyzing and evaluating the infrastructure development policy especially in the growth center cities at Cirebon regency in frame to figure out the answer of following question: How is the effectiveness of the urban infrastructure development policy in order to support the growth center cities performance at Cirebon Regency. In addition this research is also want to figure out how the influence of infrastructure development in order to stimulate the investment flow into region and rate of economic growth. This research is using the qualitative research method especially for analyzing the urban infrastructure development policy also using the statistical descriptive method to find out the influence of urban infrastructure development at growth center cities toward investment flow in and rate of economic growth at Cirebon regency.

The result of analysis process concluded that the Cirebon regency government's urban infrastructure development policy is effective to increase the growth center performance, but this effectivity does not followed by the capability of growth cities' to draw in the investment of industrial sector, except Astanajapura city. The result of these research recommend that first making an urban infrastructure development policy for growth center cities different from other cities, and second, to redefine the region space structure into two growth center regions and their three supporting cities.

KATA PENGANTAR

Dengan ijin dan rahmat dari Allah SWT penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan thesis ini meskipun dengan tertatih-tatih. Penulisan thesis merupakan produk akhir dari kegiatan penelitian yang penulis laksanakan dalam rangka menempuh pendidikan pada Magister Teknik Pembangunan Kota Universitas Diponegoro Semarang.

Dengan telah diselesaikannya penulisan thesis ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada Bapak *Ir. Ragil Haryanto, MSP* selaku Mentor atas segala saran dan nasehatnya selama penulisan thesis ini, Bapak *Ir. Jawoto Sih Setyono, MDP* selaku Co-Mentor yang telah banyak meluangkan waktunya membimbing penulis dan memberikan masukan-masukan yang berharga, Bapak *PM Broto Sunaryo, SE, MSP* selaku dosen pembahas pada sidang-sidang pra thesis dan thesis yang penulis jalani serta Ibu *Ir. Nany Yuliastuti, MSP* sebagai dosen penguji pada sidang akhir thesis.

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan pada Proyek CBUIM Departemen Kimpraswil yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk meneruskan pendidikan ke jenjang strata dua di UNDIP melalui program beasiswanya, sobat-sobat CBUIM IV yang telah banyak men-support mulai dari penyusunan proposal hingga penulisan thesis dengan kritik, saran dan argumentasi, juga kepada staff pengajar MTPK-UNDIP yang telah banyak menularkan ilmunya serta staff administrasi MTPK-UNDIP yang telah banyak membantu penulis selama menempuh pendidikan di MTPK-UNDIP.

Selanjutnya saya ingin mempersembahkan hasil karya ini kepada yang tercinta Papah dan Mamah yang dengan doa dan restunya selalui menyertai kemanapun langkah saya berjalan, To my beloved wife Idda Farida and my son Pipin yang dengan setia dan penuh kesabaran mendampingi saya dalam melaksanakan tugas belajar di MTPK-UNDIP ini, and finally I want to dedicate this thesis to all people who care about peace, care about prosperity for all human kind and who facing in a certain the reality of life with courage.

Sebagai seorang geodet yang mencoba untuk berplanologi, penulis yakin tulisan ini jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis berharap kritik dan saran yang positif, terakhir semoga thesis ini dapat bermanfaat bagi Program Magister Teknik Pembangunan Kota UNDIP dan Pemerintah Kabupaten Cirebon khususnya serta masyarakat umumnya.

Semarang, Penghujung Agustus 2002

Yudi Yustiawan

DAFTAR ISI

Halaman

JUDUL PENELITIAN.....	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
ABSTRAK	iv
THESIS ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
 BAB I. P E N D A H U L U A N.....	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Permasalahan.....	6
1.3 Tujuan Dan Sasaran Studi.....	7
1.3.1. Tujuan Studi.....	8
1.3.2. Sasaran Studi.....	8
1.4 Manfaat Studi	9
1.5 Ruang Lingkup	9
1.5.1 Unit Analisis	9
1.5.2 Ruang Lingkup Materi.....	10
1.6 Kerangka Pemikiran.....	12
1.7 Sistematika Penulisan.....	15
 BAB II. STRATEGI PUSAT PERTUMBUHAN DAN PEMBANGU- NAN PRASARANA KOTA	 17
2.1 Konsep Perkembangan Wilayah.....	17
2.2 Peran Kota Dalam Pengembangan Wilayah.....	21
2.3 Pendekatan Top Down Pengembangan Wilayah	22
2.4 Teori Kutub Pertumbuhan	23
2.5 Teori Pusat Pertumbuhan.....	28
2.6 Konsep Pembangunan Prasarana Kota	33
2.7 Strategi Pusat Pertumbuhan.....	35
2.8 Prasyarat Strategi Pusat Pertumbuhan	38
2.9 K e s i m p u l a n.....	41
 BAB III. METODA PENELITIAN	 42
3.1 Metoda Penelitian Kualitatif	42
3.2 Metoda Penelitian Kualitatif Untuk Menganalisis Kebija- kan Pembangunan Prasarana Kota Dalam Menunjang Ki- nerja Pusat Pertumbuhan	46
3.3 Kerangka Analisis	51
3.4 Metoda Analisis	54
3.5. Kebutuhan Dan Teknik Pengumpulan Data	58

BAB IV. GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	61
4.1 Tinjauan Aspek Fisik dan Keruangan	61
4.1.1 Letak dan Kondisi Geografis	61
4.1.2 Kebijakan Umum Daerah	64
4.1.3 Kebijakan Spasial	68
4.2 Tinjauan Aspek Sosial dan Perekonomian	75
4.2.1 Kependudukan dan Ketenaga Kerjaan	75
4.2.2 Struktur dan Perkembangan Perekonomian Kabupaten Cirebon	78
4.3 Tinjauan Aspek Prasarana Wilayah	81
4.3.1 Kebijakan Pembangunan Prasarana	81
4.3.2 Cerminan Program Pembangunan Prasarana Kota	84
4.3.3 Kondisi Jaringan Prasarana	85
4.4 Kota-kota Pusat Pertumbuhan	92
4.4.1 Kondisi Fisik Geografis	92
4.4.2 Kependudukan dan Ketenagakerjaan	93
4.4.3 Struktur Perekonomian	90
4.4.4 Jaringan Prasarana	97
BAB V. ANALISIS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PRASARANA KOTA DALAM MENUNJANG KINERJA PUSAT PER- TUMBUHAN DI KABUPATEN CIREBON	98
5.1 Analisis Muatan Terhadap Program Pembangunan Prasarana Kota	98
5.2.1 Program Pembangunan Prasarana Kota Tahun 1989/1990-1993/1994	98
5.2.2 Program Pembangunan Prasarana Kota Tahun 1994/1995-1998/1999	100
5.2 Analisis Terhadap Implementasi Program Pembangunan Prasarana Kota di Kota Pusat Pertumbuhan	106
5.3 Analisis Efektifitas Pembangunan Prasarana Kota Dalam Menarik Investasi	107
5.4 Analisis Pengaruh Pembangunan Prasarana Kota di Kota Pusat Pertumbuhan Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi	117
5.5 Efektifitas Kebijakan Pembangunan Prasarana Kota Dalam Menunjang Kinerja Pusat Pertumbuhan	121
BAB VI. P E N U T U P	123
6.1 Kesimpulan	123
6.2 Rekomendasi	124
6.2.1. Aspek Kebijakan	123
6.2.2. Usulan Penelitian Lanjutan	124
DAFTAR PUSTAKA	128
LAMPIRAN	131

DAFTAR TABEL

1. Tabel II.1	Pendekatan Statis dan Dinamis Kutub Pertumbuhan	26
2. Tabel III.1	Tabel Kriteria Tingkat Hubungan Variabel	52
3. Tabel III.2	Kerangka Analisis	52
4. Tabel III.3	Kebutuhan Dan Sumber Data	59
5. Tabel IV.1	Perkembangan Jumlah Pekerja Kabupaten Cirebon Menurut Lapangan Pekerjaan Tahun 1995-1999	77
6. Tabel IV.2	Kapasitas dan Pelanggan Telepon per STO Tahun 1999	90
7. Tabel IV.3	Tabel Jumlah Penduduk Kota-Kota Pusat Pertumbuhan Tahun 1999	93
8. Tabel IV.4	Distribusi Persentase PDRB Kota-Kota Pusat Pertumbuhan 1999 (atas dasar harga konstan dalam %)	94
9. Tabel V.1	Pengaruh Tingkat Pembangunan Prasarana Terhadap Pertumbuhan Investasi Sektor Industri di Kabupaten Cirebon	110
10. Tabel V.2.	Tabel Pembangunan Prasarana Terhadap Investasi Tahun 1997 –2000	113
11. Tabel V.3	Tabel Pengaruh Pembangunan Prasarana Terhadap LPE Tahun 1997/1998	119
12. Tabel V.4	Hasil Uji Korelasi Pearson	120

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1.1.	Kota-kota Pusat Pertumbuhan.....	11
2. Gambar 1.2.	Kerangka Pemikiran Analisis Kebijakan Pembangunan Prasarana Kota Dalam Menunjang Kinerja Pusat Pertumbuhan	14
3. Gambar 2.1.	Konsep Core – Periphery	32
4. Gambar 4.1.	Wilayah Kabupaten Cirebon	63
5. Gambar 4.2.	Sub Wilayah Pembangunan Kabupaten Cirebon	71
6. Gambar 4.3.	Kontribusi Sektor Terhadap PDRB Tahun 1999 (dalam %)	81
7. Gambar 4.4	Diagram Penyusunan Program Pembangunan Prasarana Kota di Kabupaten Cirebon	82
8. Gambar 4.5.	Pola Jaringan Jalan Utama Kabupaten Cirebon	88
9. Gambar 4.6.	Lokasi Cabang PDAM dan Wilayah Pelayanannya	89
10. Gambar 4.7.	Sentral Telepon Otomat Kabupaten Cirebon	91
11. Gambar 4.8.	Jumlah Pelanggan Listrik di Kabupaten Cirebon Tahun 1999	92
12. Gambar 4.9.	Kedudukan Kota Arjawinangun dan Kota Ciledug	96
13. Gambar 5.1.	Pengaruh Tingkat Pembangunan Prasarana Terhadap Pertumbuhan Investasi Sektor Industri di Kabupaten Cirebon	111
13. Gambar 5.2.	Pengaruh Pembangunan Prasarana Terhadap Investasi	114
14. Gambar 5.3.	Kota Plumbon, Weru, Mundu dan Kota Astanajapura	116
15. Gambar 6.1.	Konsep Struktur Ruang Kabupaten Cirebon	126

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Cirebon 1994-1999	131
Tabel 1 Pertumbuhan PDRB Per Kecamatan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1994-1999 (dalam %)	132
Tabel 2 Tabel Luas Wilayah Dan Kepadatan Penduduk Tahun 1999	133
Tabel 3 PDRB Kabupaten Cirebon Tahun 1995-1999	134
Tabel 4 Kontribusi Sektor Terhadap PDRB	135
Lampiran 2. Produk Kebijakan dan Program Pembangunan Prasarana ...	136
Tabel 1. Pola Dasar	137
Tabel 2 Rencana Pembangunan Tahunan Daerah	142
Lampiran 3. Proyek-proyek Pembangunan Prasarana Kota Pusat Pertumbuhan	170
Tabel 1 Perkembangan Alokasi Dana Pembangunan Prasarana Kota di Kota-Kota Pusat Pertumbuhan	158
Tabel 2 Data APBD II	159
Lampiran 4. Kerangka Pertanyaan Wawancara	170
Lampiran 5. Deskripsi Hasil Wawancara	173

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu kota akan mengalami perkembangan sebagai akibat dari perkembangan jumlah penduduk dan kegiatan yang ada didalamnya, terutama kegiatan perekonomian. Perkembangan penduduk dapat disebabkan oleh 2 (dua) hal, yaitu secara alami dan migrasi, sedangkan kegiatan perekonomian ditentukan oleh faktor-faktor yang berasal dari dalam kota itu sendiri (faktor internal) yang meliputi faktor-faktor produksi seperti lahan, tenaga kerja, modal serta faktor-faktor yang berasal dari luar daerah (faktor eksternal) yaitu tingkat permintaan dari daerah-daerah lain terhadap komoditi yang dihasilkan oleh daerah yang bersangkutan.

Faktor-faktor tersebut dapat berkembang secara baik dalam rangka perkembangan kota yang ditandai dengan perkembangan perekonomiannya melalui masuknya investasi dan perkembangan sektor industri, perdagangan dan jasa serta perkembangan penduduk yang bermigrasi masuk untuk mengisi kesempatan kerja, Perkembangan ini harus didukung oleh tingkat kelengkapan prasarana kota yang mencukupi, perkembangan kota yang terjadi pada gilirannya akan turut mengembangkan wilayah secara keseluruhan.

Prasarana kota menurut Parr (1999:1209) meliputi prasarana jalan terutama yang menghubungkan kota pusat pertumbuhan dengan daerah-daerah belakangnya, jaringan listrik, dan jaringan telekomunikasi, sedangkan menurut Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum prasarana kota terdiri dari jaringan prasarana pergerakan orang dan barang yang terdiri atas jaringan jalan serta jaringan utilitas yang terdiri dari

jaringan air bersih, jaringan air limbah dan persampahan, drainase, jaringan listrik dan jaringan telepon.

Di dalam konteks pengembangan wilayah dilakukan campur tangan dan upaya pengembangan melalui pengambilan suatu kebijakan keruangan yang sifatnya mengarahkan dan menentukan arah pengembangan wilayah tersebut. Salah satu konsep pengembangan wilayah tersebut adalah Pusat Pertumbuhan. Konsep pusat pertumbuhan menganggap bahwa polarisasi dan penetesan (*trickling down*) bekerja bersama-sama yang menghasilkan proses pengembangan yang dinamis (Hirschman; 1958 dalam Gore; 1984:31). Konsep pusat pertumbuhan merupakan implementasi geografis dari konsep kutub pertumbuhan (*growth pole*) yang dipakai untuk memacu perkembangan daerah terbelakang melalui pemusatan investasi dalam suatu kutub-kutub tertentu, sehingga terjadi keuntungan ekonomi atau aglomerasi pada daerah-daerah yang dipengaruhinya, (Hansen, 1972 dalam Richardson, 1976:63).

Menurut Boudeville, konsep pusat pertumbuhan dapat diinterpretasikan sebagai aglomerasi geografis dari adanya industri propulsif di dalam suatu kota atau wilayah tertentu dan pertumbuhan ekonomi akan terpolarisasi pada kota atau wilayah tersebut. Untuk dapat menyebarkan pertumbuhan ekonomi dari pusat ke daerah belakangnya, maka Boudeville mengusulkan perlu dilakukan pemilihan lokasi pusat atau kutub pertumbuhan yang dapat mendorong efek kumulatif kegiatan ekonomi dan menyebarkannya ke daerah belakangnya. Namun kemampuan suatu industri untuk menyebarkan pertumbuhan tersebut tergantung pada efek pengganda (*Multiplier Effect*) yang berhubungan dengan faktor-faktor input-output antar industri, misalnya multiplier effect dari tenaga kerja dan output pendapatan. Akan tetapi, kutub pertumbuhan tidaklah hanya merupakan lokalisasi dari industri-industri inti, kutub pertumbuhan harus juga mendorong ekspansi yang besar ke

daerah sekitarnya dan karena efek polarisasi strategik lebih menentukan daripada keterkaitan antar industri. Prasarana yang sudah sangat berkembang, penyediaan pelayanan-pelayanan sentral, permintaan terhadap faktor-faktor produksi dari daerah belakangnya (hinterland) yang kesemuanya ini adalah penting untuk mendorong polarisasi (Richardson; 1971:54)

Menurut Berry (1967:72), pusat-pusat pertumbuhan pada bentuk nyatanya dapat berupa kota-kota. Kota-kota ini akan membentuk suatu sistem kota-kota yang memiliki hirarki (*orde*). Hirarki kota-kota merupakan alat untuk merambatkan pertumbuhan dari kota besar ke kota-kota yang lebih kecil. Menurut Parr (1999:1261) salah satu elemen yang dapat meningkatkan pembangunan ekonomi serta untuk menstimulasi masuknya investasi dari luar di dalam konsep pusat pertumbuhan ini adalah kebijakan pembangunan dari pemerintah daerah dalam upaya melengkapi dan membangun prasarana kotanya, terutama di kota-kota yang ditetapkan menjadi pusat pertumbuhan. Salah satu faktor yang menyebabkan mengapa strategi konsep pusat pertumbuhan sangat menarik sebagai sarana dalam menjalankan pengembangan perekonomian dan pengembangan daerah, adalah dari segi anggaran belanja, pemusatan investasi pemerintah pada pusat-pusat pertumbuhan tertentu lebih murah daripada melakukan pemberian bantuan besar-besaran kepada daerah (Glasson; 1978:54).

Permasalahan di Kabupaten Cirebon

Kebijaksanaan perwilayahan Propinsi Jawa Barat yang termuat dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi DT I Jawa Barat 1994-1999, mengarahkan pengembangan struktur perwilayahan Jawa Barat dengan berdasarkan konsep membuka dan meningkatkan fungsi simpul-simpul pertumbuhan di luar wilayah DKI Jakarta. Rencana Tata Ruang

Wilayah Propinsi DT I Jawa Barat menyebutkan bahwa salah satu pusat pertumbuhannya adalah Wilayah Pengembangan (WP) Timur yang berpusat di Kota Cirebon dengan fungsi utama melayani kegiatan perekonomian di Jawa Barat bagian Timur terutama arus aliran barang hasil produksi pertanian dan industri dari daerah belakang (*hinterland*) nya. Wilayah yang termasuk dalam WP Timur ini adalah meliputi Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis dan Kota Cirebon yang berperan sebagai pusat pertumbuhan.

Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi DT I Jawa Barat, menyebutkan pula bahwa sasaran pengembangan WP Timur ini adalah untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di WP Timur, menciptakan kutub-kutub pertumbuhan yang dapat mendorong perkembangan sektor-sektor lainnya dan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan dalam WP Timur yang mendorong pembangunan wilayah-wilayah di dalam WP sehingga dapat mengurangi kesenjangan antarwilayah. Pengembangan WP Timur dilakukan dengan mengembangkan dua pusat pertumbuhan yaitu Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon dan wilayah belakangnya adalah : Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan serta Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya merupakan wilayah pendukungnya.

Untuk memacu perkembangan wilayah Rencana Umum Tata Ruang Daerah Kabupaten Cirebon 1991-2011, mengambil kebijakan dengan menetapkan 4 (empat) kota pusat pertumbuhan yang akan dikembangkan sebagai penggerak utama perekonomian dan perkembangan kota-kota yang ada di Kabupaten Cirebon. Kebijakan ini dilanjutkan dan dituangkan dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah Tahun 1994-1999 dengan pertimbangan adanya kenyataan bahwa perkembangan WP Timur ini kurang optimal

karena peran Pelabuhan Cirebon sebagai pintu keluar dan Kota Cirebon sebagai pusat pertumbuhannya tidak berfungsi secara maksimal. Dalam struktur WP Timur tersebut Kabupaten Cirebon diharapkan mampu berfungsi untuk meningkatkan skala perekonomian wilayah guna menjamin kelayakan pengembangan pelabuhan Cirebon sebagai outlet. Secara struktural kedudukan kota-kota pusat pertumbuhan sebagai perkotaan merupakan bagian integral Wilayah Pengembangan Timur Jawa Barat dan tatanan metropolitan Cirebon yang berintikan Kota Cirebon. Adapun pusat-pusat pertumbuhan yang ada di Kabupaten Cirebon adalah :

1. kota pusat pertumbuhan *Sumber* dengan wilayah belakangnya meliputi Kecamatan Weru, Plumbon, Palimanan, Klangenan dan Ciwaringin,
2. kota pusat pertumbuhan *Arjawinangun* dengan daerah belakangnya meliputi Kecamatan Susukan, Gegesik, Kapetakan dan Cirebon Utara,
3. kota pusat pertumbuhan *Astanajapura* dengan daerah belakangnya Kecamatan Lemahabang dan Kecamatan Karang Sembung,
4. kota pusat pertumbuhan *Ciledug* dengan daerah belakangnya meliputi Kecamatan Babakan, Losari dan Waled

Di wilayah Kabupaten Cirebon terdapat 29 kawasan perkotaan, 23 berstatus sebagai kota kecamatan dan 6 sebagai kota perwakilan kecamatan. Kota-kota tersebut berperan sebagai simpul jasa distribusi yang umumnya ditandai dengan keberadaan pusat perdagangan (pasar tradisional dan perkotaan) dengan skala pelayanan lokal (kecamatan).

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Cirebon yang diindikasikan oleh besarnya laju pertumbuhan PDRB, memperlihatkan nilai yang relatif konstan (lihat Tabel 1 Lampiran 1). Mulai tahun 1994 sampai dengan 1996 nilai LPE Kabupaten Cirebon

berturut-turut adalah 7.24 %, 7.25 % dan 7.23%. Turun tajam pada tahun 1997 seiring dengan adanya krisis ekonomi yang melanda seluruh wilayah Indonesia dan mencapai titik terendah dengan Laju Pertumbuhan sebesar -20.77 % pada tahun 1998, keadaan mulai berangsur pulih pada tahun 1999 dengan pertumbuhan yang mencapai 3.37 %. LPE ini merupakan indikator yang menunjukkan naik tidaknya produk yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di daerah tersebut. Indikator ini biasanya digunakan untuk menilai seberapa jauh keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah dalam periode tertentu.

Secara teoritis perkembangan dan pertumbuhan kota-kota dipengaruhi oleh aspek sosial, ekonomi maupun fisik. Pengaruh positif dari aspek ekonomi adalah kota akan mampu menjadi alat pertumbuhan yang akan mampu mendorong peningkatan perekonomian dan pertumbuhan ekonomi secara luas serta mampu memberi lapangan kerja bagi sebagian penduduknya maupun di sekitarnya (Richardson; 1971:30). Menurut RTRW Kabupaten Cirebon tahun 1997-2007 keadaan yang konstan dalam bidang perekonomian di Kabupaten Cirebon berdampak pula pada perkembangan kota-kotanya terutama dari perkembangan kegiatan ekonomi perkotaan yang tidak mampu lagi menampung penambahan angkatan kerja serta ragam, skala dan tingkat pelayanan yang hampir tidak mengalami peningkatan.

1.2 Rumusan Permasalahan

Dalam kebijakan penataan ruangnya yang termuat dalam RUTRD 1991-2011 Kabupaten Cirebon menerapkan strategi pusat pertumbuhan dengan menetapkan empat kota pusat pertumbuhan yang berfungsi sebagai penggerak perekonomian wilayah dan

perkembangan kota-kotanya, akan tetapi pertumbuhan perekonomian dan perkembangan kota-kotanya relatif konstan dan tidak berkembang.

Kebijakan penetapan kota-kota pusat pertumbuhan akan mempunyai implikasi terhadap kebijaksanaan pembangunan yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah terutama untuk memastikan bagaimana proses penyaluran dan pertumbuhan ekonomi dari pusat pertumbuhan ke wilayah pengaruhnya dapat berjalan (Friedmann; 1966:97). Instrumen kebijakan ini menyangkut pembangunan prasarana kota, ekonomi, sosial dan hukum serta kebijakan yang berkaitan dengan kapasitas administratif dan koordinasi antar lembaga pemerintah dalam rangka menjalankan kebijakan spasialnya (Parr; 1999:1261). Menurut Parr salah satu elemen yang dapat meningkatkan pembangunan ekonomi serta untuk menstimulasi masuknya investasi didalam konsep pusat pertumbuhan ini adalah kebijakan pembangunan dari pemerintah daerah dalam upaya melengkapi dan membangun infrastrukturnya dikonsentrasikan di kota-kota yang ditetapkan menjadi pusat pertumbuhan

Atas dasar kondisi yang ada serta pendapat dari Parr dan Friedmann tersebut muncul suatu pertanyaan yang mendasari penelitian ini yaitu: efektifkah kebijakan pembangunan prasarana kota yang telah dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam mendukung kinerja pusat pertumbuhannya ?

1.3 Tujuan dan Sasaran Studi

Dengan berdasarkan pada latar belakang, permasalahan dan pertanyaan penelitian seperti yang telah dijelaskan dimuka, maka studi ini memiliki tujuan dan sasaran sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Studi

Tujuan dari studi ini adalah melakukan analisis terhadap kebijakan pembangunan prasarana kota (yang dijabarkan dalam bentuk program-program pembangunan prasarana kota, yang telah dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon terutama pada kota-kota pusat pertumbuhan) untuk mengetahui sejauh mana efektifitas kebijakan pembangunan prasarana kota dalam mendukung kinerja pusat pertumbuhan di Kabupaten Cirebon dalam kaitan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dikemukakan.

1.3.2 Sasaran Studi

Sasaran yang hendak dicapai melalui studi ini adalah :

1. Menganalisis kebijakan pembangunan prasarana kota yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon, melalui analisis terhadap program-program pembangunan prasarana kota yang telah dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon terutama yang berkaitan dengan kota-kota pusat pertumbuhannya, serta menganalisis proyek-proyek pembangunan prasarana kota sebagai bentuk implementasi dari program pembangunan prasarana kotanya,
2. Menganalisis efektifitas pembangunan prasarana dalam menarik investasi dengan melihat kemampuan masing-masing kota di wilayah Kabupaten Cirebon dalam menarik investasi dengan prasarana kota yang dimiliki,
3. Menganalisis hubungan antara pembangunan prasarana kota dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi di wilayah Kabupaten Cirebon,
4. Menyusun rekomendasi bagi Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam upaya meningkatkan kinerja pusat pertumbuhannya.

1.4 Manfaat Studi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi penyusunan kebijakan pembangunan prasarana kota terutama dalam upaya mendukung strategi pusat pertumbuhan yang merupakan kebijakan spasial, yang nantinya agar kinerja pusat pertumbuhan tersebut dapat optimal terutama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cirebon.

1.5 Ruang Lingkup

Pada bagian ruang lingkup ini akan diuraikan mengenai lingkup studi yang meliputi unit analisis yang merupakan lingkup wilayah dan lingkup materi yang akan dikaji.

1.5.1 Unit Analisis

Dalam kebijakan penataan ruangnya yang tertuang dalam RUTRD 1991-2011, Kabupaten Cirebon menetapkan strategi pusat pertumbuhan yang berfungsi sebagai penggerak perekonomian wilayah dan penggerak perkembangan kota-kotanya. Pusat pertumbuhan ini pada dasarnya adalah kota-kota kecamatan yang ditetapkan sebagai kota pusat pertumbuhan.

Unit analisis / obyek studi yang digunakan adalah 4 (empat) kota yang merupakan kota pusat pertumbuhan Kabupaten Cirebon. Kota-kota tersebut adalah **Kota Sumber**, **Kota Arjawinangun**, **Kota Astanajapura** dan **Kota Ciledug**. Pemilihan wilayah penelitian ini didasarkan pada pertimbangan :

1. Kota-kota pusat pertumbuhan yang ada dianggap dapat merepresentasikan kegiatan perekonomian Kabupaten Cirebon,

2. Sebagai pusat pertumbuhan perekonomian sehingga dapat diamati dampaknya terhadap perekonomian daerah dan perkembangan kota-kota yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon.

Adapun keempat kota pusat pertumbuhan yang ada di Kabupaten Cirebon ini dapat dilihat pada Gambar 1.1.

1.5.2 Ruang Lingkup Materi

Kebijakan adalah arah atau pedoman yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan yang dirumuskan melalui proses sosial di mana proses intelektual melekat di dalamnya (Bauer; 1964 dalam Dunn; 1998:1), yang dijabarkan dalam bentuk program-program dan diimplementasikan dalam kegiatan-kegiatan yang merupakan unit terkecil. Di dalam konsep pusat pertumbuhan, keuntungan-keuntungan aglomerasi menyebabkan konsentrasi produksi lebih efisien selain itu konsep ini juga memasukkan unsur kesatuan dan pengarah dalam kebijakan-kebijakan pembangunan (Richardson; 1971:57). Instrumen kebijakan ini adalah kebijakan yang menyangkut pembangunan fisik dan prasarana kota, ekonomi, sosial dan hukum serta kebijakan yang berkaitan dengan kapasitas administratif dan koordinasi antar lembaga pemerintah dalam rangka menjalankan kebijakan spasialnya (Parr; 1999:1261). Ruang lingkup materi yang akan dikaji di dalam penelitian ini dibatasi pada kebijakan pembangunan prasarana kota yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon selama kurun waktu 1992-2000.

Gambar 1.1.

Kota-Kota Pusat Pertumbuhan

Keterangan :

- Jalan Nasional
- - - Jalan Propinsi
- Jalan TOL
- - - - - Jalan Kereta Api

● = Kota Pusat Pertumbuhan



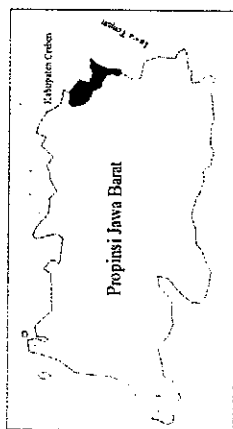
Skala 1 : 200.000

MAKSTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2002



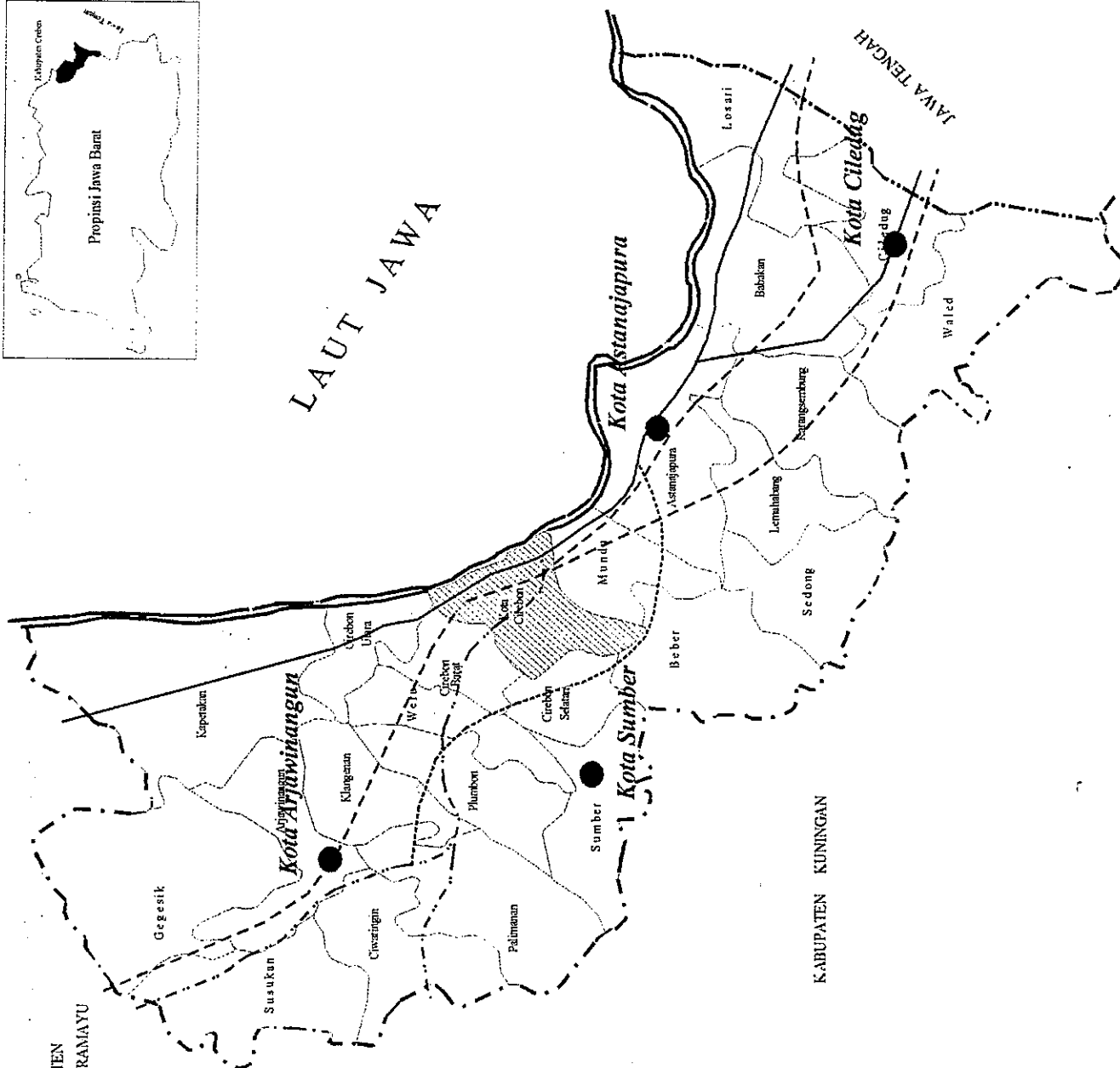
LAUT JAWA

JAWA TENGAH

KABUPATEN KUNINGAN

KABUPATEN
INDRAMAYU

KABUPATEN
MAJALENGKA



Kebijakan ini dijabarkan dalam bentuk program pembangunan dan dilaksanakan dalam bentuk proyek-proyek pembangunan, oleh sebab itu dalam penelitian ini dilakukan dengan 3 (tiga) pendekatan, yaitu: *pertama*, pendekatan yang diarahkan pada program pembangunan untuk melihat konsep dan dampaknya terhadap pengkonsentrasian pembangunan prasarana kota di kota-kota pusat pertumbuhan serta pada proyek pembangunan untuk melihat implementasinya secara spasial. Pendekatan *kedua* diarahkan pada menganalisis efektifitas pembangunan prasarana kota tersebut dalam menarik investasi terutama sektor industri dengan melihat kemampuan masing-masing kota di wilayah Kabupaten Cirebon dalam menarik investasi dengan prasarana kota yang dimiliki serta pendekatan *ketiga* adalah menganalisis pengaruh atau hubungan antara pembangunan prasarana kota terhadap laju pertumbuhan ekonomi.

1.6 Kerangka Pemikiran

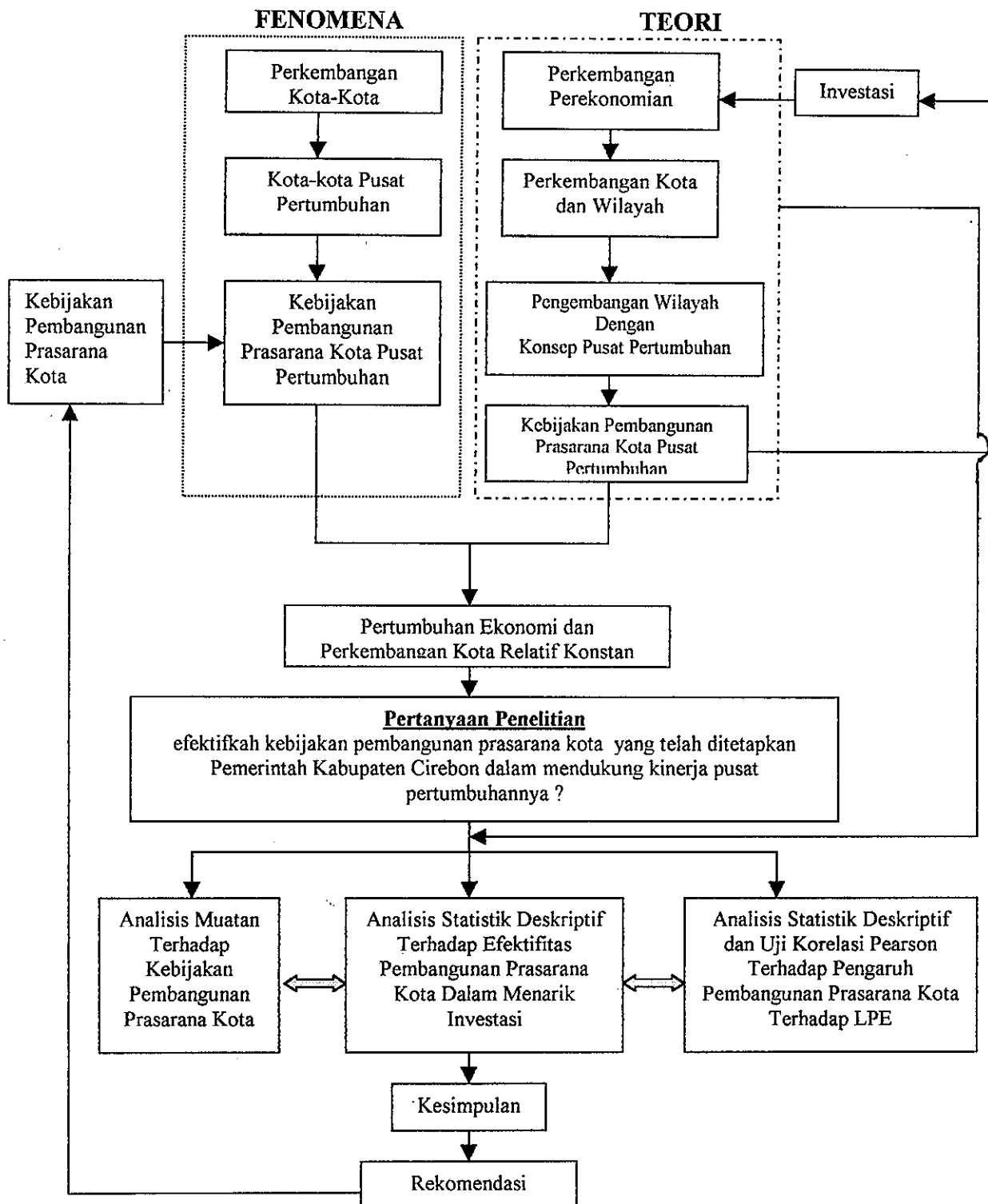
Pada dasarnya suatu kota yang ditetapkan sebagai pusat pertumbuhan dimaksudkan untuk berperan sebagai penggerak pertama perekonomian wilayah, dimana pada pusat pertumbuhan tersebut ada upaya-upaya bagaimana efek penetesan dapat muncul dan menimbulkan sub-sub pertumbuhan yang secara regional mempengaruhi pertumbuhan ekonomi wilayah yang pada gilirannya akan memunculkan efek pengganda dari investasi yang dibiayainya (Glasson; 1978:84). Menurut teori-teori yang ada menunjukkan bahwa kondisi tersebut harus didukung pula oleh kebijakan pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah daerah terutama kebijakan yang menyangkut pembangunan prasarana kotanya dikonsentrasikan di kota-kota pusat pertumbuhan agar proses penjalaran dan pertumbuhan perekonomian wilayah dapat tercapai, dengan demikian kinerja kota-kota pusat pertumbuhan tersebut dapat optimal.

Untuk melihat efektifitas kebijakan pembangunan prasarana kota tersebut dalam mendukung kinerja pusat pertumbuhan, dilakukan analisis terhadap kebijakan pembangunan prasarana kota yang telah dijalankan terutama terhadap kota-kota pusat pertumbuhan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dikemukakan. Selain itu juga dianalisis efektifitas pembangunan prasarana kota di masing-masing kota dalam menarik investasi ke dalam wilayah Kabupaten Cirebon serta menganalisis pengaruh pembangunan prasarana kota tersebut terhadap Laju Pertumbuhan Ekonominya.

Untuk analisis kebijakan pembangunan prasarana kota, karena datanya baik itu yang berasal dari buku-buku produk kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon maupun dari hasil wawancara berbentuk naratif yang di dalamnya memuat ide serta konsep dan tidak dapat diukur, maka metoda analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif yang sifatnya deskriptif. Sedangkan untuk menganalisis efektifitas pembangunan prasarana kota dalam menarik investasi karena datanya berupa data-data statistik dalam bentuk numerik (angka), maka analisis yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dengan cara menginterpretasikan dan menganalisis data yang berupa dana pembangunan prasarana kota dengan data investasi melalui bantuan grafik kartesian yang sederhana.

Untuk melihat pengaruh pembangunan prasarana kota terhadap laju pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan analisis statistik deskriptif dengan melalui analisis korelasi dimana variabel yang akan dilihat tingkat korelasinya adalah variabel dana pembangunan prasarana kota (variabel bebas) dengan variabel laju pertumbuhan ekonomi (variabel terikat), komponen yang diuji adalah komponen r (ρ) dengan menggunakan metoda Pearson. Dari dasar pemikiran tersebut diatas dapat disusun kerangka pemikiran studi yang secara skematis diperlihatkan pada Gambar I.2.

GAMBAR I.2.
KERANGKA PEMIKIRAN ANALISIS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
PRASARANA KOTA DALAM MENDUKUNG KINERJA PUSAT
PERTUMBUHAN DI KABUPATEN CIREBON



1.7 Sistematika Penulisan

Secara sistematis penulisan thesis ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan

Pada bab ini dikemukakan latar belakang teoritis dan fenomena mengapa studi ini dilakukan, perumusan masalah yang dihadapi, tujuan dan sasaran serta manfaat yang diharapkan melalui studi ini, ruang lingkup materi yang memuat batasan studi atau kajian substantif dan ruang lingkup spasial dimana studi ini dilaksanakan serta memuat alasan pemilihan wilayah dan batasannya secara geografis.

Bab 2 Strategi Pusat Pertumbuhan dan Pembangunan Prasarana Kota

Setelah menjelaskan latar belakang dan perumusan permasalahan yang ada, pada bab ini diuraikan kajian teoritis yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dalam ruang lingkup substansi penelitian yang meliputi kajian teori mengenai perkembangan kota yang menjelaskan tentang pengertian perkembangan dan pengembangan wilayah, pengertian-pengertian tentang pembangunan prasarana kota, teori teori kutub pertumbuhan, teori pusat pertumbuhan, strategi pusat pertumbuhan, prasyarat strategi pusat pertumbuhan serta teori-teori yang menjelaskan tentang konsep pengembangan wilayah dengan pendekatan Top Down.

Bab 3. Metoda Penelitian

Bab ini menguraikan tentang metoda penelitian yang akan digunakan beserta argumen-argumennya, desain penelitian, kerangka analisis penelitian serta metoda analisis yang dilakukan. Selain itu diuraikan pula data-data yang dibutuhkan serta cara memperoleh data tersebut.

Bab 4. Kondisi Wilayah Kabupaten Cirebon

Pada bab ini memaparkan gambaran umum wilayah Kabupaten Cirebon yang berisi analisis dan tinjauan terhadap aspek fisik, kondisi sosial dan perekonomian serta kelengkapan sarana dan prasarana kota yang dimiliki. Selain itu juga digambarkan kondisi kota-kota pusat pertumbuhan baik aspek perekonomian maupun sarana dan prasarana kotanya.

Bab 5. Analisis Kebijakan Pembangunan Prasarana Kota Dalam Mendukung Kinerja Pusat Pertumbuhan di Kabupaten Cirebon

Pada bagian ini dianalisis dan dievaluasi kebijakan pembangunan prasarana kota yang dijabarkan dalam bentuk program-program pembangunan dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) serta menganalisis proyek-proyek pembangunan yang telah dilaksanakan di kota-kota pusat pertumbuhan pada kurun waktu tahun 1991 sampai dengan tahun 2000. Selain itu dianalisis pula efektifitas pembangunan prasarana kota dalam menarik investasi di kota-kota dalam wilayah Kabupaten Cirebon serta analisis terhadap pengaruh atau hubungan pembangunan prasarana kota dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi Wilayah.

Bab 6. P e n u t u p

Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, rekomendasi terhadap perbaikan strategi pusat pertumbuhan serta usulan penelitian lanjutan.

BAB II

STRATEGI PUSAT PERTUMBUHAN DAN PEMBANGUNAN PRASARANA KOTA

2.1 Konsep Perkembangan Wilayah

Dalam pembahasan wilayah (region) dikenal adanya konsep wilayah yang merupakan cara sistematis dalam menganalisa wilayah yang dapat digolongkan kedalam 3 (tiga) bagian, yaitu : wilayah homogen, wilayah nodal dan wilayah perencanaan (Paelinck, 1978 dalam Gore, 1984:25). Konsep wilayah homogen (*homogeneous region*) didasarkan pada pendapat bahwa wilayah-wilayah geografis dapat dikaitkan bersama-sama menjadi satu daerah tunggal apabila wilayah tersebut mempunyai ciri (kekhususan) yang seragam. Ciri-ciri ini dapat bersifat ekonomi (misal : struktur produksinya sama), bersifat geografis (misal : topografi, iklim) dan sosial (misal : kebiasaan). Akan tetapi wilayah-wilayah yang mempunyai keseragaman dalam hal-hal tertentu mungkin juga dapat berlainan dalam hal-hal lainnya.

Wilayah Nodal (pusat/node) adalah merupakan wilayah yang mempunyai suatu sistem pusat (*node*) yang mempunyai wilayah pengaruh (*zone of influence*). Wilayah nodal terdiri dari satuan-satuan yang heterogen misalnya distribusi penduduk yang pada gilirannya akan membentuk hirarki kota-kota yang satu sama lain saling berhubungan erat secara fungsional. Dari hubungan fungsional ini akan muncul fenomena arus dimana fenomena arus ini tidak terjadi pada tingkat yang sama antara pusat (*node*) dengan wilayah pengaruhnya. Besar kecilnya arus ini akan sangat dipengaruhi oleh daya tarik node dan berubah secara terbalik bersama-sama dengan jarak dari pusat tersebut.

Wilayah Perencanaan adalah suatu wilayah dimana konsep-konsep perencanaan diterapkan baik fisik, ekonomi maupun sosial budaya. Wilayah perencanaan ditetapkan dalam rangka upaya penyelesaian masalah yang ada di wilayah yang bersangkutan terutama masalah-masalah kebijaksanaan dan perencanaan wilayah itu sendiri. Karena implementasi dari kebijaksanaan regional memerlukan kekuasaan bertindak dan kekuasaan ini lebih banyak berada di tangan pemerintah. Klasifikasikan wilayah perencanaan tersebut (Friedmann; 1966:61), yaitu:

1. Wilayah pusat (*core areas*), yang memiliki karakteristik pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi,
2. Wilayah transisi potensial (*upward-transitional areas*), yang berlokasi dekat dengan wilayah pusat dan memiliki kapasitas untuk mengintensifkan penggunaan sumber daya yang dimiliki,
3. Wilayah perbatasan (*resource frontier regions*) merupakan wilayah permukiman baru yang masih didominasi oleh sektor pertanian,
4. Wilayah transisi kurang potensial (*downward-transitional areas*) yang memiliki ciri tidak adanya perpindahan penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang stagnan,
5. Wilayah yang bermasalah (*special problem region*) merupakan wilayah yang memerlukan pendekatan pengembangan tertentu karena keunikan lokasi atau sumberdaya yang dimilikinya.

Pada dasarnya perkembangan suatu wilayah merupakan perkembangan dari kota-kota yang ada didalamnya baik dari aspek fisik, ekonomi maupun sosial. Perkembangan ini dapat terjadi secara alamiah (*natural/unplanned*) ataupun secara direncanakan (*Planned*), perkembangan secara alamiah terjadi akibat adanya pengaruh faktor-faktor internal dan

eksternal dari suatu wilayah sedangkan perkembangan yang direncanakan melalui pengembangan wilayah adalah perkembangan yang diatur dengan menerapkan kebijakan perencanaan dan pengembangan wilayah dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan perekonomian wilayah yang pada gilirannya nanti akan mempengaruhi perkembangan kota-kotanya.

Menurut Glasson (1978:65) ada 2 (dua) faktor yang mempengaruhi perkembangan suatu wilayah secara alami, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam wilayah itu sendiri di mana proses perkembangan wilayah didasarkan pada asumsi bahwa kenaikan pendapatan perkapita akan diikuti oleh relokasi sumberdaya. Faktor-faktor internal ini berupa faktor-faktor produksi (tanah, tenaga kerja dan modal); sedangkan faktor eksternal berasal dari luar wilayah tersebut, dimana perkembangan suatu wilayah dipengaruhi oleh eksploitasi sumberdaya alam dan pertumbuhan basis ekspor wilayah yang bersangkutan yang dipengaruhi oleh tingkat permintaan dari wilayah lainnya. Pendapatan yang diperoleh dari ekspor tersebut mengakibatkan berkembangnya kegiatan penduduk setempat, perpindahan modal dan tenaga kerja. Pengaruh-pengaruh eksternal dapat mempengaruhi perkembangan wilayah secara optimal apabila faktor/variabel utamanya, yaitu pola pendapatan dan pengeluaran sektor ekspor, inisiatif bisnis lokal dan peranan pemerintah diupayakan secara maksimal. Jadi terlihat bahwa jenis kegiatan yang tumbuh dan berkembang di suatu kota sebenarnya merupakan fungsi dari baik posisi geografis, sumberdaya daerah belakangnya maupun fungsi dan peranan kota tersebut dalam wilayah yang lebih luas.

Perkembangan wilayah yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal (Friedmann dalam Gore; 1984:19) dapat dijelaskan sebagai berikut:

- *Tahap pertama*, tahap perekonomian subsistem lokal yang independen tanpa hirarki (*independent local centres with no hirarchy*), pada tahap ini masih sedikit investasi di wilayah tersebut dan masih didominasi oleh sektor pertanian.
- *Tahap kedua*, terjadi setelah adanya kemajuan transportasi dan perdagangan yang mendorong spesialisasi wilayah yang memunculkan industri sederhana di desa-desa untuk memenuhi kebutuhan para petani. Lokasi industri desa ini dekat dengan lokasi pertanian setempat.
- *Tahap ketiga*, dengan semakin bertambahnya perdagangan antar wilayah, wilayah yang bersangkutan akan menjadi maju melalui suatu urutan perubahan tanaman pertanian,
- *Tahap keempat*, penduduk semakin bertambah dan berkurangnya tambahan hasil pertanian akan memaksa wilayah yang bersangkutan melakukan industrialisasi. Industri sekunder mulai berkembang, mengolah produk primer dan akan mengarah ke spesialisasi,
- *Tahap kelima*, merupakan tahap pengembangan industri tersier yang berorientasi ekspor. Wilayah ini akan menyalurkan/mengekspor model, keterampilan dan jasa-jasa yang bersifat khusus ke wilayah yang kurang berkembang.

Dalam kerangka peningkatan perekonomian wilayah dan perkembangan kota-kotanya, maka diperlukan suatu upaya pengembangan wilayah. Yang dimaksud dengan pengembangan wilayah adalah semua usaha yang dengan sadar merencanakan pengembangan wilayah ditinjau dari berbagai segi sebagai satu kesatuan yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan hubungan antara manusia dengan alamnya. Berbagai

segi tersebut adalah segi ekonomi, sosial maupun fisik. Inti daripada pengembangan wilayah sendiri dalam pengertian dimensi waktu dan tata ruang adalah visualisasi bekerjanya proses-proses:

- a. Konservasi sumber daya alam,
- b. Pengaturan arus dan aliran barang,
- c. Pengembangan Lingkungan.

2.2 Peran Kota Dalam Pengembangan Wilayah

Menurut Rondinelli (1984:32) di negara-negara dengan tingkat keragaman yang bervariasi yang meliputi aspek ekonomi, sosial, budaya, ideologi dan lainnya, peranan kota dalam pengembangan wilayah tidak dapat dilihat dari besaran jumlah penduduk atau ukuran kota tersebut. Peran kota ditentukan oleh karakteristik fungsi kota yang diembannya yaitu aksesibilitas yang dimiliki terhadap wilayah hinterland-nya dan berperan sebagai berikut:

- Merupakan penyedia lokasi bagi kepentingan desentralisasi fasilitas-fasilitas pelayanan publik, skala lokal sehingga meningkatkan aksesibilitas antara kota dengan desa.
- Memberikan bermacam variasi barang konsumen, perdagangan, pelayanan perorangan melalui perdagangan skala kecil dan perluasan aktivitas sektor informal.
- Memberikan iklim kondusif bagi pertumbuhan industri, yang dapat berfungsi melayani pasar lokal dan permintaan internal dengan baik. Pelayanan yang dilakukan ini akan sejalan dengan semakin tingginya skala kota yang

bersangkutan, semakin besar skala kota akan semakin besar pula skala industri manufaktur yang didukungnya,

- Menciptakan kondisi kondusif bagi perdagangan dan pasar hasil-hasil pertanian serta meningkatkan produktifitas pertanian dan pendapatan wilayah hinterlandnya.
- Sebagai pusat transportasi dan telekomunikasi yang menghubungkan dengan kota-kota disekitarnya.

Friedmann menilai peran kota tersebut dalam suatu sistem perkotaan dipandang sebagai agen dinamis pengembangan wilayah (Friedmann dalam Bourne, 1978:115). Sistem kota-kota bukan sekedar membangkitkan namun juga menjadi mediator pengembangan wilayah.

2.3 Pendekatan Top Down Dalam Pengembangan wilayah

Didalam pengembangan wilayah sangat didominasi oleh aspek pengambilan keputusan (*decision making*) yang akan menentukan arah pengembangan wilayah tersebut. Melalui aspek pengambilan keputusan ini, pengembangan wilayah dapat didekati melalui pendekatan Top Down. Konsep ini lebih menekankan pada keberadaan pusat-pusat wilayah sebagai stimulan penyebaran pembangunan. Pusat wilayah ini berfungsi sebagai pusat pelayanan utama dan pusat pertumbuhan bagi daerah hinterlandnya yang secara umum lebih mengutamakan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebagai dasar penyebaran dan pemerataan pembangunan.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut, strategi investasi ditekankan pada sektor-sektor kunci yang mampu meningkatkan pendapatan wilayah secara cepat dan diharapkan dapat memberikan spread effect ke daerah pinggirannya. Konsep Top Down

dicirikan dengan adanya *Growth Poles* dan *Growth Centers*, dimana growth pole menekankan bahwa pembangunan tidak mungkin dimulai oleh semua sektor secara serentak, tetapi dilakukan secara selektif hanya pada sektor strategis (*leading sector*). *Leading sector* tersebut diharapkan mampu menggerakkan sektor ekonomi lainnya. Suatu *leading sector* menurut Glasson (1978:93) mempunyai ciri-ciri:

- Propulsif industri / penggerak pembangunan,
- Menggunakan teknologi tinggi,
- Berkaitan erat dengan pasar yang elastisitasnya tinggi terhadap barang produksinya,
- Memiliki keterkaitan antar industri yang kuat,
- Kemampuan tinggi untuk berinovasi,
- Tumbuh dengan cepat / fast growing.

Dalam dimensi ruang *leading sector* terletak di beberapa pusat-pusat tertentu yang disebut *Growth Center*. Growth Center terbentuk karena adanya aglomerasi ekonomi dan keterkaitan produksi baik secara vertikal maupun horisontal. Growth Center merupakan konsep spasial / tata ruang yang mengadopsi dari konsep ekonomi, jadi bukan meninjau sektor mana, tetapi daerah atau ruang yang mana. Konsep ini menyatakan bahwa pusat kutub pertumbuhan terdapat pada perusahaan-perusahaan propulsif yang besar yang memiliki kaitan yang kuat baik ke depan (*forward linkages*) maupun ke belakang (*backward linkages*).

2.4 Teori Kutub Pertumbuhan

Konsep ini dipakai untuk memacu perkembangan daerah terbelakang melalui pemusatan investasi dalam suatu kutub-kutub tertentu, sehingga terjadi keuntungan

ekonomi atau aglomerasi pada daerah-daerah yang dipengaruhi, (Hansen, 1972, Richardson, 1976:63). Teori ini pertama kali diutarakan oleh seorang ekonom Perancis Francois Perroux yang berpendapat bahwa fakta dasar dari perkembangan spasial sebagaimana halnya dengan perkembangan industri adalah bahwa pertumbuhan tidak terjadi di sembarang lokasi dan juga tidak terjadi secara serentak. Hal tersebut dapat lebih optimal menjalar untuk suatu konsentrasi ruang pertumbuhan ekonomi disekeliling titik awal yang ditetapkan.

Dalam papernya yang berjudul "*Note sur la notion de pole de croissance*" yang diterbitkan pada tahun 1955, Perroux berpendapat karakteristik dari suatu rangkaian industri dapat meningkatkan efek pertumbuhan dari suatu unit propulsif dalam rangkaian tersebut. Karakteristik ini termasuk didalamnya suatu struktur pasar yang oligopolistik dan aglomerasi ruang. Jadi jelas menurut paper dari Perroux tersebut bahwa suatu kutub pertumbuhan adalah merupakan suatu aglomerasi ruang dari industri yang saling berkaitan. Akan tetapi dari dasar ini telah muncul reinterpretasi lebih luas lagi yang dapat digambarkan seperti penjelasan dibawah ini:

- Kutub pertumbuhan adalah merupakan suatu aglomerasi ruang dari industri yang saling terkait. Menurut Mc.Crone (1969) dalam Gore (1984:32) sebuah kutub dari pertumbuhan terdiri dari suatu kompleks industrial yang terpilih dari industri yang saling terkait yang mempunyai keunggulan ekonomis dan keuntungan lokasional.
- Suatu kutub pertumbuhan merupakan suatu aglomerasi ruang dari industri yang saling terkait yang memiliki industri propulsif. Menurut Lausen (1974) dalam Gore (1984:32) suatu kutub pertumbuhan adalah merupakan sebuah kelompok besar industri yang secara kuat dihubungkan kedalam ikatan input-output

disekeliling suatu industri unggulan (*leading industry*) dan diikat secara geografis. Industri unggulan itu sendiri dan seluruh kelompok, menginovasi dan tumbuh pada suatu keadaan yang lebih cepat dari industri-industri eksternal ke kutub.

- Suatu kutub pertumbuhan merupakan suatu aglomerasi ruang dari industri yang saling terkait, dilokasikan dalam suatu pusat perkotaan dimana melalui ekspansinya menginduksi pertumbuhan ke wilayah hinterlandnya. Menurut Boudeville (1966) dalam Richardson (1971:58), konsep pertumbuhan dapat diinterpretasikan sebagai aglomerasi geografis dari adanya industri propulsif di dalam suatu kota atau wilayah tertentu dan pertumbuhan ekonomi akan terpolarisasi pada kota atau wilayah tersebut. Untuk dapat menyebarkan pertumbuhan ekonomi dari pusat ke daerah belakangnya, maka Boudeville mengusulkan perlu dilakukan pemilihan lokasi pusat atau kutub pertumbuhan yang dapat mendorong efek kumulatif kegiatan ekonomi dan menyebarkannya ke daerah belakangnya.
- Suatu kutub pertumbuhan adalah merupakan suatu pusat kota yang berkembang serta menginduksi dalam wilayah hinterland disekelilingnya. Menurut Nichols (1969) dalam Gore (1984:32) suatu kutub pertumbuhan adalah merupakan sebuah pusat perkotaan dari aktifitas perekonomian yang dapat mencapai pertumbuhan mandiri serta titik pertumbuhan yang didifusikan keluar dalam wilayah kutub tersebut.
- Suatu kutub pertumbuhan adalah merupakan suatu pusat perkotaan yang berkembang. Menurut Parr (1999:1254) hal tersebut dapat diasumsikan untuk

kepentingan bahwa suatu kutub pertumbuhan merepresentasikan suatu pusat kota dengan beberapa karakteristik pertumbuhan berikut :

1. Suatu pusat pertumbuhan adalah merupakan pertumbuhan populasi (lapangan kerja) pada suatu tingkat yang lebih besar dari rata-rata perekonomian daerah,
2. Suatu pertumbuhan populasi yang absolut (lapangan kerja) yang memiliki persentase terbesar dari total pertumbuhan daerah.

Dalam hubungannya dengan hal tersebut apa yang dimulai sebagai suatu unit pertumbuhan ekonomis, suatu perusahaan atau industri telah menjadi suatu unit pertumbuhan spasial, yaitu **sebuah kota**. Dalam kerangka membawa dimensi ekonomi kutub pertumbuhan kedalam dimensi geografis seperti yang didefinisikan oleh Nichols dan Parr, maka dimensi geografis dari kutub pertumbuhan tersebut dinamakan Growth Centers (pusat-pusat pertumbuhan).

Pendekatan pemahaman teori kutub pertumbuhan dapat dilihat berdasarkan pendapat Hermansen dengan pendekatan statis dan dinamis pada tabel berikut ini :

TABEL II.1.
PENDEKATAN STATIS DAN DINAMIS PUSAT PERTUMBUHAN

Pendekatan Aspek	Deskripsi	Penjelasan	Perencanaan/Kontrol
Industri	Hubungan antar industri, tabel input-output	Efek keterkaitan kedepan dan kebelakang, efek dominasi dan ekonomi eksternal	Model input-output, kompleks-kompleks industri yang dihubungkan
Geografis	Hirarki kota dengan hubungan rank-size	Teori central place, teori-teori umum tentang organisasi ruang, teori-teori tradisional tentang lokasi industri	Optimum city size dan organisasi spasial optimum, teori jaringan, kebijakan pusat pelayanan, kota baru

<p><u>Lanjutan :</u></p> <p>Hubungan antara aspek industri dan geografis</p>	<p>Pola industri perkotaan, sumber daya, hubungan pusat-pinggiran</p>	<p>Kutub pembangunan yang dilokalisir didasarkan pada kompleks industri, Inersia akibat hubungan intertemporal dan lokasional</p>	<p>Lokasi optimum kompleks industri dalam sistem kota, perencanaan sistem kota-kota.</p>
<p>Pendekatan Aspek</p>	<p>Deskripsi</p>	<p>Penjelasan</p>	<p>Perencanaan/Kontrol</p>
<p>Industri</p>	<p>Kecenderungan perubahan industri, penanganan segera rangkaian inovasi dalam teknik dan produk</p>	<p>Teori sektor, leading industries, industri propulsive dan strategis, kutub pembangunan yang fungsional, difusi pada inovasi diantara industri</p>	<p>Perencanaan kompleks industri dinamis, kebijakan yang luas dan pembelanjaan. Berdirinya industri-industri propulsif dan strategis</p>
<p>Geografis</p>	<p>Kecenderungan urbanisasi, identifikasi pusat-pusat pertumbuhan secara spasial, memetakan sistem regional yang dipolarisasi (nodal)</p>	<p>Menjalankan suatu kota, hipotesis pola pertumbuhan kota, permasalahan eksternal ekonomi wilayah, pembangunan kutub-kutub yang dilokalisir, nilai ekonomis urbanisasi, difusi spasial dari inovasi</p>	<p>Perencanaan sistem kota yang didasarkan pada lokasi dari industri propulsif dan kutub yang dilokalisir dari pertumbuhan, pelayanan yang luas dan menyeluruh</p>
<p>Hubungan antara aspek industri dan geografis</p>	<p>Kewenangan kota dan pergeseran menuju pelayanan, tahapan-tahapan pembangunan</p>	<p>Difusi dan inovasi ruang industri yang dikondisikan oleh hubungan lokasional, akumulasi keunggulan, menjalankan kota, teori tahapan pembangunan.</p>	<p>Perencanaan pembangunan wilayah kota yang komprehensif yang didasarkan pada teori central place, kutub pembangunan dan difusi.</p>

Sumber : Methuen C. Gore, (1984), *Regions In Questions : Space, Development Theory and Regional Policy*, hal : 91-92.

2.5 Teori Pusat Pertumbuhan

Pada teori ini dimensi geografis dari teori Kutub Pertumbuhan (*Growth Poles*) pada dasarnya dengan menciptakan hubungan antara "*Pole*" dalam pengertian yang abstrak dengan lokasi sebagai "*center*". Untuk membedakan antara *Growth Poles* dan *Growth Centers*, dapat dikatakan bahwa *growth poles* merupakan konsep pertumbuhan ekonomi yang tidak memiliki dimensi geografis, sedangkan *Growth Centers* sepenuhnya adalah konsep *Spatial Location* (Glasson; 1974 : Moseley; 1974). Konsep kutub pertumbuhan dikembangkan dengan sentuhan spasial oleh Jacques Boudeville. Pusat pertumbuhan memiliki upaya-upaya bagaimana agar *trickling down effects* berfungsi sehingga nantinya muncul sub-sub pusat pertumbuhan dan membentuk ikatan (*linkages*) yang pada gilirannya akan mengembangkan pusat dan sub pusat pertumbuhan.

Teori kutub pertumbuhan dan pusat pertumbuhan menganggap bahwa hirarki kota-kota merupakan alat untuk merambatkan pertumbuhan dari kota besar ke kota-kota yang lebih kecil. Konsep-konsep dasar ekonomi dan perkembangan geografis mengenai strategi pusat pertumbuhan atau kutub pertumbuhan dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Konsep Industri Strategis (*Leading Industry*) dan Industri Propulsif

Konsep ini menyatakan bahwa pada kutub-kutub pertumbuhan harus mempunyai perusahaan-perusahaan yang bersifat industri propulsif dan industri strategis dimana suatu industri propulsif memiliki ciri-ciri relatif besar, menimbulkan dorongan-dorongan yang nyata pada lingkungannya, mempunyai kemampuan berinovasi tinggi dan termasuk dalam suatu industri yang sedang bertumbuh dengan cepat. Perusahaan-perusahaan yang memiliki sifat tersebut merupakan perusahaan-perusahaan strategis, dengan karakteristik:

1. Relatif baru, dinamis dan mempunyai tingkat teknologi maju yang menginjeksikan atmosfer gandrung pertumbuhan ke dalam suatu daerah,
2. Permintaan terhadap produknya memiliki elastisitas pendapatan yang tinggi, produk tersebut biasanya dijual ke pasar-pasar nasional,
3. Mempunyai kaitan-kaitan antar industri yang kuat dengan sektor-sektor lainnya. Kaitan-kaitan ini dapat berbentuk kaitan ke depan (*forward linkage*), dimana industri tersebut mempunyai rasio penjualan hasil industri antara yang tinggi terhadap penjualan total, atau berbentuk kaitan ke belakang (*backward linkage*), dimana industri tersebut mempunyai rasio input antara industri-industri lainnya yang tinggi terhadap input total.

Konsep industri strategis ini bukannya tanpa persoalan, masalah yang utama dalam konsep ini adalah bahaya yang inheren kalau bertumpu pada satu industri tertentu. Banyak diantara daerah-daerah persoalan dewasa ini adalah titik-titik pertumbuhan yang terlalu berspesialisasi dimasa lampau.

Menurut Richardson (1976:79), lokasi geografis industri-industri tersebut, pada titik-titik tertentu dalam suatu wilayah atau kota ditentukan oleh beberapa faktor, misalnya lokalisasi sumber daya alam, tapi pada kenyataannya pusat-pusat pertumbuhan tersebut dikembangkan pada pusat-pusat yang sudah ada sebelumnya.

b. Konsep Efek Polarisasi dan Efek Penetesan (*Trickle Down Effect*)

Konsep ini dikemukakan oleh Hirschman yang menyatakan bahwa pertumbuhan yang cepat dari industri propulsif akan mendorong terjadinya suatu proses Polarisasi dari unit-unit ekonomi lainnya kedalam kutub-kutub pertumbuhan. Pada proses terjadinya terdapat beberapa keuntungan aglomerasi. Polarisasi ekonomi pasti menimbulkan

polarisasi geografis dengan mengalirnya sumber daya dan konsentrasi kegiatan ekonomi pada pusat-pusat yang jumlahnya terbatas, sedangkan efek penetesannya adalah proses mengalirnya pertumbuhan dari pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah belakangnya. Yang diharapkan dari strategi pusat pertumbuhan adalah adanya suatu penetesannya dari pusat pertumbuhan ke daerah-daerah belakangnya, namun menurut analisis Hirschman efek polarisasi yang terjadi akan menimbulkan disparitas antara pusat pertumbuhan dengan daerah-daerah belakangnya akibat adanya pemusatan sumber daya di pusat pertumbuhan.

c. Konsep Efek Penjalaran (*Spread Effect*) dan Efek Penghisapan (*Backwash Effect*)

Konsep ini dikemukakan oleh Myrdal, di mana konsep efek penjalaran menyatakan bahwa pada waktunya, kualitas pendorong yang dinamis dari kutub-kutub pertumbuhan akan melancarkan pengaruhnya menyebar dan memasuki ruangan sekitarnya (daerah belakang). Pada mulanya pengaruh tersebut dirasakan di kota-kota dan daerah-daerah pedesaan yang terletak di sekitar kutub pertumbuhan kemudian efeknya menyebar ke celah-celah daerah belakangnya. Sedangkan Efek penghisapan (*Backwash*) adalah proses mengalirnya sumber daya dan potensi yang terdapat di daerah-daerah belakang ke pusat pertumbuhan atau dengan perkataan lain pembangunan pada pusat-pusat pertumbuhan akan menyebabkan daerah-daerah belakang menurun. Menurut Myrdal pada prakteknya efek penjalaran ini lebih kecil dibandingkan dengan efek penghisapan yang terjadi sehingga mengakibatkan daerah-daerah belakang menurun.

d. **Konsep *Core - Periphery***

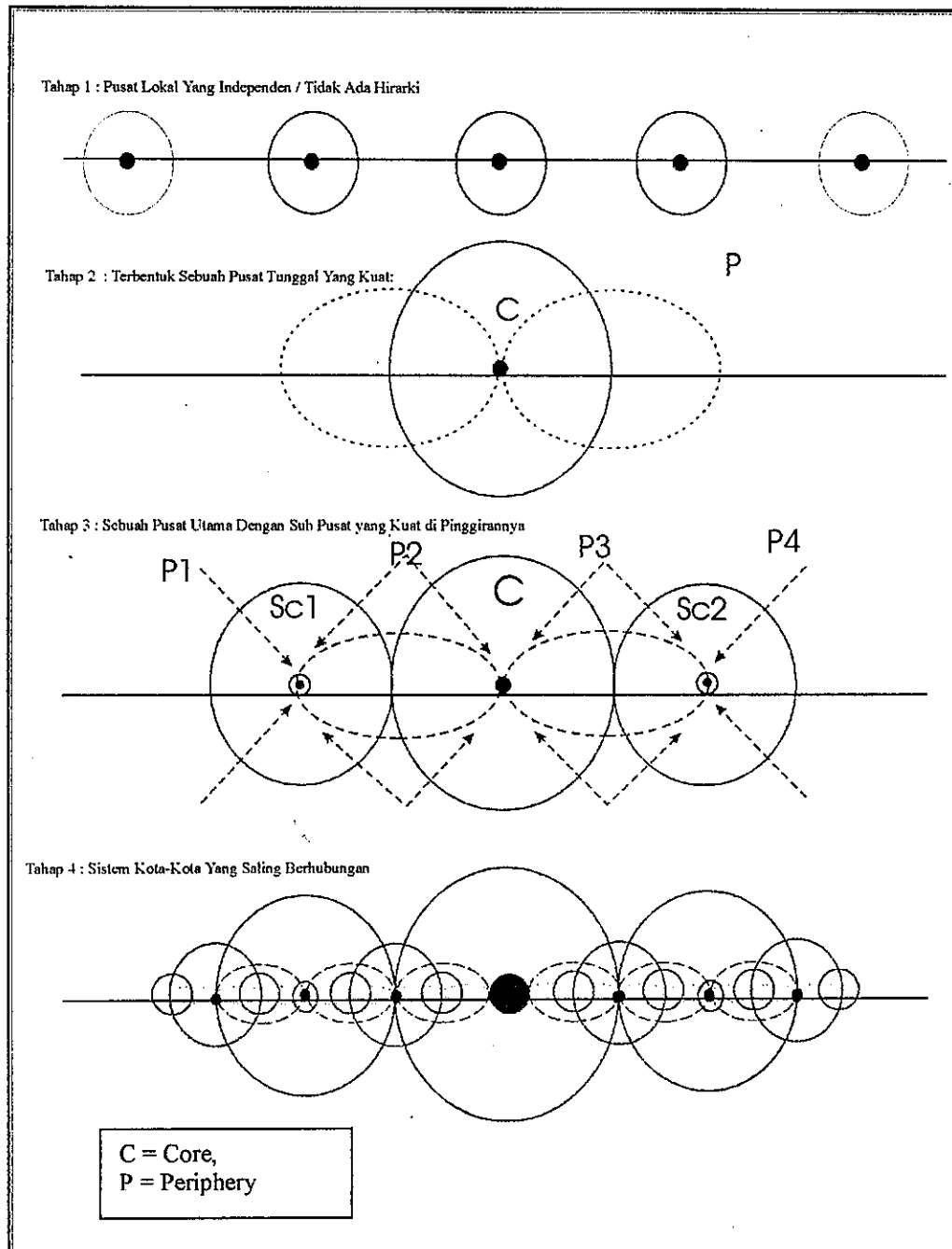
Masih dengan menggunakan kerangka teori *Growth Poles* dan *Growth Centers*, Friedmann mencoba mewujudkan model pengembangan wilayah yang sistematis dan komprehensif yang disebut *Core - Periphery*. Dalam konsep ini Friedmann berargumentasi bahwa pusat pertumbuhan dapat menjawab hubungan antara teori ketimpangan pembangunan dengan gagasan untuk mendorong pertumbuhan wilayah melalui integrasi ekonomi. Ketimpangan wilayah dapat dikurangi dengan cara menciptakan proses *Polarized Development* ke wilayah-wilayah lain yang belum berkembang melalui penciptaan pusat pertumbuhan yang menghubungkan daerah tersebut dengan sistem perkotaan yang lebih luas. Friedmann menyatakan bahwa pembangunan merupakan suatu proses integrasi sosial dan ekonomi, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh adanya inovasi-inovasi pada daerah inti (*core area*) yang kemudian menyebar pada daerah sekitarnya (*periphery*). Namun kemampuan suatu industri untuk menyebarkan pertumbuhan tersebut tergantung pada efek pengganda yang berhubungan dengan faktor-faktor input-output antar industri, misalnya efek pengganda dari tenaga kerja dan output pendapatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan mengapa strategi konsep pusat pertumbuhan dalam menjalankan pengembangan wilayah (Glasson, 1974:86) :

1. Karena adanya berbagai macam keuntungan aglomerasi, teori tersebut cenderung untuk menjadi suatu cara yang sangat efisien untuk menimbulkan perkembangan,
2. Dari segi anggaran belanja, pemusatan investasi pada pusat-pusat pertumbuhan tertentu lebih murah daripada melakukan pemberian bantuan besar-besaran kepada daerah,

3. Efek penjaralan yang ditimbulkan oleh pusat-pusat pertumbuhan akan membantu memecahkan persoalan yang dialami oleh daerah-daerah yang kurang atau tidak berkembang.

GAMBAR 2.1.
KONSEP CORE – PERIPHERY



Sumber : Methuen C. Gore, (1984), *Regions In Questions : Space, Development Theory and Regional Policy*, hal : 39

2.6 Konsep Pembangunan Prasarana Kota

Secara harafiah prasarana kota dapat diartikan sebagai “bangunan bawah” atau struktur pendukung. Pengertian atau pemahaman tentang jaringan prasarana dapat dilihat dari 2 (dua) sudut pandang, yaitu :

1. Dari segi fisik berupa jaringan jalan, drainase, dan lain-lain serta
2. Dari segi pelayanan, yaitu kemampuan jaringan tersebut untuk menjalankan fungsinya.

Jaringan prasarana mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- pengembangannya membutuhkan waktu yang lama dan investasi yang besar atau padat modal,
- mempunyai *economic life* yang panjang dengan biaya operasi dan pemeliharaan yang besar,
- mempunyai kaitan yang erat dengan tata guna tanah kota serta berkaitan antara satu jenis prasarana dengan prasarana lainnya,
- merupakan satu bagian dari suatu sistem yang lebih besar dengan struktur yang tidak terikat pada batas-batas administrasi.

Dalam prakteknya berbagai pihak mempunyai penafsiran yang berbeda tentang apa yang tercakup sebagai prasarana kota. Pada umumnya prasarana kota yang dikenal meliputi jaringan jalan dan terminal dan jaringan utilitas yang mencakup jaringan air bersih, gas, listrik, telepon, drainase dan saluran air limbah. Menurut *National League of Cities* tentang pembiayaan pembangunan prasarana atau infrastruktur ini, istilah utilitas dikaitkan dengan suatu system dimana suatu lembaga tertentu diberi tanggung jawab dan wewenang untuk mengoperasikan dan memelihara suatu komponen jaringan prasarana tertentu.

Jaringan prasarana menjadi penting karena fungsinya yang tidak hanya terbatas kepada pelayanan yang diberikan kepada masyarakat kota, namun juga karena prasarana kota merupakan suatu alat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota dan alat untuk mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan fisik kota. Penyediaan prasarana kota bukan merupakan suatu tujuan akhir melainkan merupakan suatu wahana, suatu wadah masyarakat kota agar dapat melakukan segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya serta dapat meningkatkan produktifitasnya untuk kesejahteraannya maupun untuk peningkatan ekonomi kota.

Pengembangan jaringan prasarana akan mempunyai peranan yang penting didalam proses pembangunan kota karena :

- Pembangunan jaringan prasarana merupakan motor penggerak bagi pembangunan kota yang lebih menyeluruh. Pembangunan kota oleh masyarakat dan swasta sangat tergantung dan terdorong oleh pembangunan/pengembangan jaringan prasarana. Meskipun sudah mulai melibatkan pihak swasta dalam pembangunan prasarana, peranan pemerintah masih sangat dominan, sektor-sektor tertentu sudah mulai/sedang merintis untuk melibatkan swasta karena kekurangan dana,
- Dapat menjadi alat untuk mengendalikan pembangunan kota, investor dan masyarakat seringkali mencari lokasi-lokasi yang memiliki kemudahan-kemudahan sebelum membangun, jaringan jalan menjadi faktor utama yang mempengaruhi keputusan seseorang untuk membangun, jaringan utilitas yang langsung dibutuhkan seperti air, listrik dan sampai batas tertentu telepon merupakan hal-hal yang dapat meningkatkan daya tarik suatu lokasi,

- Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan pembangunan prasarana kota ini adalah konsistensi dengan Rencana yang sudah menjadi Lampiran Peraturan Daerah.

Didalam kaitan antara kebijakan spasial dan kebijakan pembangunan prasarana kota, kebijakan penetapan kota-kota pusat pertumbuhan yang merupakan salah satu kebijakan spasial, menurut Friedmann (1966:97) akan mempunyai implikasi terhadap kebijaksanaan pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah daerah terutama untuk memastikan bagaimana proses penjararan dan pertumbuhan ekonomi dari pusat pertumbuhan ke wilayah pengaruhnya dapat berjalan. Instrumen kebijakan ini menyangkut pembangunan prasarana kota, ekonomi, sosial dan hukum serta kebijakan yang berkaitan dengan kapasitas administratif dan koordinasi antar lembaga pemerintah dalam rangka menjalankan kebijakan spasialnya

2.7 Strategi Pusat Pertumbuhan

Strategi pusat pertumbuhan merupakan pendekatan yang menggabungkan prinsip konsentrasi dan desentralisasi secara bersamaan sehingga dapat dicapai pertumbuhan dan pemerataan secara bersamaan keseluruh pelosok wilayah. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan tersebut berlandaskan pada industri pengolahan sumberdaya alam berskala besar dan bersifat proyek total yaitu kegiatan yang dikembangkan secara utuh dan terintegrasi antara kegiatan utama (industri pengolahan) dengan pembangunan fasilitas pendukung seperti pelabuhan, listrik, air baku dan fasilitas pemukiman.

Menurut Parr (1999:1196-1212) ada 3 (tiga) dasar rasional yang mempengaruhi kinerja pusat pertumbuhan secara keseluruhan, yaitu :

1. Pemusatan prasarana kota pada pusat-pusat pertumbuhan didefinisikan dalam konteks yang luas yang dimaksudkan untuk mendukung tujuan utama ekonomi dan tujuan utama sosial. Dalam konteks belanja publik ada sebuah justifikasi untuk hal tersebut yaitu tipe prasarana yang dibatasi pada fasilitas yang memiliki skala luas. Untuk prasarana transportasi termasuk didalamnya pembangunan baru dan peningkatan jalan dengan fokus pada pusat pertumbuhan yang telah direncanakan, dengan perkataan lain yang menghubungkan antara pusat pertumbuhan dengan daerah-daerah belakangnya, jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi. Prasarana yang berskala luas ini akan menciptakan eksternalitas, hal ini akan membuat daerah menjadi lebih atraktif bagi perusahaan dalam konteks lokasi dan menstimulasi masuknya investasi kedalam pusat pertumbuhan. Untuk melengkapi prasarana tersebut harus didukung oleh kebijakan pembangunan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerahnya,
2. Konsentrasi / aglomerasi aktifitas ekonomi di kota pusat pertumbuhan terutama industri yang memiliki kaitan kedepan (*forward linkage*) dan kaitan kebelakang (*backward linkage*). Hal ini akan dipengaruhi oleh aliran investasi yang masuk langsung kedalam pusat pertumbuhan dan dikaitkan dengan eksploitasi aglomerasi ekonomi. Konsentrasi aktifitas ekonomi ini sangat bergantung pada kelengkapan prasarana kota seperti tersebut dalam poin 1.
3. Daerah dan kutub yang direncanakan, hal ini terutama yang didasarkan pada kebijakan spasial untuk mengembangkan kutub pertumbuhan dengan melihat

aspek keuntungan komparatif daerah, kependudukan dan kinerja ekonomi daerah. Bagaimanapun juga rasionalitas dari strategi pusat pertumbuhan memunculkan dua pola yang berbeda, pertama adalah pertumbuhan pada kutub yang direncanakan akan disebarkan dengan suatu mekanisme yang bervariasi ke daerah belakang, hal yang kedua adalah struktur ruang wilayah akan mengalami suatu perubahan yang radikal, dengan pertumbuhan pada kutub yang direncanakan yang disertai oleh redistribusi utama dari populasi dan pekerja dengan gaji murah (*low-cost labour*) kedalam pusat dan dengan menimbulkan efek ke sektor lainnya yaitu perdagangan dan jasa. Semua itu akan menolong untuk lebih dapat menarik investasi masuk ke dalam pusat pertumbuhan dan meningkatkan kinerja ekonomi wilayahnya.

Ketiga kategori rasional tersebut secara bersamaan dalam implementasinya akan sangat tergantung kepada para pembuat kebijakan. Untuk membangun rasionalitas suatu strategi tidak hanya mendemonstrasikan kelebihan strategi dibandingkan dengan strategi lain. Hal-hal yang termasuk didalam ketiga argumen strategi pusat tersebut adalah pendanaan untuk strategi, ekonomi dan instrumen administratif yang diimplementasikan, keseimbangan antar daerah, eksistensi dari tujuan kedua kebijakan, dan lain-lain.

Menurut Higgins (1988:3) kegagalan dari strategi kutub pertumbuhan bukan merupakan kesalahan dari teori Perroux akan tetapi kesalahan terjadi karena adanya distorsi dari teori Perroux pada saat diaplikasikan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut Richardson (1976:109) berpendapat bahwa penerapan strategi pusat pertumbuhan cenderung untuk maju lebih jauh daripada dasar-dasar teoritiknyanya sendiri, hal ini disebabkan karena adanya beberapa ketidak selarasan dari karya Perroux dengan implementasinya terutama masalah kebijakan yang mendukung proses terjadinya polarisasi dan penyetoran,

pemilihan lokasi yang buruk, serta kurangnya pemahaman dalam merencanakan instrumen kebijakan yang tepat.

Didalam konteks pertumbuhan ekonomi wilayah menurut Miyoshi (1997:15), pada dasarnya strategi ditetapkan untuk membangun wilayah hampir sejalan dengan strategi untuk pertumbuhan ekonomi nasional dengan dua titik kritis untuk membangun dengan murni tujuan ekonomi atau tujuan egalitarian (persamaan bagi semua masyarakat). Jika strategi cenderung untuk mengejar tujuan egalitarian untuk semua masyarakat dalam wilayah, suatu investasi yang dikonsentrasikan pada kutub pertumbuhan akan membawa kepada hasil yang sebaliknya. Walaupun dengan konstruksi dari sistem transportasi menghubungkan kutub pertumbuhan dengan daerah-daerah belakangnya, hal tersebut cenderung akan membangkitkan migrasi dari desa ke kota dari pada menciptakan spread effect dari populasi.

Menurut Myrdal (1957:34) bahwa perencanaan pembangunan harus difokuskan pada peningkatan pendidikan, transportasi dan komunikasi terutama di daerah yang terdepresi. Dalam pandangannya kutub pertumbuhan adalah bukan merupakan suatu alat untuk menolong kebijakan yang egalitarian akan tetapi disebabkan oleh ketimpangan wilayah yang harus diperbaiki dengan kebijakan pembangunan yang layak.

2.8 Prasyarat Strategi Pusat Pertumbuhan

Strategi pusat pertumbuhan adalah merupakan salah satu model pengembangan wilayah yang memiliki tujuan tertentu. Dari kajian literatur yang telah diuraikan diatas dapat diketahui bahwa ada 2 (dua) pendekatan tujuan dalam strategi pusat pertumbuhan (Miyoshi; 1997:15), yaitu:

1. Pendekatan pertumbuhan ekonomi,
2. Pendekatan egalitarian bagi seluruh masyarakat,

Dalam pandangan Myrdal kutub pertumbuhan adalah bukan merupakan suatu alat untuk menolong kebijakan yang egalitarian akan tetapi disebabkan oleh ketimpangan wilayah yang harus diperbaiki dengan kebijakan pembangunan yang layak.

Kelengkapan prasarana kota yang dimiliki oleh suatu kota akan membuat kota tersebut lebih berkembang, dengan lengkapnya prasarana kota yang dimiliki oleh suatu kota, tingkat kelengkapan prasarana ini juga merupakan salah satu alat untuk meningkatkan perekonomian. Peningkatan perekonomian terjadi karena adanya arus investasi yang masuk dengan ditandai oleh berkembangnya industri yang mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja. Karena tenaga kerja ini selain berasal dari dalam kota itu sendiri juga kebanyakan berasal dari luar daerah, maka arus migrasi akan masuk ke kota yang bersangkutan, secara teoritis faktor penduduk ini turut menentukan berkembangnya suatu kota.

Investasi di bidang industri ini juga menimbulkan *multiplier effect* ke sektor-sektor lain misalnya perdagangan dan jasa sehingga aktifitas perekonomian di kota tersebut akan meningkat dan pada gilirannya akan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi kota yang bersangkutan. Namun kemampuan suatu industri untuk menyebarkan pertumbuhan tersebut tergantung pada *Multiplier Effect* yang berhubungan dengan faktor-faktor input-output antar industri, misalnya multiplier effect dari tenaga kerja dan output pendapatan. Akan tetapi, kutub pertumbuhan tidaklah hanya merupakan lokalisasi dari industri-industri inti, kutub pertumbuhan harus juga mendorong ekspansi yang besar ke daerah sekitarnya dan karena efek polarisasi strategik lebih menentukan daripada keterkaitan antar industri. Prasarana yang sudah sangat berkembang, penyediaan pelayanan-pelayanan sentral,

permintaan terhadap faktor-faktor produksi dari daerah belakangnya (hinterland) yang kesemuanya ini adalah penting untuk mendorong polarisasi (Richardson; 1971:69).

Jadi terlihat disini bahwa ada keterkaitan yang erat antara tingkat kelengkapan prasarana suatu kota dengan pertumbuhan ekonominya yang ditandai dengan adanya arus investasi yang masuk dan kegiatan perekonomian yang ada di dalam kota tersebut terutama sektor industri yang mampu menyerap banyak tenaga kerja serta perdagangan dan jasa. Kota pusat pertumbuhan dalam konteks pengembangan wilayah ditetapkan dalam rangka untuk dapat menggerakkan pertumbuhan perekonomian daerah agar lebih meningkat melalui fungsinya sebagai lokomotif penggerak perekonomian wilayah melalui konsep-konsep yang ada di dalam strategi pusat pertumbuhan.

Hal tersebut di atas tidak akan tercapai apabila tingkat kelengkapan prasarana kota yang dimiliki oleh kota-kota pusat pertumbuhan tersebut sangat kurang sehingga fungsi prasarana kota sebagai stimulan masuknya investasi tidak optimal. Kapasitas terpasang prasarana kota di kota-kota pusat pertumbuhan akan sangat dipengaruhi oleh kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah terutama yang berkaitan dengan pembangunan prasarana kota di kota-kota tersebut. Hal inilah yang berdasarkan kajian pustaka, menjadi penentu efektif atau tidaknya strategi pusat pertumbuhan yang diterapkan.

Dilain pihak kelengkapan prasarana kota yang dimiliki oleh suatu kota akan turut menentukan tingkat pelayanan kota tersebut yang nantinya akan membentuk suatu sistem kota-kota. Menurut Berry (1967:72) sistem kota-kota ini berfungsi untuk menjalankan pertumbuhan dan perkembangan dari core area, kota yang ordenya lebih tinggi yang ditandai oleh paling lengkapnya prasarana kota yang dimiliki, ke wilayah belakangnya melalui pertukaran penduduk, barang dan jasa serta inovasi yang ada di dalamnya.

2.9 Kesimpulan

Dari kajian yang dilakukan terhadap teori-teori yang mendukung konsep sistem pusat pertumbuhan dapat disimpulkan bahwa :

1. Kebijakan spasial melalui strategi pusat pertumbuhan agar dapat optimal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menurut Parr (1999:1261) harus didukung oleh kebijakan pembangunannya terutama pembangunan prasarana kota,
2. Kebijakan pembangunan prasarana kota yang diambil sedapat mungkin mempunyai dampak mengkonsentrasikan pembangunan prasarana kota tersebut di kota-kota pusat pertumbuhan, hal ini dimaksudkan untuk menstimulasi masuknya investasi terutama sektor industri ke dalam kota-kota pusat pertumbuhan. Prasarana kota tersebut terutama jaringan jalan yang menghubungkan pusat dengan daerah belakang, jaringan listrik, jaringan dan telekomunikasi,
3. Investasi di bidang industri ini akan menimbulkan efek pengganda ke sektor-sektor lain misalnya perdagangan dan jasa sehingga aktifitas perekonomian di kota tersebut akan meningkat dan pada gilirannya akan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi kota yang bersangkutan. Namun kemampuan suatu industri untuk menyebarkan pertumbuhan tersebut juga bergantung pada prasarana kotanya, penyediaan pelayanan-pelayanan sentral, permintaan terhadap faktor-faktor produksi dari daerah belakangnya yang kesemuanya ini adalah penting untuk mendorong polarisasi (Richardson; 1971:69).

BAB III

METODA PENELITIAN

3.1 Metoda Penelitian Kualitatif

Dalam suatu penelitian, apakah dinyatakan secara eksplisit atau tidak, biasanya orientasi teoritis tertentu mengarahkan pelaksanaan penelitian itu dan orientasi teoritis tersebut dimanfaatkan dalam pengumpulan dan analisis data, teori membantu menghubungkannya dengan data, metoda penelitian yang sering digunakan adalah metoda penelitian kuantitatif dan kualitatif yang keduanya memiliki perbedaan satu sama lain terutama dalam cara masing-masing dalam memperlakukan data (Brannen; 1999:10). Perbedaan diantara keduanya bertitik tolak dari filosofi pola pemikiran penelitian (Denzin; 1994:43). Penelitian kuantitatif biasanya lebih menekankan pada cara berpikir positivistik yang bertitik tolak dari fakta di lapangan yang ditarik dari realitas obyektif disamping asumsi teoritis lainnya (empiris). Karakteristik pemikiran positivistik (Brannen; 1999:5) dapat digambarkan sebagai berikut :

- Alam adalah sesuatu yang jelas dan nyata, dapat dijelaskan melalui tangkapan alat-alat inderawi,
- Positivistik biasanya membutuhkan ukuran-ukuran yang jelas dan nyata. Ukuran yang jelas ini dibutuhkan untuk menjelaskan hasil suatu eksperimen, sehingga dapat diperbandingkan dengan yang lain,
- Penganut aliran positivistik tidak akan menerima suatu pemikiran yang meskipun secara logika telah dapat diterima (rasional) tanpa terbukti melalui suatu eksperimen.

Akibat dari hal tersebut, maka seorang peneliti kuantitatif akan mempunyai pola berpikir bahwa penelitian harus dilakukan dengan menggunakan ukuran-ukuran yang nyata dan jelas. Pada penelitian kuantitatif peneliti menyisihkan dan menentukan ubahan-ubahan (variabel) dan kategori-kategori ubahan. Ubahan-ubahan ini secara bersama-sama terkait dengan bingkai hipotesis yang seringkali ada sebelum data dikumpulkan dan kemudian diujikan (diukur) terhadap data dan ubahan atau variabel ini sebagai sarana atau alat analisis. Dalam hal pengamatan, peneliti kuantitatif melakukan pengamatan melalui “lensa” yang sempit pada serangkaian variabel yang ditentukan. Sedangkan metoda penelitian kualitatif menurut bertitik tolak pada cara berpikir fenomenologis yang obyektifitasnya dibangun atas rumusan tentang fenomena tertentu dan relevan dengan tujuan dari penelitian itu sendiri yang mencari sebab akibat sesuatu hal. Karakteristik dari cara berpikir fenomenologis (Brannen; 1999:6) diantaranya adalah :

- Berdasarkan gejala (fenomena) awal yang dapat ditangkap oleh alat inderawi dan akal (rasio) manusia,
- Gejala atau fenomena tersebut merupakan arahan utama untuk menuju kepada arahan penelitian, dengan menangkap gejala tersebut, maka dapat dilakukan analisis-analisis selanjutnya,
- Bahwa aliran atau faham pemikiran yang lain, dianggap sebagai “alat” untuk menterjemahkan kajian terhadap fenomena atau gejala yang berhasil ditangkap tersebut,

Pengaruh dari fenomenologis terhadap pola berpikir peneliti kualitatif adalah bahwa penelitian terfokus pada fenomena yang muncul dan dibatasi oleh suatu wacana yang berhasil dimunculkan.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti mulai dengan mendefinisikan konsep-konsep yang sangat umum dan dianggap melakukan pengamatan melalui “lensa” yang lebar, mencari pola-pola antar hubungan antara konsep-konsep yang sebelumnya tidak ditentukan. Peneliti dalam pandangan fenomenologis berusaha memahami arti suatu peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap situasi-situasi tertentu, pemikiran fenomenologis pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh filsuf Edmund Husserl, Alfred Schultz dan Max Weber yang memberikan penekanan pada *verstehen* (*understanding*) untuk menangkap makna dari sudut pandang pelaku yang menghayati kejadian tersebut melalui pengamatan. Peneliti yang bersifat partisipatif dimana dalam penelitian kualitatif peneliti harus menggunakan dirinya sendiri sebagai instrumen, mengikuti asumsi-asumsi kultural sekaligus mengikuti data, peneliti diharapkan fleksibel dan reflektif tetapi tetap mengambil jarak (Mc Cracken; 1988:72). Metoda penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor (1975:105) adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati yang diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh).

Paradigma penelitian kualitatif adalah *Naturalistic Inquiry* (pen-cari tahu-an secara alamiah) yang lebih menekankan pada ke-alamiah-an sumber data. Pada *naturalistic inquiry* peneliti tidak diwajibkan untuk terlebih dahulu teori dibatasi pada pengertian : suatu pernyataan sistematis yang berkaitan dengan seperangkat preposisi yang berasal dari data dan diuji kembali secara empiris dan membawa peneliti untuk memasuki dan melibatkan dirinya dalam obyek (observasi partisipatoris) serta membuat dirinya sebagai instrumen (alat) untuk menganalisis. Analisis yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah induksi analitik yang terkait secara khas dengan konsep dan kategori bukan

kejadian atau frekuensinya dengan perkataan lain penelitian kualitatif bukan meneliti suatu lahan kosong akan tetapi menggalinya (Mc Cracken; 1988:51). Dengan menggunakan analisis seperti ini pencarian data bukan dimaksudkan untuk membuktikan hipotesis yang telah dirumuskan sebelum penelitian seperti halnya penelitian kuantitatif, akan tetapi lebih merupakan pembentukan abstraksi berdasarkan bagian-bagian yang telah dikumpulkan, berbeda dengan penelitian kuantitatif yang menggunakan paradigma *Scientific Paradigm* (paradigma ilmiah), pada paradigma ilmiah ini peneliti mencari fakta dan penyebab suatu fenomena berdasarkan ubahan-ubahan (*variabel*) yang dapat diukur. Jadi dengan perkataan lain pada metoda penelitian kuantitatif variabel adalah sarana atau alat untuk menganalisis sedangkan pada metoda penelitian kualitatif variabel dapat merupakan produk atau hasil.

Berdasarkan uraian di atas, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata (naratif), gambar dan bukan angka-angka, dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, *video tape*, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya. Pada penulisan laporan demikian peneliti menganalisis data yang sangat kaya tersebut dan sejauh mungkin dalam bentuk aslinya. Pertanyaan dengan kata tanya “mengapa”, “alasan apa” dan “bagaimana” akan senantiasa dimanfaatkan oleh peneliti, dengan demikian peneliti tidak akan memandang bahwa sesuatu itu sudah memang demikian adanya.

Untuk mengumpulkan data penelitian kuantitatif memanfaatkan tes tertulis (tes-pinsil-kertas) atau kuesioner atau menggunakan alat fisik lainnya, sedangkan peneliti kualitatif dalam pengumpulan datanya banyak bergantung pada *dirinya sebagai alat pengumpulan data*. Hal itu mungkin disebabkan oleh sulitnya mengkhususkan secara tepat

apa yang akan diteliti, disamping itu orang sebagai instrumen memiliki senjata “dapat memutuskan” yang secara luwes dapat digunakannya, ia senantiasa dapat menilai keadaan dan dapat mengambil keputusan, pada dasarnya penelitian kuantitatif dan kualitatif dapat digunakan secara bersama-sama apabila desain penelitiannya adalah memanfaatkan satu paradigma sedangkan paradigma yang lainnya hanya sebagai pelengkap.

3.2 Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Menganalisis Kebijakan Pembangunan Prasarana Kota Dalam Menunjang Kinerja Pusat Pertumbuhan di Kabupaten Cirebon

Berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti di Kabupaten Cirebon yang menyangkut fenomena yang ada, yaitu laju pertumbuhan ekonomi dan perkembangan kota-kota yang konstan meskipun telah diterapkan strategi pusat pertumbuhan serta pertanyaan penelitian efektifkah kebijakan pembangunan prasarana kota yang telah dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam mendukung kinerja pusat pertumbuhan ?. Teori yang dikemukakan oleh Parr (1999:1260) menyatakan bahwa salah satu elemen yang dapat meningkatkan pembangunan ekonomi serta untuk menstimulasi masuknya investasi didalam konsep pusat pertumbuhan ini adalah kebijakan pembangunan dari pemerintah daerah dalam upaya melengkapi dan membangun infrastrukturnya dikonsentrasikan di kota-kota yang ditetapkan menjadi pusat pertumbuhan. Untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dikemukakan, dalam penelitian ini dilakukan analisis dengan cara mengevaluasi kebijakan pembangunan prasarana kota yang telah dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Menurut Suchman (1967) dalam Nazir (1988:91) definisi penelitian evaluatif sebagai penentu (*apakah berdasarkan opini, catatan, data subyektif atau obyektif*) hasil (*apakah baik atau tidak baik, sementara atau permanen, segera ataupun ditunda*) yang diperoleh dengan beberapa kegiatan (*suatu program, sebagian dari program dan sebagainya*) yang dibuat untuk memperoleh suatu tujuan tentang suatu performance yang berorientasi pada kualitas dan kuantitas kegiatan

Dikaitkan dengan fenomena pertumbuhan ekonomi dan perkembangan kota-kota yang terjadi, peneliti berusaha memahami arti peristiwa serta sebab akibat yang melatarbelakanginya dengan mengevaluasi program-program pembangunan prasarana kota, maka metoda penelitian yang lebih tepat adalah dengan menggunakan metoda penelitian kualitatif. Argumentasi mengapa metoda penelitian kualitatif yang lebih tepat dibandingkan metoda penelitian kuantitatif adalah :

1. Bahwa dalam penelitian ini ingin “menggali” penyebab terjadinya mengapa laju pertumbuhan ekonomi dan perkembangan kota-kota di Kabupaten Cirebon relatif konstan dengan melihat aspek kebijakan pembangunan prasarana kotanya dikaitkan dengan teori yang ada.
2. Apabila didasarkan pada data yang dianalisis, bahwa yang akan dianalisis/dievaluasi adalah berupa kebijakan pembangunan prasarana kota yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon dimana dalam kebijakan ini konsep dan pemikiran yang tentunya didasarkan pada kondisi dan kemampuan daerah setempat serta data hasil wawancara yang sifatnya juga naratif, kedua hal tersebut merupakan variabel dan data yang tidak bisa diukur, hal ini tentunya tidak tepat apabila menggunakan metoda penelitian kuantitatif

dimana variabel yang digunakan harus dapat diukur, untuk itu dalam penelitian ini digunakan kriteria yang sifatnya kualitatif.

3.3 Kerangka Analisis

Pelaksanaan analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan 3 (tiga) pendekatan. Pendekatan *pertama* penelitian dilakukan dengan menganalisis kebijakan pembangunan prasarana kota melalui program-program dan proyek-proyek pembangunan prasarana kota yang telah dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon terutama yang berkaitan dengan kota-kota pusat pertumbuhan dalam kurun waktu 1992-2000. Sasaran yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui apakah konsep kebijakan pembangunan prasarana kota yang telah ditetapkan mempunyai dampak terhadap pengkonsentrasian pembangunan prasarana kota di kota-kota pusat pertumbuhan dan mampu untuk menarik investasi sebagai upaya mendukung kinerja pusat pertumbuhan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pendekatan *kedua* diarahkan pada menganalisis efektifitas pembangunan prasarana kota tersebut dalam menarik investasi terutama sektor industri, dengan melihat kemampuan masing-masing kota di wilayah Kabupaten Cirebon untuk menarik investasi dengan prasarana kota yang dimiliki serta. Sasaran yang hendak dicapai adalah untuk melihat efektifitas pembangunan prasarana kota yang telah dilaksanakan dalam menarik investasi sebagai pra-kondisi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pendekatan *ketiga* adalah menganalisis seberapa besar pengaruh pembangunan prasarana kota terhadap laju pertumbuhan ekonominya. Sasaran yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang kuat atau tidak antara pembangunan prasarana kota dengan laju pertumbuhan ekonomi, secara teoritis pertumbuhan ekonomi

akan meningkat apabila adanya investasi yang masuk terutama sektor industri ke dalam suatu wilayah dan investasi akan tertarik untuk masuk apabila dalam wilayah tersebut tingkat kelengkapan prasarana kotanya sudah sangat lengkap.

Program pembangunan merupakan arahan yang akan dijalankan dalam upaya merealisasikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan yang telah digariskan dalam kebijakan yang telah ditetapkan. Dengan berdasarkan pada konsep tersebut, maka program pembangunan prasarana kota merupakan aspek yang sangat berperan dalam mendukung kinerja pusat pertumbuhan yang ada di Kabupaten Cirebon terutama apabila dikonsentrasikan di kota-kota pusat pertumbuhan. Program pembangunan prasarana kota merupakan penjabaran dari kebijakan pembangunan prasarana kota. Selain itu secara teoritis prasarana kota yang dimiliki oleh suatu kota dapat membuat kota tersebut menjadi atraktif untuk masuknya investasi terutama sektor industri, oleh sebab itu pengkonsentrasian pembangunan prasarana kota di kota-kota pusat pertumbuhan akan menjadikan kota-kota tersebut dapat lebih menarik untuk berinvestasi. Investasi sektor industri yang masuk akan menimbulkan efek pengganda ke sektor lain dan pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Untuk melakukan analisis dibutuhkan adanya suatu kriteria (tolak ukur), kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penerapan sesuatu, untuk itu perlu ditetapkan terlebih dahulu kriteria yang akan digunakan. Karena kriteria menunjukkan definisi masalah dalam bentuk yang konkrit, maka kriteria tersebut dianggap sebagai sasaran yang ingin dicapai, kriteria ini dapat bersifat kuantitatif atau bersifat kualitatif. Adapun kriteria-kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Analisis Kebijakan Pembangunan Prasarana Kota

Untuk menganalisis kebijakan pembangunan prasarana kota, kriteria yang digunakan adalah kriteria kualitatif yaitu kriteria efektifitas (*effectiveness criteria*), pertanyaan utama yang mendasarinya adalah apakah muatan/isi (*content*) dari program pembangunan prasarana kota mempunyai dampak terhadap pencapaian tujuan yaitu pengkonsentrasian pembangunan prasarana kota di kota-kota pusat pertumbuhan ?.

Program pembangunan prasarana kota dapat dikatakan efektif apabila pembangunan prasarana kota sudah dikonsentrasikan di kota-kota pusat pertumbuhan dan kota-kota pusat pertumbuhan yang ada mampu untuk menarik investasi dengan prasarana kota yang dimilikinya, untuk melihat terkonsentrasi atau tidaknya dilakukan dengan melihat persentase jumlah proyek dan jumlah dana yang dialokasikan tiap tahunnya ke kota-kota pusat pertumbuhan, jika persentase jumlah proyek yang dialokasikan untuk pembangunan prasarana di kota-kota pusat pertumbuhan $> 50 \%$, maka dapat dikatakan pembangunan prasarana kota telah terkonsentrasi di kota pusat pertumbuhan. Besaran tersebut diambil didasarkan pada pemikiran bahwa apabila dana yang dialokasikan untuk pembangunan prasarana kota di kota-kota pusat pertumbuhan masih sama besar dengan jumlah dana pembangunan prasarana kota yang dialokasikan untuk keseluruhan kota yang ada, hal ini berdasarkan pada definisi operasional tentang pengkonsentrasian pembangunan prasarana kota. Untuk melihat kemampuan kota-kota pusat pertumbuhan dalam menarik investasi dilakukan dengan pendekatan kedua, yaitu

2. Analisis Efektifitas Pembangunan Prasarana Kota Dalam Menarik Investasi

Untuk menganalisis efektifitas pembangunan prasarana kota dalam menarik investasi kriteria yang digunakan adalah kriteria kuantitatif, di mana kota termasuk kota-kota pusat pertumbuhan dapat dikatakan efektif apabila dengan dana dan jumlah proyek pembangunan prasarana yang sedikit, namun kota yang bersangkutan mampu untuk menarik masuknya investasi, analisisnya dilakukan dengan menggunakan rasio dana pembangunan prasarana dengan rasio nilai investasi yang masuk untuk semua kota. Kota dikatakan efektif apabila memenuhi kriteria rasio dana pembangunan prasarananya < 1 dan rasio nilai investasinya > 1 , untuk interpretasi digunakan diagram kartesian yang sederhana.

3. Analisis Pengaruh pembangunan Prasarana Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi

Untuk menganalisis pengaruh pembangunan prasarana kota terhadap laju pertumbuhan ekonomi kriteria yang digunakan adalah kriteria kuantitatif untuk melihat tingkat/derajat hubungan antara pembangunan prasarana kota (variabel bebas) dengan laju pertumbuhan ekonomi (variabel terikat). Secara teoritis pertumbuhan ekonomi akan meningkat apabila ada investasi yang masuk ke dalam wilayah terutama sektor industri, dengan perkataan lain investasi yang masuk merupakan pra-kondisi bagi pertumbuhan ekonomi. Derajat hubungan antara pembangunan prasarana kota dengan laju pertumbuhan ekonomi di cari dengan menggunakan koefisien korelasi r (rho). Kriteria yang digunakan dapat diuraikan dalam tabel berikut :

TABEL III.1.
TABEL KRITERIA TINGKAT HUBUNGAN VARIABEL

Besarnya Nilai r	Interpretasi
Antara 0.800 sampai dengan 1.000	Tinggi
Antara 0.600 sampai dengan 0.800	Cukup
Antara 0.400 sampai dengan 0.600	Agak Rendah
Antara 0.200 sampai dengan 0.400	Rendah
Antara 0.000 sampai dengan 0.200	Sangat Rendah (Tidak berkorelasi)

Sumber : Arikunto, Suharsimi., (1993), Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta, hal 223.

Apabila diperoleh angka positif artinya mempunyai korelasi positif (variabel terikat dipengaruhi oleh variabel bebas, laju pertumbuhan ekonomi dipengaruhi tingkat kelengkapan prasarana kota), akan tetapi bila diperoleh tanda negatif artinya korelasinya negatif, hal ini menunjukkan hubungan yang berlawanan arah, nilai r tidak pernah lebih dari 1. Perhitungan menggunakan uji Pearson yang dilakukan dengan bantuan software SPSS (*Statistical Product and Service Solution*)

TABEL III.2
KERANGKA ANALISIS

Aspek Yang Dianalisis	Pertanyaan Utama	Cara Menganalisis
1. Kebijakan Pembangunan Prasarana Kota	Apakah konsep dan isi dari program-program pembangunan prasarana kota sebagai penjabaran dari kebijakan pembangunan prasarana kota memiliki dampak terhadap pengkonsentrasian pembangunan prasarana kota di kota-kota pusat pertumbuhan serta untuk menarik investasi ?	Kualitatif dengan menggunakan Content Analysis (analisis muatan) dengan menganalisis isi dan konsep dari program-program pembangunan prasarana kota serta menganalisis implementasinya dengan melihat jumlah dana dan lokasi proyek-proyek.

<u>Lanjutan :</u>		
2. Pengaruh Pembangunan Prasarana Kota Terhadap Masuknya Investasi	Efektifkah pembangunan prasarana kota dalam menarik investasi di Kabupaten Cirebon ?	Statistik Deskriptif, dengan membandingkan antara rasio jumlah dana pembangunan prasarana kota yang dialokasikan di masing-masing kota dengan rasio nilai investasi yang masuk ke daerah masing-masing
3. Pengaruh Pembangunan Prasarana Kota Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi	Seberapa besar pengaruh pembangunan prasarana kota di terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cirebon ?	Statistik Deskriptif, dengan menguji derajat hubungan antara pembangunan prasarana kota dengan laju pertumbuhan ekonomin.

Sumber : Hasil Analisis

▪ Definisi Operasional

1. Kebijakan Pembangunan adalah arahan yang digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan.
2. Program pembangunan adalah penjabaran dari kebijakan pembangunan yang merupakan arahan bagi kegiatan-kegiatan (proyek) dalam kerangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pembangunan.
3. Prasarana kota adalah piranti pelayanan kota yang dapat mendukung fungsi pelayanan kota yang bersangkutan yang terdiri dari jaringan jalan yang menghubungkan pusat pertumbuhan dengan daerah belakangnya, jaringan listrik, prasarana air bersih, jaringan telekomunikasi, drainase, air limbah dan persampahan.
4. Terkonsentrasi di kota pusat pertumbuhan adalah suatu keadaan yang timbul dalam wilayah Kabupaten Cirebon setelah dilaksanakannya program dimana perbandingan

dana yang dialokasikan untuk pembangunan prasarana kota lebih banyak dilakukan di kota pusat pertumbuhan daripada yang dialokasikan untuk seluruh kota.

5. Efektifitas adalah suatu tingkatan pencapaian sasaran yang sesuai antara kebijakan pembangunan prasarana kota dengan implementasinya, dimana tingkat pencapaian sasaran menunjukkan tingkat keefektifan yang dicapai.
6. Kebijakan Spasial adalah hasil yang didapat dari suatu proses perencanaan yang diarahkan untuk penataan ruang dengan maksud memanfaatkan dan mengendalikan ruang dalam upaya memecahkan suatu permasalahan dalam suatu kota atau wilayah.

3.4 Metoda Analisis

Pada pendekatan penelitian yang *pertama* metoda analisis yang digunakan adalah metoda analisis kualitatif deskriptif, hal tersebut didasarkan pada bentuk datanya baik yang berasal dari produk kebijakan maupun dari hasil wawancara yang berupa naratif dan mempunyai konsep yang termuat didalamnya. Untuk pendekatan kedua metoda analisis yang digunakan adalah metoda analisis kuantitatif deskriptif dengan menggunakan data sekunder yang berupa besarnya dana dan lokasi proyek-proyek pembangunan prasarana kota yang kemudian dideskripsikan dan diinterpretasikan.

Analisis dilakukan dengan menggunakan Analisis Muatan (*Content Analysis*) yang dilakukan untuk mengungkapkan isi (muatan) dari produk perencanaan yang berupa program-program pembangunan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon. Dalam analisis ini peneliti menganalisis munculnya suatu konsep tertentu, kelemahan-kelemahan pola berpikir maupun kemampuan program dalam mencapai tujuannya (Nawawi; 1995:52). Pada dasarnya analisis muatan adalah suatu cara untuk

mengkaji dan menganalisis muatan daripada teks yang mengacu pada kata-kata, arti, gambar, simbol, ide, konsep, tema atau pesan apapun yang dapat dikomunikasikan.

Dengan berdasarkan kriteria yang telah diuraikan di atas kemudian dilakukan analisis terhadap muatan (isi) dari program-program pembangunan yang telah dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon, serta mengevaluasi dampaknya terhadap proyek-proyek pembangunan apakah muatan (isi) dari program-program tersebut telah memenuhi kriteria atau dalam perkembangan penelitian nanti akan muncul temuan baru. Adapun tahapannya adalah sebagai berikut :

- Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian kepada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang didapat dari lapangan, pada tahap ini dilakukan pemilihan terhadap program-program pembangunan pada kurun waktu 1992-2000. Program-program yang mempunyai muatan terhadap pembangunan prasarana kota di kota-kota pusat pertumbuhan dipisahkan dan dianalisis, pemisahan dilakukan dengan melihat sasaran lokasi dari program tersebut yang menyangkut kalimat kota strategis dan atau kota pusat pertumbuhan serta yang memiliki arah dan tujuan mendukung kota-kota pusat pertumbuhan. Setelah itu di gabungkan dengan data proyek-proyek pembangunan prasarana kota pusat pertumbuhan di APBD II. Sebagai dasar adalah program dan proyek pembangunan prasarana kota seperti jalan yang menghubungkan antara kota pusat pertumbuhan dengan daerah-daerah belakangnya, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, drainase, air limbah dan persampahan.

- Penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, pada tahap ini data yang didapat dari hasil reduksi terutama data yang menyangkut kota strategis dan atau kota pusat pertumbuhan, disusun berdasarkan tahun anggaran dan tahun produk perencanaan dikeluarkan.serta dilengkapi dengan statistik ' sederhana untuk membantu melakukan interpretasi.
- Menarik kesimpulan yang dapat diartikan sebagai verifikasi terhadap data selama penelitian berlangsung, kesimpulan ini didapat dengan berdasarkan hasil interpretasi terhadap program-program pembangunan prasarana kota, interpretasi dilakukan dengan melihat konsep dan muatan yang ada kaitannya dengan pembangunan prasarana kota di kota-kota pusat pertumbuhan dan melihat upaya pengkonsentrasian pembangunan prasarana kota di kota-kota pusat pertumbuhan tersebut,
- Menganalisis implementasi dari program tersebut dengan melihat proyek-proyek yang dilaksanakan baik jumlah dana maupun lokasi dari proyek-proyek tersebut.

Program tersebut dikatakan efektif apabila muatan dari programnya mempunyai dampak terhadap pengkonsentrasian pembangunan prasarana kota di kota-kota pusat pertumbuhan serta kota-kota pusat pertumbuhan mampu menarik investasi. Untuk melihat implementasinya dilakukan dengan melihat jumlah dana dan lokasi proyek-proyek pembangunan prasarana kota yang dilaksanakan, apabila jumlah dana yang dialokasikan di kota-kota pusat pertumbuhan $> 50 \%$, maka program tersebut dapat dikatakan efektif. Untuk mengurangi bias dan subyektifitas dalam melakukan analisis dan evaluasi dari inti

permasalahan yang akan dibahas maka analisis dikaitkan dengan teori yang mendukung serta temuan dari hasil wawancara dan observasi.

Pada pendekatan *kedua* dilakukan analisis untuk melihat pengaruh pembangunan prasarana kota terhadap masuknya investasi, karena datanya berupa data-data statistik dalam bentuk numerik (angka), maka analisis yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dengan cara menginterpretasikan dan menganalisis data-data dana pembangunan prasarana kota dengan data investasi melalui bantuan grafik kartesian yang sederhana. Analisis yang dilakukan adalah dengan cara membandingkan rasio jumlah dana pembangunan prasarana kota terhadap rasio nilai investasi yang masuk. Interpretasi dan deskripsi dilakukan dengan bantuan grafik kartesian yang sederhana. Kota termasuk kota-kota pusat pertumbuhan dapat dikatakan efektif apabila dengan dana dan jumlah proyek pembangunan prasarana yang sedikit, namun kota yang bersangkutan mampu untuk menarik masuknya investasi, hal ini dilihat dengan menggunakan rasio dana pembangunan prasarana dengan rasio nilai investasi yang masuk untuk semua kota. Kota dikatakan efisien jika rasio dana pembangunan prasarananya < 1 dan rasio nilai investasinya > 1 .

Pada pendekatan *ketiga* menganalisis pengaruh pembangunan prasarana kota terhadap laju pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan menggunakan analisis statistik deskriptif dengan melihat derajat hubungan antara pembangunan prasarana kota dengan laju pertumbuhan ekonomi, interpretasi dilakukan dengan bantuan Tabel III.1.

3.5 Kebutuhan dan Teknik Pengumpulan Data

Dengan mengacu pada metoda kerangka analisis yang dipakai, kebutuhan data untuk studi ini dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :

1. Data kebijakan pembangunan Kabupaten Cirebon yang berupa Pola Dasar Pembangunan Daerah dalam kurun waktu 1989/1990–1994/1995 sampai dengan 1994/1995–1998/1999, Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada),
2. Data besarnya dana dan lokasi proyek pembangunan prasarana kota yang diperoleh dari buku APBD Kabupaten Cirebon mulai tahun anggaran 1991/1992 sampai dengan tahun anggaran 2000,
3. Data Statistik yang berupa PDRB Kabupaten/Kecamatan serta Kabupaten Dalam Angka data terakhir tahun 1999

Untuk lebih jelasnya kebutuhan data pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel III.3.

TABEL III.3.
KEBUTUHAN DAN SUMBER DATA

No	Kebutuhan Data				Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
	Nama Data	Time Series	Unit Data			
1	Repetada,	1994 – 1999	Kabupaten		Pemkab Cirebon,	Kunjungan Instansional
2	APBD,	1992 – 2000	Kabupaten		Pemkab Cirebon,	Kunjungan Instansional
3	PDRB Kecamatan	1993 - 1999	Kecamatan		Pemkab Cirebon,	Kunjungan Instansional
4	PDRB Kabupaten	1993 – 1999	Kabupaten		Pemkab Cirebon	Kunjungan Instansional
5	RUTRD Kab. Cirebon,	1991 – 2011	Kabupaten		Pemkab Cirebon,	Kunjungan Instansional
6	Hasil wawancara (catatan, rekaman)	-	Kabupaten		Pemkab Cirebon,	Kunjungan Instansional
		-	-		Masyarakat dan atau LSM, sektor swasta,	Wawancara
7	Hasil observasi (jalan, jaringan air bersih, telekomunikasi dan jaringan listrik)	-	-		Lapangan	Observasi Lapangan

Sumber : Hasil Analisis

Pada studi ini data yang digunakan diperoleh dari hasil studi literatur yang berupa data sekunder yang bersumber dari dinas/instansi/lembaga yang berada di bawah pemerintah Kabupaten Cirebon serta instansi lain yang terkait. Observasi dan wawancara dilakukan untuk melengkapi analisis dengan data faktual lapangan yang menyangkut kondisi eksisting kota-kota di wilayah Kabupaten Cirebon. Wawancara dilakukan secara informal untuk memperoleh data secara akurat dan riil tanpa ada rekayasa. Responden dari wawancara ini adalah semua stakeholders perencanaan program pembangunan di Kabupaten Cirebon yang meliputi Pemerintah Daerah, dan anggota masyarakat itu sendiri serta sektor swasta (industri). Adapun garis besar materi dari pertanyaan yang akan diajukan dapat dilihat pada lampiran 4.

BAB IV

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

4.1 Tinjauan Aspek Fisik dan Keruangan

4.1.1 Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Cirebon secara geografis merupakan wilayah yang cukup strategis karena merupakan batas sekaligus pintu gerbang bagi Propinsi Jawa Barat dari arah timur (Jawa Tengah). Luas wilayah administrasi Kabupaten Cirebon adalah $\pm 990,36 \text{ Km}^2$. Jarak terjauh arah Barat – Timur adalah 54 Km, sedangkan arah Utara Selatan adalah 39 Km. Wilayah-wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Cirebon adalah wilayah Kabupaten Indramayu, wilayah Kabupaten Majalengka, wilayah Kabupaten Kuningan, dan wilayah Kabupaten Brebes (Jawa Tengah) Posisi geografis Kabupaten Cirebon berada diantara $108^{\circ}40' - 108^{\circ}48'$ Bujur Timur dan $6^{\circ}30' - 7^{\circ}00'$ Lintang Selatan.

Dilihat dari topografi tanahnya wilayah Kabupaten Cirebon terbagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu :

1. Daerah dataran rendah, umumnya terletak di sepanjang Pantai Utara Jawa yang memiliki ketinggian antara 0 – 10 meter dari permukaan laut yaitu pada Kecamatan Gegesik, Kapetakan, *Arjawinangun*, Klangenan, Cirebon Utara, Cirebon Barat, Weru, *Astanajapura*, Lemahabang, Karangsembung, Waled, *Ciledug* dan Kecamatan Losari.
2. Daerah dataran tinggi yang memiliki ketinggian antara 11 – 130 meter dari permukaan laut yaitu pada Kecamatan Cirebon Selatan, Beber dan Sedong.

Dengan demikian kondisi topografinya dapat diklasifikasikan daerah datar 60 %, berbukit 25 % dan lereng 15 %, untuk lebih jelasnya wilayah Kabupaten Cirebon dapat dilihat pada Gambar 4.1.


Dilihat dari bentuk topografi yang relatif datar, kondisi tersebut merupakan salah satu faktor yang menguntungkan Kabupaten Cirebon dalam mengembangkan dan membangun wilayahnya termasuk didalamnya pengembangan dan pembangunan prasarana kotanya. Akan tetapi hal tersebut bukannya tanpa kendala, dalam pengembangan prasarana di Kabupaten Cirebon dihadapkan pada beberapa kendala fisik yang harus dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan. Kendala fisik ini berupa jenis tanah, ketersediaan sumber air, daerah bahaya gunung berapi, gerakan tanah, erosi dan banjir. Jenis tanah mempengaruhi peruntukannya, hal ini perlu dipertimbangkan dalam menentukan fungsi lahan. Sedangkan sumber air yang ada di Cirebon banyak didominasi dari air sungai dan waduk serta sedikit sekali memiliki mata air. Selama ini pengembangan pelayanan air bersih memiliki kendala sumber air yang kurang memadai dan jaringan yang terbatas, untuk mata air diperoleh dari daerah di wilayah Kabupaten Kuningan.

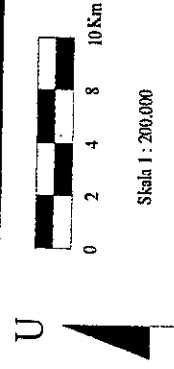
Kepekaan tanah terhadap erosi di Kabupaten Cirebon bervariasi, disepanjang pantai Laut Jawa keadaan tanahnya tidak peka terhadap erosi kecuali sekitar Kota Cirebon. Semakin ke Selatan menjauhi pantai, kepekaan tanah terhadap erosi bervariasi, daerah bagian barat daya Kabupaten Cirebon memiliki kepekaan tinggi terhadap erosi dan tersebar disepanjang bantaran pantai Kota Cirebon dan di sebagian daerah sebelah tenggara Kota Cirebon. Kendala fisik lain yang sangat mempengaruhi adalah banjir yang diakibatkan oleh meluapnya beberapa sungai.

Gambar 4.1.

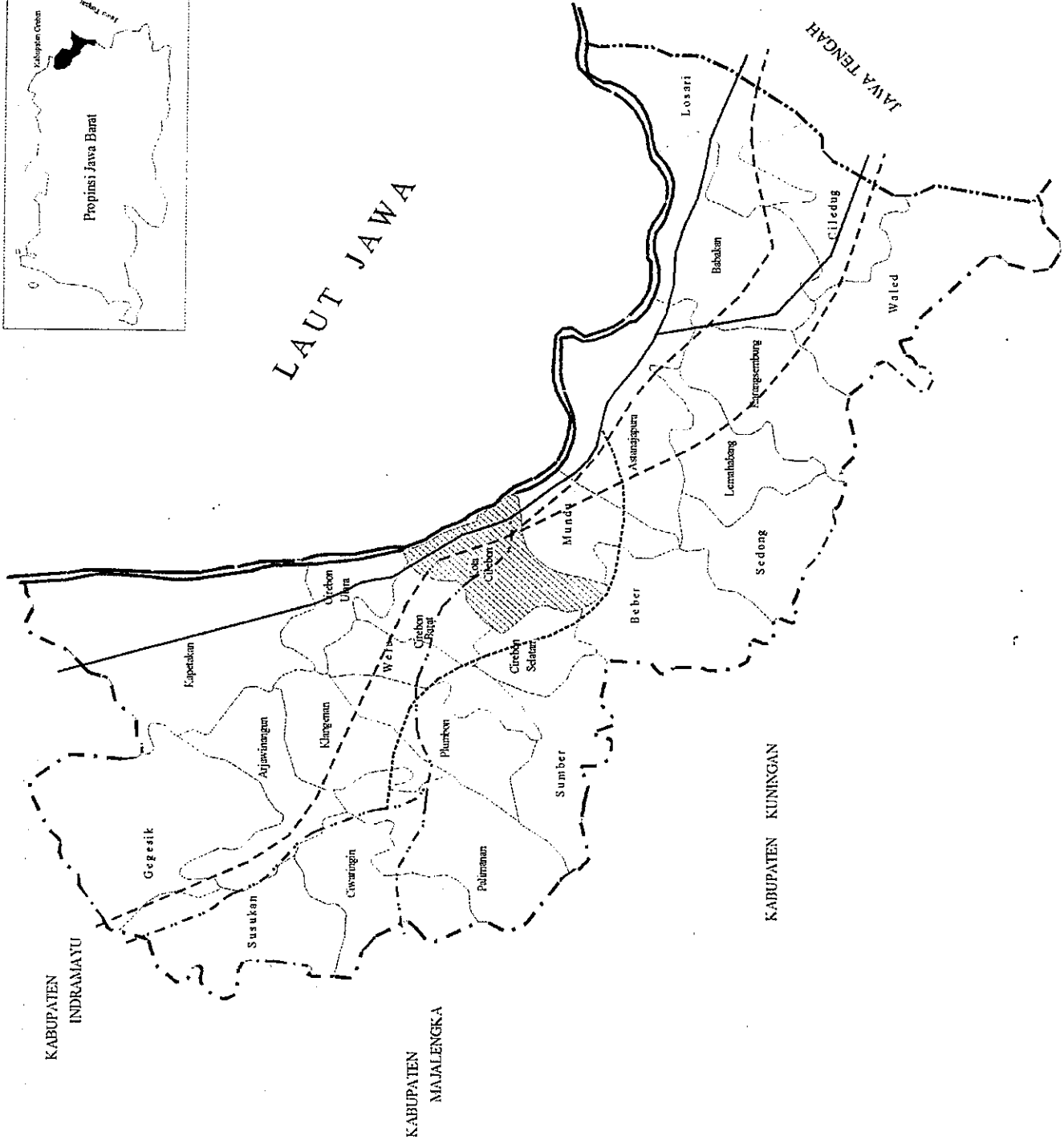
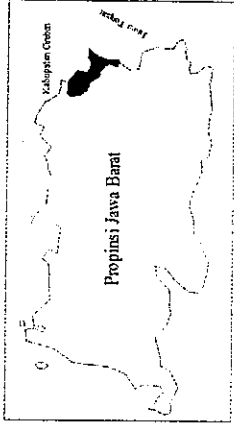
Wilayah Kabupaten Cirebon

Keterangan :

- Jalan Nasional
- - - Jalan Propinsi
- Jalan TOL
- . - . - . Jalan Kereta Api
-  = Wilayah Kota Cirebon



MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2002



Sungai Cisinggarung cukup potensial untuk menyebabkan banjir di wilayah Kecamatan Losari, sedangkan sungai Ciberes menyebabkan banjir di Kecamatan Waled, Sungai Pekik menjadi penyebab banjir di Kecamatan Cirebon Utara.

Kabupaten Cirebon juga dilalui oleh jalan lintas Pantai Utara Jawa (Jalur Pantura) yang merupakan jalur paling penting dalam pergerakan orang dan barang di Pulau Jawa. Kondisi ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan wilayah secara keseluruhan terutama perkembangan kota-kotanya. Kecenderungan perkembangan kota-kota di Kabupaten Cirebon saat ini lebih dominan mengarah kepada kota-kota yang dilalui oleh sistem transportasi regional (antar kota), yaitu khususnya di wilayah bagian utara yang dilewati Jalur Pantura. Perkembangan yang berlangsung juga didorong oleh adanya potensi sektoral maupun fisik alami di tiap-tiap kota tersebut.

4.1.2 Kebijakan Umum Daerah

Pada era pemerintahan orde baru perencanaan pembangunan ditetapkan dalam suatu Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) yang didalamnya termuat kebijakan-kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Repelita ini mengacu pada Pola Dasar Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai kebijakan dasar pembangunan daerah. Pola Dasar merupakan landasan bagi pelaksanaan pembangunan baik dalam hubungannya dengan Pembangunan Jangka Panjang, maupun dengan Pembangunan Jangka Menengah atau Lima Tahunan baik itu skala nasional maupun daerah seperti halnya di Kabupaten Cirebon

Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon adalah merupakan garis-garis besar kebijakan dan arah pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon sebagai penjabaran dari GBHN dan Pola

Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan memperhatikan kondisi, potensi daerah serta kemampuan dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat serta merupakan dasar bagi pembangunan selanjutnya di Kabupaten Cirebon. Fungsi Pola Dasar Kabupaten Cirebon adalah sebagai pedoman bagi seluruh aparatur pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan serta merupakan dasar untuk menyusun Repelita Daerah, Rencana Pengembangan Wilayah dan Penyusunan Rencana Kota. Ruang lingkup Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon menyangkut seluruh aspek pembangunan baik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam dan agama serta yang bersifat fisik materiil maupun mental spiritual yang dilakukan di Kabupaten Cirebon.

Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon kemudian dijabarkan kedalam Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah (Repelitada) yang kemudian dijabarkan secara lebih rinci untuk tujuan operasional dalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah. Dari Rencana Pembangunan Tahunan Daerah dalam bentuk nyatanya dilakukan dalam bentuk kegiatan / proyek-proyek pembangunan. Dalam penelitian ini Pola Dasar Pembangunan Daerah, Repelitada dan Repetada yang dianalisis adalah Pada kurun waktu 1989/1990-1993/1994, 1994/1995-1998/1999.

Kebijakan umum yang ditetapkan dalam kurun waktu 1989/1990 sampai dengan 1993/1994 adalah trilogi pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan stabilitas nasional dengan menitik beratkan pada pembangunan sektor industri yang bertumpu pada sektor pertanian secara berkesinambungan. Pada Pola Dasar tahun 1994/1995-1998/1999 kebijakan umum yang ditetapkan masih dalam kerangka trilogi pembangunan yang dititik beratkan pada pembangunan ekonomi dengan peningkatan dan pengembangan industri yang diarahkan pada pengisian/pemanfaatan

kawasan industri, zona industri dan sentra industri, sarana dan prasarana penunjang yang dikaitkan dengan prospek pertumbuhan industri, zona industri dan sentra industri, menciptakan iklim usaha yang kondusif, berlanjut dan konsisten untuk mendorong penanaman modal baik domestik maupun asing, meningkatnya industri menengah, kecil dan industri rumah tangga serta perluasan lapangan kerja.

Secara teoritis tujuan dari pembangunan mempunyai dua pendekatan, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan yang bersifat egalitarian. Pada pelaksanaannya kedua pendekatan mempunyai arah yang saling bertolak belakang (Miyoshi; 1997:15). Dalam strategi pusat pertumbuhan kedua pendekatan ini akan mempengaruhi dalam pengambilan keputusannya nanti. Dengan didasarkan pada masih banyaknya rakyat Indonesia yang masih berada dibawah garis kemiskinan, maka dalam konteks Indonesia menurut Emil Salim dalam Bintoro (1995:54) kebijakan dasar pembangunan juga harus memperhatikan kondisi masyarakat yang disesuaikan dengan tingkat atau tahap pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat, demikian pula halnya apabila kondisi stabilitas keamanan dan politik tidak ada, maka peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunanpun akan sulit dilakukan.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan pembagian pendapatan yang lebih adil, negara mempunyai peranan yang penting dan aktif dalam mengarahkan dan melaksanakan pembangunan. Jadi jelas disini peran pemerintah masih demikian kuat sebagai *provider* pembangunan yang bersifat sentralitas. Kebijakan trilogi pembangunan ini tidak akomodatif terhadap pendekatan egalitarian, karena yang akan lebih dominan adalah aspek pertumbuhan ekonominya sedangkan aspek pemerataannya diatur oleh pemerintah yang memungkinkan terjadinya distorsi.

Apabila telah ditetapkan dan dirumuskan kebijakan dasar dan strategi pembangunan, direncanakan program investasi dengan tekanan pada sektor pertanian atau sektor pengembangan industri atau sektor prasarana yang luas (*social overhead capital*). Disini dipertimbangkan *trade offs* yang berarti keuntungan penekanan di satu sektor mungkin merugikan sektor lainnya. Hal ini juga menyangkut apakah penekanan dilakukan pada sektor ekonomi atau pada sektor non ekonomi. Pengutamaan pada bidang ekonomi juga berarti investasi sektor ekonomi prasarana umum (*social overhead capital*). Kemudian memberikan perhatian secara selektif kepada usaha-usaha di bidang sosial yang mendukung usaha produktif misalnya pendidikan, khususnya pendidikan teknik dan manajemen, pendidikan dasar dan menengah, kesehatan masyarakat, perumahan, program keluarga berencana, penelitian dan lain-lain. Antara bidang ekonomi dan bidang sosial terdapat keterkaitan yang erat. Pembangunan bidang sosial berarti menyumbang pada peningkatan kualitas hidup dan dipihak lain mendukung peningkatan produktifitas dan produksi.

Dalam kebijakan spasialnya Kabupaten Cirebon menerapkan strategi pusat pertumbuhan yang secara teoritis pada strategi ini diharapkan akan muncul suatu efek penetesan dari pusat pertumbuhan ke daerah belakangnya. Konsep yang ada mengemukakan bahwa pada pusat kutub pertumbuhan terdapat perusahaan-perusahaan besar yang bersifat propulsif, perusahaan-perusahaan tersebut merupakan *leading industries* yang memiliki kaitan yang kuat baik ke depan (*forward linkages*) maupun ke belakang (*backward linkages*). Menurut Hirschman (1954) dalam Richardson (1976:101), bahwa yang paling efektif yaitu industri yang memiliki efek kaitan kebelakang tinggi, karena adanya pasar merupakan dorongan yang lebih kuat bagi industri-industri baru. Jadi kaitan kebelakang berarti adanya industri yang membeli hasil-hasil dari industri

pada tingkat sebelumnya, untuk mengetahui hal tersebut membutuhkan penelitian khusus yang dalam studi ini tidak akan dibahas.

4.1.3 Kebijakan Spasial

Kebijaksanaan penataan ruang daerah Propinsi Jawa Barat yang tertuang dalam RTRW Propinsi DT I Jawa Barat dan dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi DT I Jawa Barat 1994/1995-1998/1999, mengarahkan pengembangan struktur perwilayahan Jawa Barat yang berdasarkan konsep membuka dan meningkatkan fungsi simpul-simpul pertumbuhan diluar DKI Jakarta dan arahan pengembangan wilayah yang didasarkan pada model pengembangan wilayah jangka panjang "*Functional Integration*", yaitu:

1. Pengembangan wilayah yang didasari pada pembentukan pusat-pusat pertumbuhan yang melayani arus pergerakan (modal, barang dan lain-lain) dari daerah belakangnya ke luar wilayah,
2. Meningkatkan aksesibilitas untuk menunjang keterkaitan eksternal (*inter regional*) melalui pembentukan simpul/pusat pertumbuhan utama yang memiliki fungsi sebagai pintu keluar,
3. Meningkatkan keterkaitan internal antarapusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah belakangnya,
4. Meningkatkan pemerataan pembangunan dengan acuan penyebaran akumulasi kegiatan perekonomian sesuai dengan dominasi fungsi wilayah masing-masing.

Struktur wilayah yang dikemukakan dalam RUTRW dan Pola Dasar Pembangunan DT I Jawa Barat 1994-1999 tersebut terdiri dari :

1. Wilayah Pengembangan Barat dengan pusat pertumbuhan Bojonegara,
2. Wilayah Pengembangan Tengah dengan pusat pertumbuhan DKI Jakarta,
3. Wilayah Pengembangan Timur dengan pusat pertumbuhan Kota Cirebon.

Wilayah Pengembangan (WP) Timur Jawa Barat terdiri atas 7 (tujuh) kabupaten / kota, yaitu Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis, dimana Kota Cirebon sebagai pusat pertumbuhan dengan outlet Pelabuhan Cirebon.

Kabupaten Cirebon yang merupakan *secondary center* dalam WP Timur Jawa Barat, dalam upaya untuk memacu perkembangan wilayah, strategi pengembangan yang diterapkan adalah mencakup 5 (lima) hal pokok, yaitu penataan struktur keruangan, penanganan sektor ekonomi andalan, pengembangan sistem jaringan prasarana, pemantapan sistem informasi pembangunan, serta pembinaan sumber daya manusia.

Dengan didasarkan pada kebijakan yang dikeluarkan Propinsi Jawa Barat tahun 1989/1990-1993/1994, Kabupaten Cirebon mengeluarkan kebijakan penataan ruangnya yang tertuang dalam Pola Dasar Pembangunan tahun 1989/1990-1993/1994 dengan membagi wilayah dengan 5 (lima) sub wilayah pembangunan (SWP), yaitu :

1. SWP I, dengan pusat di Palimanan yang meliputi Kecamatan Palimanan, Klangeran, Plumbon dan Ciwaringin dengan fungsi yang diarahkan sebagai daerah industri ekstraktif, pemukiman, pertanian dan industri pengolahan hasil pertanian,

2. SWP II, dengan pusat di Arjawinangun yang meliputi Kecamatan Arjawinangun, Gegesik, Kapetakan dan Susukan dengan fungsi yang diarahkan sebagai daerah pertanian, pemukiman, pengembangan sosial dan perdagangan,
3. SWP III, dengan pusat di Lemahabang yang mencakup wilayah Kecamatan Astanajapura, Lemahabang dan Karangsembung dengan fungsi yang diarahkan sebagai daerah industri manufaktur, pertanian dan pengembangan sosial dan pemukiman,
4. SWP IV, dengan pusat di Ciledug yang meliputi wilayah Kecamatan Ciledug, Babakan, Waled dan Losari dengan fungsi yang diarahkan kepada daerah perdagangan, industri, pertanian serta pemukiman dan pengembangan sosial,
5. SWP V, yang merupakan hinterland dari Kota Cirebon meliputi Kecamatan Cirebon Barat, Cirebon Selatan, Weru, Sumber, Beber dan sebagian Kecamatan Astanajapura dengan fungsi yang diarahkan sebagai penunjang kegiatan-kegiatan Kota Cirebon.

Untuk lebih jelasnya pembagian wilayah tersebut dapat dilihat pada gambar 4.2.

Wilayah Kabupaten Cirebon juga tidak terlepas dari berbagai dampak pembangunan, baik internal maupun eksternal. Rencana pengembangan kawasan industri di Kapetakan, rencana pembangunan jalan tol dan rencana pembangunan kilang minyak Exor di Indramayu merupakan rencana yang harus diantisipasi. Disamping itu untuk menganalisis antisipasi dampak negatif yang akan terjadi dan melakukan perencanaan, kebijaksanaan dan langkah-langkah awal untuk mengeliminasinya, juga untuk 'menangkap' keuntungan-keuntungan langsung maupun tidak langsung yang akan terjadi akibat pembangunan tersebut. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pada tahun anggaran 1990/1991.

Gambar 4.2.

Sub Wilayah Pembangunan
Kabupaten Cirebon

Keterangan :

- Jalan Nasional
- - - Jalan Propinsi
- Jalan TOL
- . - . - . Jalan Kereta Api



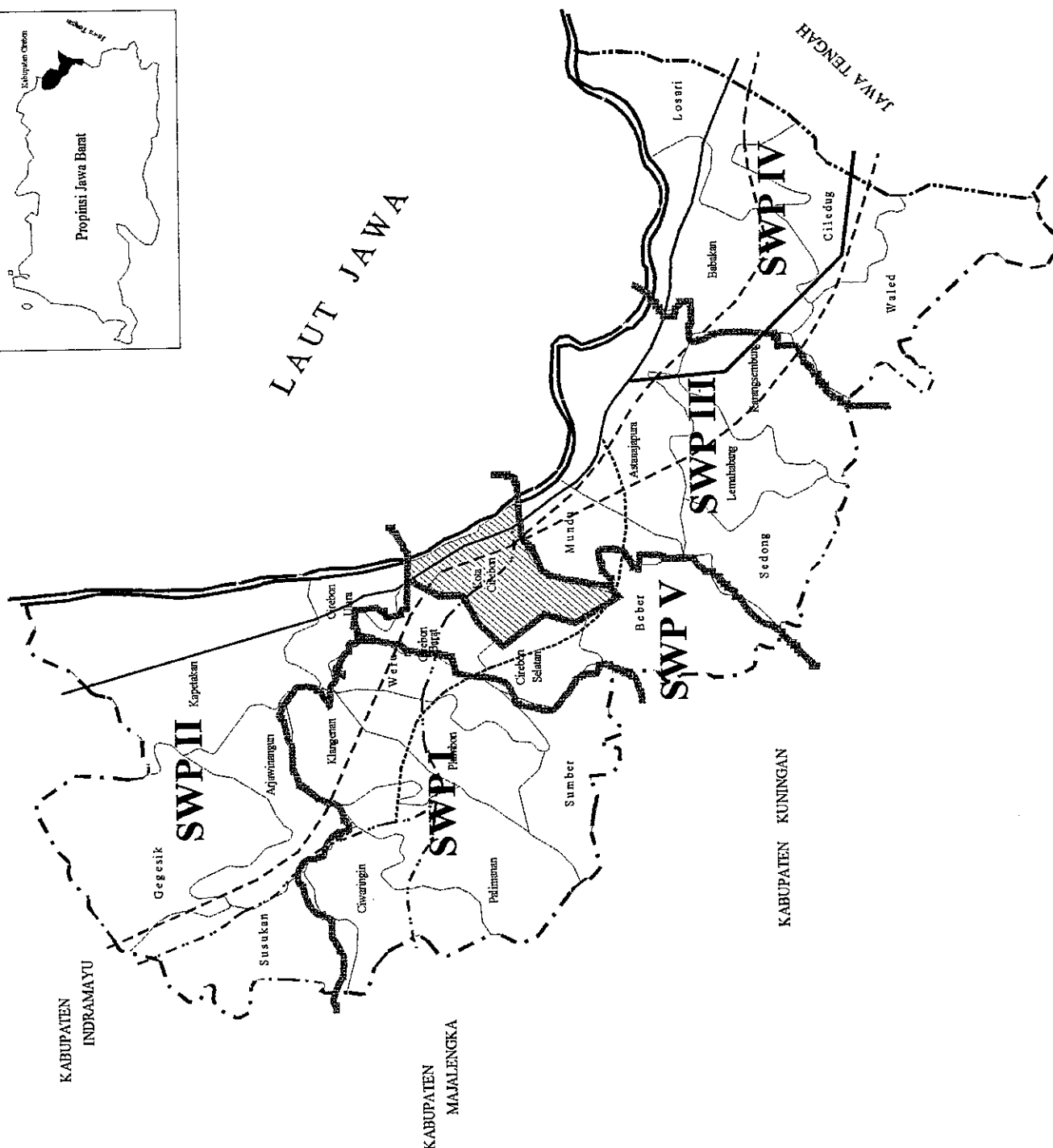
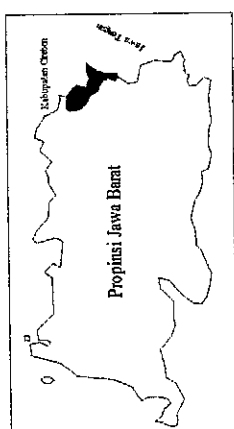
Skala 1 : 200.000

MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2002



Pemda Kabupaten Tk II Cirebon menyusun Rencana Umum Tata Ruang Daerah (RUTRD) Kabupaten yang juga dimaksudkan untuk mengevaluasi perencanaan yang telah disusun pada tahun 1972 berupa Masterplan Kabupaten Cirebon. Dari hasil analisis yang dilakukan pada tahap penyusunan RUTRD tersebut yang meliputi aspek sosial, ekonomi, fisik dan lingkungan serta tata ruang, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dapat disusun suatu sistem kota-kota dengan orde-orde sebagai berikut :
 - Orde I: Kota Cirebon,
 - Orde II: Arjawinangun, Ciledug dan Sumber,
 - Orde III: Weru, Palimanan, Gegesik, Karangsembung, Losari dan Lemahabang,
 - Orde IV: Plumbon, Astanajapura, Kapetakan, Cirebon Selatan, Babakan, Waled, Cirebon Barat, Cirebon Utara, Klangeran, Ciwaringin, Susukan dan Beber.
2. Berdasarkan hasil pemilahan tersebut ditemukan bahwa wilayah bagian selatan tidak memiliki hirarki yang memadai untuk lebih memacu perkembangannya. Tidak terdapatnya wilayah Orde II di bagian selatan akan mengakibatkan ketimpangan perkembangan. Untuk lebih memberikan pemerataan dan kemudahan dalam proses pembangunan dan perkembangan daerah, maka harus dilakukan intervensi terhadap tata hirarki tersebut. Intervensi ini secara langsung dapat dilakukan dengan membangun fasilitas-fasilitas pengumpul dan distribusi yang cukup mampu melayani wilayah bagian selatan dan juga sistem jaringan prasarana kota yang baik untuk memudahkan mencapai fasilitas yang tersedia.

3. Dari hasil analisis aksesibilitas tergambar belum ada jaringan transportasi yang menghubungkan antara wilayah Timur, Selatan dan pesisir utara dengan hirarki jalan regional dan fungsi primer. Oleh karena itu terjadi pengelompokan-pengelompokan wilayah yang masing-masing terpisah di dalam wilayah Kabupaten Cirebon. Terdapat 6 pengelompokan dimana masing-masing wilayah tersebut lebih terkait kepada Kota Cirebon dibandingkan dengan wilayah-wilayah di dalam Kabupaten Cirebon itu sendiri. Kondisi ini lebih banyak daripada pembagian perwilayahan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Pola Dasar Pembangunan.

Berdasarkan gambaran diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijaksanaan perwilayah pembangunan yang telah ditetapkan tidak dapat berjalan optimal. Masing-masing pengelompokan wilayah berdiri sendiri tidak membentuk sistem tata ruang yang teratur, terkait dan saling memberikan multiplier pertumbuhan. Pertumbuhan yang terjadi akan lebih memusat ke Kota Cirebon yang kemudian menyebar ke wilayah pinggirannya yang merupakan wilayah Kabupaten Cirebon. Kota Cirebon akan semakin membesar dan akan bersifat parasitik terhadap wilayah-wilayah di Kabupaten Cirebon.

Bila proses perkembangan ini yang terjadi, maka akan terjadi pemisahan antara wilayah bagian utara dengan wilayah bagian selatan. Masing-masing dengan pusat-pusat pertumbuhannya sendiri, dengan tata hirarki tersendiri dan dengan proses perkembangannya sendiri. Tidak akan terjadi proses perkembangan yang terpadu dan merata yang saling terkait di seluruh Wilayah Kabupaten Cirebon. Kondisi ini akan menyulitkan didalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, mengingat sistem kendali perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berlaku adalah berdasarkan wilayah-wilayah administratif.

Berdasarkan kondisi diatas dan pengelompokan potensi di tiap wilayah, yaitu wilayah utara, tengah dan selatan, dalam RUTRD 1991 disusun suatu sistem pusat pertumbuhan sebagai berikut :

1. **Pusat pertumbuhan Sumber** dengan daerah belakangnya meliputi Kecamatan Sumber, Plumbon, Weru, Klagenan, Palimanan dan Ciwaringin.
2. **Pusat Pertumbuhan Arjawinangun** dengan daerah belakangnya meliputi Kecamatan Arjawinangun, Gegesik, Susukan, Kapetakan dan sebagian Cirebon Utara.
3. **Pusat pertumbuhan Astanajapura** dengan daerah belakangnya meliputi Kecamatan Astanajapura, Lemahabang dan Karangsembung,
4. **Pusat pertumbuhan Ciledug** dengan daerah belakangnya meliputi Kecamatan Ciledug, Babakan, Losari dan Waled.

Penetapan tersebut berdasarkan pada analisis pengelompokan potensi melalui analisis faktor, kecenderungan pertumbuhan perkotaan tahun 1980-1990, penempatan ibu kota kabupaten di Kota Sumber, rencana pengembangan jalan alternatif dari Palimanan-Ciledug terus ke Jawa Tengah, rencana pengembangan jalan tol, mempertegas batas tiap wilayah pembangunan hingga unit terkecil yang dapat dilakukan, yaitu hingga batas desa.

Dalam Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Cirebon tahun 1994/1995-1998/1999 kebijakan spasial yang menetapkan empat pusat pertumbuhan tetap dilanjutkan. Penataan struktur ruang di Kabupaten Cirebon dilakukan melalui penetapan sistem pusat pertumbuhan yang terdiri dari *Pusat Pertumbuhan Sumber, Arjawinangun, Astanajapura dan Ciledug*. Pusat-pusat pertumbuhan ini diarahkan untuk berperan sebagai penggerak pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah dalam konstelasi regional dan penggerak pertumbuhan dan perkembangan perekonomian bagi wilayah pedesaan di

sekitarnya. Akan tetapi kondisi yang diharapkan tersebut belum terwujud, seperti yang telah dikemukakan pada bab pendahuluan, pertumbuhan ekonomi dan perkembangan kota-kota di Kabupaten Cirebon relatif konstan.

4.2 Tinjauan Aspek Sosial dan Perekonomian

4.2.1 Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Kabupaten Cirebon merupakan salah satu diantara kabupaten di Propinsi Jawa Barat yang mempunyai jumlah penduduk cukup besar. Penduduk Kabupaten Cirebon berdasarkan hasil registrasi penduduk akhir tahun 1998 adalah sebanyak 1.800.057 jiwa, kemudian meningkat pada tahun 1999 menjadi 1.855.655 jiwa. Dengan luas wilayah administratif 990,36 Km² Kabupaten Cirebon mempunyai tingkat kepadatan penduduk 1.873,7 jiwa per Km² dimana kepadatan penduduk dimasing-masing kecamatan menunjukkan ketidak merataan, hal ini disebabkan oleh kondisi dan potensi masing-masing wilayah kecamatan yang tidak sama.

Kepadatan penduduk tertinggi cenderung berada di pusat kota kecamatan dan daerah perkotaan dimana banyak terdapat kegiatan perekonomian masyarakat di berbagai bidang usaha yang dapat memberikan lapangan pekerjaan seperti perdagangan, industri, pengangkutan, pertanian, pertambangan, pemerintahan, jasa-jasa dan lain-lain. Pola seperti ini sesuai dengan konsep lokasi dimana lahan yang strategis dan bernilai tinggi sangat ditentukan oleh faktor jarak dengan aglomerasi kegiatan penduduk kota dengan skala yang cukup tinggi, jarak terhadap jaringan transportasi dan ketersediaan fasilitas dan utilitas (air minum, listrik dan lainnya).

Kecamatan Cirebon Barat merupakan kecamatan yang memiliki angka kepadatan tertinggi yaitu sebesar 4.240, 68 jiwa per Km². Hal ini disebabkan oleh kedudukan Kecamatan Cirebon Barat merupakan kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kota Cirebon dimana pada wilayah ini banyak terdapat pemukiman. Selain Kecamatan Cirebon Barat yang mempunyai tingkat kepadatan tinggi dan berbatasan langsung dengan Kota Cirebon adalah Kecamatan Cirebon Utara. Dalam RUTRD Kabupaten Cirebon, Kecamatan Cirebon Barat dan Cirebon Utara ditetapkan sebagai wilayah pinggiran dari Kota Cirebon dengan fungsi permukiman/perkotaan untuk mendukung fungsi Kota Cirebon sebagai pusat pertumbuhan WP Timur Cirebon. Kecamatan Weru dan Plumbon juga memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, hal ini disebabkan oleh banyaknya pemukiman akibat aktifitas sektor perdagangan dan industri. Sedangkan yang terendah adalah kecamatan Kapetakan yaitu sebesar 1.033,35 jiwa per Km², untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2 lampiran 1. Dari data terlihat adanya kecamatan yang memiliki jumlah penduduk tinggi akan tetapi tingkat kepadatannya rendah, hal ini mengindikasikan terdapatnya perbedaan intensifikasi penggunaan lahan di tiap kecamatan di Kabupaten Cirebon yang sekaligus juga menunjukkan intensifikasi kegiatan yang ada.

Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Cirebon adalah sebesar 1.50 % per tahun dan termasuk rendah apabila dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan Jawa Barat. Permasalahan kependudukan di Kabupaten Cirebon adalah menyangkut persebaran penduduk yang kurang merata dan kepadatan penduduk yang relatif tinggi, hal ini sangat berpengaruh terhadap pola penggunaan dan pemanfaatan lahan, selain itu jumlah penduduk yang besar harus diimbangi pula oleh penyediaan lapangan kerja yang memadai dan dapat menampung pertambahan tenaga kerja yang ada.

Pada tahun 1999 jumlah tenaga kerja yang ada di Kabupaten Cirebon adalah sebanyak 1.474.660 orang, dari jumlah tersebut 53,54 % merupakan angkatan kerja atau sebanyak 789.536 orang, sedangkan sisanya yaitu 46,46 % adalah bukan angkatan kerja atau sebanyak 685.124 orang. Pertumbuhan angkatan kerja di Kabupaten Cirebon dalam kurun waktu 1995 – 1999 memiliki kecenderungan naik yaitu rata-rata sebesar 1,46 %. Dari jumlah angkatan kerja sebanyak 789.536 orang, 89,69 % diantaranya terserap dalam berbagai sektor yang ada, sedangkan sisanya, yaitu sebesar 10,31 % masih mencari kerja. Hal ini dapat dilihat pada Tabel IV.1. berikut:

TABEL IV.1.
PERKEMBANGAN JUMLAH PEKERJA DI KABUPATEN CIREBON
MENURUT LAPANGAN KERJA TAHUN 1995 – 1999

Lapangan Pekerjaan	1995	1996	1997	1998	1999
Pertanian	218.572	195.841	205.648	213.917	168.828
Pertambangan	5.724	6.623	2.808	7.566	1.173
I n d u s t r i	122.086	74.757	89.780	97.286	137.841
Listrik, Gas dan Air	3.533	6.275	2.808	3.076	1.234
Konstruksi	77.459	56.974	63.332	65.484	63.789
Perdagangan	165.331	182.786	221.738	210.303	213.719
Angkutan & Komunikasi	31.116	32.361	36.014	36.648	44.343
K e u a n g a n	3.163	1.911	4.492	5.284	1.870
J a s a	87.976	83.454	50.496	59.068	75.306
Lainnya	160	2.708	-	1.431	-
Total	715.120	644.690	677.116	702.063	708.103

Sumber : Ketenaga Kerjaan Kabupaten Cirebon 1999

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tenaga kerja yang terserap di sektor-sektor lapangan kerja yang ada di Kabupaten Cirebon sampai dengan tahun 1996 masih didominasi oleh sektor pertanian, sektor perdagangan dan industri pengolahan. Dalam lima tahun terakhir tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian cenderung menurun, fenomena

ini mengindikasikan semakin berkurangnya lahan pertanian yang ada di wilayah ini serta penduduknya sudah tidak menggantungkan hidupnya pada pengolahan tanah untuk kepentingan pertanian.

Dari tabel juga terlihat peningkatan penyerapan tenaga kerja pada sektor industri yang tadinya sebesar 13,95 % pada tahun 1995 menjadi 19,47 % pada tahun 1999, dengan kata lain sektor industri telah menjadi salah satu tumpuan penduduk dalam mencari kehidupan. Peningkatan yang signifikan terjadi di sektor perdagangan dari 18,90 % pada tahun 1995 menjadi 30,18 % pada tahun 1999, dari fakta tersebut terlihat bahwa sektor perdagangan merupakan sektor yang dominan aktifitasnya di Kabupaten Cirebon selain sektor industri.

4.2.2 Struktur dan Perkembangan Perekonomian Kabupaten Cirebon

Kondisi perekonomian suatu daerah diindikasikan oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan gambaran kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki, hal ini dapat dilihat dari nilai tambah yang mampu diciptakan akibat timbulnya berbagai aktifitas perekonomian dalam wilayahnya. Selain itu dilihat pula indikator yang menunjukkan naik tidaknya produk yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan perekonomian di wilayah tersebut disebut Laju Perumbuhan Ekonomi.

Perkembangan PDRB Kabupaten Cirebon tahun 1995 sampai dengan tahun 1999 dapat dilihat pada Tabel 3 Lampiran 1. Sektor-sektor yang memegang peran penting dalam kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Cirebon adalah sektor pertanian, sektor industri, sektor perdagangan dan sektor jasa. Sektor pertanian dipandang dari produktifitas diantaranya adalah tanaman padi sawah, dan palawija serta peranan dan potensinya

terhadap Jawa Barat cukup menonjol. Dan untuk sub sektor perikanan, hasil-hasil pembangunan yang paling menonjol adalah perikanan laut. Didalam ruang wilayah, sentra-sentra tanaman padi yang paling menonjol berada di Kecamatan Arjawinangun, Klangenan, Palimanan dan Gegesik, sedangkan untuk produksi tanaman palawija yang menonjol berada di Kecamatan Beber, Astanajapura dan Cirebon Barat.

Sektor industri di Kabupaten Cirebon secara umum belum menunjukkan adanya peranan dan potensi yang berarti, akan tetapi khusus sub sektor industri kecil dan rumah tangga, hasil-hasil pembangunannya telah menunjukkan peranan dan potensi yang berarti bagi Propinsi Jawa Barat. Di Kabupaten Cirebon terdapat beberapa industri penting, termasuk fasilitas produksi semen di Palimanan. Adapun industri yang berkembang di Kabupaten Cirebon adalah industri pengolahan, yaitu Industri Pertambangan (13 perusahaan), Industri Tekstil (9 perusahaan), Industri Kimia (13 perusahaan), Industri makanan dan minuman (102 perusahaan), Industri Logam (7 perusahaan) dan Produk-produk kayu (69 perusahaan) data tersebut diambil dari Kabupaten Cirebon Dalam Angka 1999.

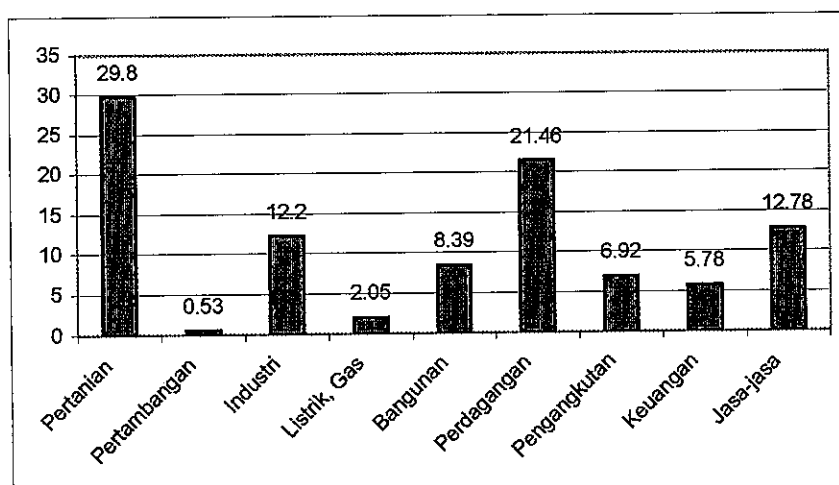
Pembangunan kelompok industri besar dan sedang di Kabupaten Cirebon meliputi jenis-jenis industri tekstil, kimia, bahan bangunan dan produk kayu terutama rotan. Jenis industri rotan ini hanya terdapat di kecamatan-kecamatan tertentu dan terbesar berada di Kecamatan Weru dan Plumbon, kecamatan-kecamatan ini termasuk kedalam wilayah belakang dari pusat pertumbuhan Sumber. Kabupaten Cirebon merupakan salah satu sentra industri rotan yang cukup potensial di Jawa Barat oleh adanya keahlian dalam pengolahan rotan. Kelompok industri kecil di Kabupaten Cirebon merupakan kelompok yang potensial serta memiliki jumlah unit usaha yang paling besar. Jenis industri yang paling dominan adalah industri kerajinan dan makanan/minuman yang sentra-sentranya menyebar merata

dan dominan berada di Kecamatan Cirebon Selatan dan Weru, kecamatan-kecamatan ini juga termasuk kedalam wilayah belakang pusat pertumbuhan Sumber. Dari uraian diatas dapat diindikasikan bahwa aktifitas industri sedang dan besar di Kabupaten Cirebon banyak berpusat di daerah belakang (hinterland) kota pusat pertumbuhan Sumber, yaitu Kota Plumbon dan Kota Weru. Ditinjau dari aspek penyediaan prasarana kotanya daerah-daerah tersebut juga termasuk lengkap kecuali masalah jaringan air bersih yang belum merata di Kecamatan Weru dan Palimanan.

Sektor perdagangan di Kabupaten Cirebon secara regional belum menunjukkan peranan dan potensi yang cukup berarti terhadap Propinsi Jawa Barat akan tetapi potensi yang cukup besar di sektor-sektor ekonomi seperti pertanian dan industri, hasil produksi sektor-sektor tersebut merupakan potensi bagi sektor perdagangan dalam lingkup wilayah kabupaten sendiri maupun ke luar wilayah kabupaten. Dengan demikian sebenarnya sektor ini memiliki kemampuan berkembang yang cukup cerah.

Disamping itu kegiatan perdagangan ditunjang oleh ketersediaan jaringan transportasi dalam wilayah yang memadai maupun tingkat keterhubungan yang tinggi dengan daerah di luar wilayah kabupaten. Dengan adanya jalur-jalur transportasi yang memadai, kegiatan koleksi dan distribusi barang hasil produksi antar pusat-pusat kegiatan penduduk atau kota-kota di Kabupaten Cirebon maupun wilayah luar dapat berlangsung dengan lancar. Untuk lebih jelasnya kontribusi sektor-sektor terhadap PDRB di Kabupaten Cirebon tahun 1999 dapat dilihat pada Gambar 4.3.

GAMBAR 4.3.
KONTRIBUSI SEKTOR TERHADAP PDRB
TAHUN 1999 (dalam %)



Sumber : PDRB Kabupaten Cirebon 1999

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cirebon dari tahun 1994 sampai dengan 1996 terlihat relatif konstan (lihat tabel 1 pada lampiran 1). Adanya krisis ekonomi yang puncaknya terjadi pada tahun 1998 sangat banyak pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi hingga tahun 1999 di Kabupaten Cirebon. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cirebon pada tahun 1999 sebesar 3,37 %, sedangkan pada tahun 1998 adalah sebesar -20,77 %. Dari tabel 1 pada lampiran 1 tersebut terlihat bahwa kota pusat pertumbuhan Sumber daerah-daerah belakangnya mempunyai pertumbuhan PDRB diatas rata-rata Kabupaten.

4.3 Tinjauan Aspek Prasarana Wilayah

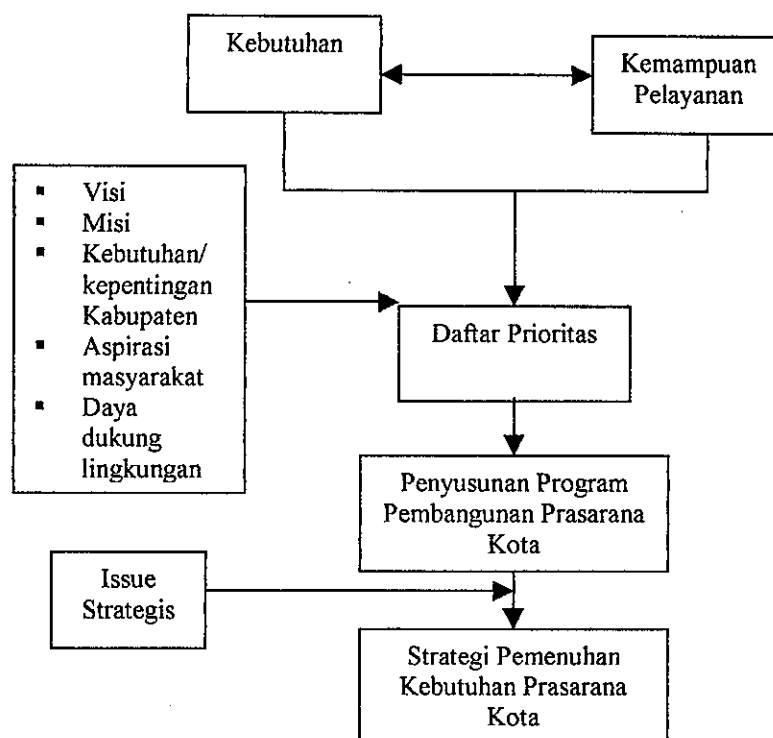
4.3.1 Kebijakan Pembangunan Prasarana

Dari hasil wawancara dengan Ir. Tatit Konitat yang menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Pengembangan Kawasan Bappeda Kabupaten Cirebon diketahui bahwa faktor-faktor yang mendasari penyusunan program pembangunan prasarana kota adalah

didasarkan pada kebutuhan dan kemampuan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kondisi yang sering terjadi di lapangan adalah kebutuhan selalu lebih tinggi dari pada kemampuan pelayanan, oleh sebab itu disusun suatu daftar skala prioritas.

Dalam penyusunan daftar skala prioritas ini mempertimbangkan faktor-faktor Visi dan Misi, kepentingan kabupaten secara keseluruhan, aspirasi masyarakat dan daya dukung lingkungannya yang kemudian dituangkan kedalam strategi pemenuhan kebutuhan yang selanjutnya dijabarkan didalam penyusunan program pembangunan prasarana kota. Penyusunan ini tidak terlepas dari isu strategis dan dikaitkan dengan visi, misi, kebutuhan/kepentingan Kabupaten, aspirasi masyarakat dan daya dukung lingkungan. Secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut :

GAMBAR 4.4.
DIAGRAM PENYUSUNAN PROGRAM PEMBANGUNAN KOTA DI
KABUPATEN CIREBON



Sumber : Hasil Wawancara

Adapun kota-kota yang diprioritaskan dalam penyusunan program pembangunan prasarana kota di Kabupaten Cirebon adalah kota-kota strategis dimana kota-kota ini adalah kota-kota yang memiliki kemampuan untuk melayani kota-kota lainnya. Program pembangunan prasarana di kota-kota tersebut dilakukan dengan menyusun Program Jangka Menengah dengan beberapa tahap, yaitu :

1. Tahap 1 : Kota Sumber, Arjawinangun dan Ciledug (5 tahun pertama)
2. Tahap 2 : Kota Lemahabang dan Losari (5 tahun kedua)
3. Tahap 3 : Palimanan dan Klangeran (5 tahun ketiga)
4. Tahap 4 : Kota Gegesik dan Weru (5 tahun keempat)

Hal yang mendasari pemilihan kota-kota tersebut adalah sistem kota-kota yang ada menunjukkan kota-kota tersebut mempunyai hirarki yang tinggi dan mampu melayani kota-kota lainnya.

Kondisi tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Berry (1967:72) yaitu bahwa sistem kota-kota berfungsi untuk menjalankan pertumbuhan dan perkembangan dari *core area*, kota yang ordenya lebih tinggi yang ditandai oleh paling lengkapnya prasarana kota yang dimiliki, ke wilayah belakangnya melalui pertukaran penduduk, barang dan jasa serta inovasi yang ada di dalamnya. Kota-kota yang ditangani pada tahap pertama adalah kota-kota yang memiliki hirarki paling tinggi.

Jadi pada dasarnya Pemerintah Kabupaten Cirebon telah menyusun program pembangunan jangka menengah untuk prasarana kota untuk kota-kota strategisnya termasuk kota-kota pusat pertumbuhan yang hasilnya dijadikan pedoman dalam penyusunan proyek-proyek tahunan. Sasaran dari program pembangunan prasarana ini baru pada tahap pemenuhan kebutuhan akan pelayanan prasarana dan belum sampai pada tahap untuk menarik investor untuk kedepan program pembangunan prasarana kota di

Kabupaten Cirebon akan diarahkan pada upaya menarik investor. Fakta ini menunjukkan bahwa program pembangunan prasarana kota yang telah disusun oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon telah mengarah pada upaya untuk membangun dan melengkapi terutama di kota-kota strategisnya, hal ini juga terlihat pada setiap program tahunannya yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada).

Program-program yang disusun juga telah dengan jelas menguraikan kota-kota mana saja yang akan ditangani dalam bentuk tahapan-tahapan, tahap pertama yang ditangani adalah merupakan kota-kota pusat pertumbuhan. Jadi jelas bahwa ada komitmen dari Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam upaya melengkapi dan membangun prasarana di kota-kota pusat pertumbuhannya walaupun baru sebatas pemenuhan akan kebutuhan belum pada tahap untuk menarik investor.

4.3.2 Cerminan Program Pembangunan Prasarana Kota

Program pembangunan pada hakekatnya harus diimplementasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang diarahkan oleh program itu sendiri. Dalam kaitannya dengan kegiatan pembangunan, APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Cirebon merupakan pencerminan dari program-program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang merupakan perencanaan tahunan yang memuat sasaran dan target program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam tahun anggaran. Dalam APBD, pembangunan-pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan diuraikan dalam Belanja Pembangunan termasuk didalamnya pembangunan prasarana kota. Pembangunan prasarana kota pada umumnya diuraikan dalam sektor-sektor. Untuk tahun anggaran 1991/1992 sampai dengan tahun 1999/2000

perkembangan pembangunan prasarana dan tingkat penggunaan anggarannya dapat dilihat pada tabel 1 lampiran 3.

Dari tabel 1 pada lampiran 3 dapat dilihat bahwa pengalokasian anggaran untuk investasi dibidang prasarana mencapai rata-rata 47,6 % dari anggaran pembangunan yang ada di dalam APBD dan 55,6 % dana prasarana tersebut dialokasikan untuk pembangunan prasarana kota, hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Cirebon telah berupaya melengkapi prasarana di wilayahnya. Dari sektor-sektor yang ada, sektor transportasi mendapat alokasi terbesar pada setiap tahun anggarannya, akan tetapi dalam konteks pusat pertumbuhan pembangunan prasarana kota tersebut harus dapat menunjang kinerja kota-kota pusat pertumbuhan, artinya prasarana yang dibangun harus dapat menstimulasi masuknya investasi kedalam wilayah pusat pertumbuhan. Untuk analisis ini akan dibahas lebih lanjut pada bab V.

4.3.3 Kondisi Jaringan Prasarana

a. Jaringan Prasarana Transportasi

Wilayah Kabupaten Cirebon dengan pusat-pusat pertumbuhannya memiliki lokasi yang strategis dengan dilalui oleh Jalur Pantai Utara Jawa. Jalan ini menghubungkan kota-kota antara lain Jakarta, Semarang dan Surabaya yang merupakan kota-kota besar di Jawa, selain itu Kabupaten di Cirebon terdapat persimpangan jalan antara jalur Pantura yang menuju Jakarta dan jalan yang menuju ke Kota Bandung, yaitu persimpangan di Kota Palimanan. Disamping itu juga ke arah kota-kota sedang/kecil seperti Majalengka, Kuningan dan Sumedang. Potensi jaringan jalan yang vital ini sangatlah menguntungkan bagi perkembangan perekonomian maupun wilayahnya, baik dalam kaitannya dengan proses produksi barang dan jasa serta pemasarannya dari dan ke luar daerah.

Wilayah Kabupaten Cirebon juga dilalui oleh jalan tol yang rencananya akan menghubungkan antara Cikampek-Jawa Tengah, yang pada saat ini karena dilanda krisis ekonomi ruas yang melalui wilayah Kabupaten Cirebon baru dari Palimanan ke Kanci di Astanajapura yang selanjutnya masuk kembali ke Jalur Pantura. Rencana jalan tol ini disamping untuk kepentingan nasional juga menguntungkan bagi Kabupaten Cirebon mengingat dengan apabila direalisasikan jalan tol ini akan sangat mempermudah pengusaha dalam mendatangkan bahan baku maupun ekspor pemasarannya. Dengan kondisi demikian diharapkan akan semakin menarik minat para investor baik dalam maupun luar negeri untuk menanamkan modalnya di daerah ini.

Untuk jaringan jalan lokal hampir seluruh wilayah telah terjangkau jaringan jalan dan dapat dicapai dengan kendaraan roda empat. Untuk melayani pergerakan masyarakat jaringan jalan juga dilengkapi dengan terminal-terminal, terminal dan sub terminal angkutan umum penumpang baru ada di beberapa kota kecamatan, yaitu di Weru, Sumber, Ciledug dan Losari, sedangkan terminal angkutan barang hanya ada di Palimanan. Umumnya keberadaan terminal dan sub terminal tersebut belum sepenuhnya efektif kecuali Ciledug. Dalam setiap penyusunan APBD sektor transportasi ini selalu menempati urutan teratas dalam pengalokasian anggaran tiap tahunnya hal ini diperkuat dari keterangan Kepala Bidang Penelitian Bappeda Kabupaten Cirebon.

Peruntukan penggunaan lahan dengan jaringan jalan di Kabupaten Cirebon diupayakan dapat menyeimbangkan antara aktifitas penduduk dengan peningkatan transportasi yang diarahkan pada penggunaan lahan yang potensial, seperti kawasan industri, kawasan pertanian, kawasan pariwisata, kawasan perdagangan baik dalam maupun luar negeri. Kota-kota pusat pertumbuhan dapat dijadikan dasar pertimbangan sebagai kawasan potensial atau unggulan untuk mempermudah dalam pemasaran hasil

produksi, juga dalam upaya untuk mengantisipasi pertumbuhan aktifitas pada kawasan tersebut. Untuk lebih jelasnya jaringan jalan utama yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon dapat dilihat pada Gambar 4.5.

b. Jaringan Prasarana Air Bersih

Untuk penyediaan air bersih PDAM Kabupaten Cirebon saat ini melayani 10 dari 23 kecamatan dimana seluruh kapasitas sistem air bersih terpasang \pm 328 liter/detik dengan jumlah sambungan 15.135 sambungan yang dilayani oleh 3 (tiga) kantor cabang (kondisi bulan Maret 1999) yang terdiri dari :


1. Cabang yang melayani Kecamatan Arjawinangun (4.169 sambungan), Kapetakan (4.522 sambungan) dan Gegesik (2.885 sambungan) dengan jumlah total 11.576 sambungan, termasuk 125 kran umum,
2. Cabang yang melayani Kecamatan Sumber (1.757 sambungan), Beber (853 sambungan), Lemahabang (439 sambungan) dan Palimanan (232 sambungan) dengan jumlah total 3.281 sambungan ditambah 18 kran umum,
3. Cabang yang melayani Kecamatan Karangsembung, Ciledug dan Waled, sejumlah 278 sambungan.

Dari empat kota pusat pertumbuhan yang belum terlayani jaringan prasarana air bersih ini hanya Kota Astanajapura. Untuk lebih jelasnya lokasi cabang PDAM dan wilayah pelayanannya dapat dilihat pada Gambar 4.6.

Gambar 4.5.

Pola Jaringan Jalan Utama
Kabupaten Cirebon

Keterangan :

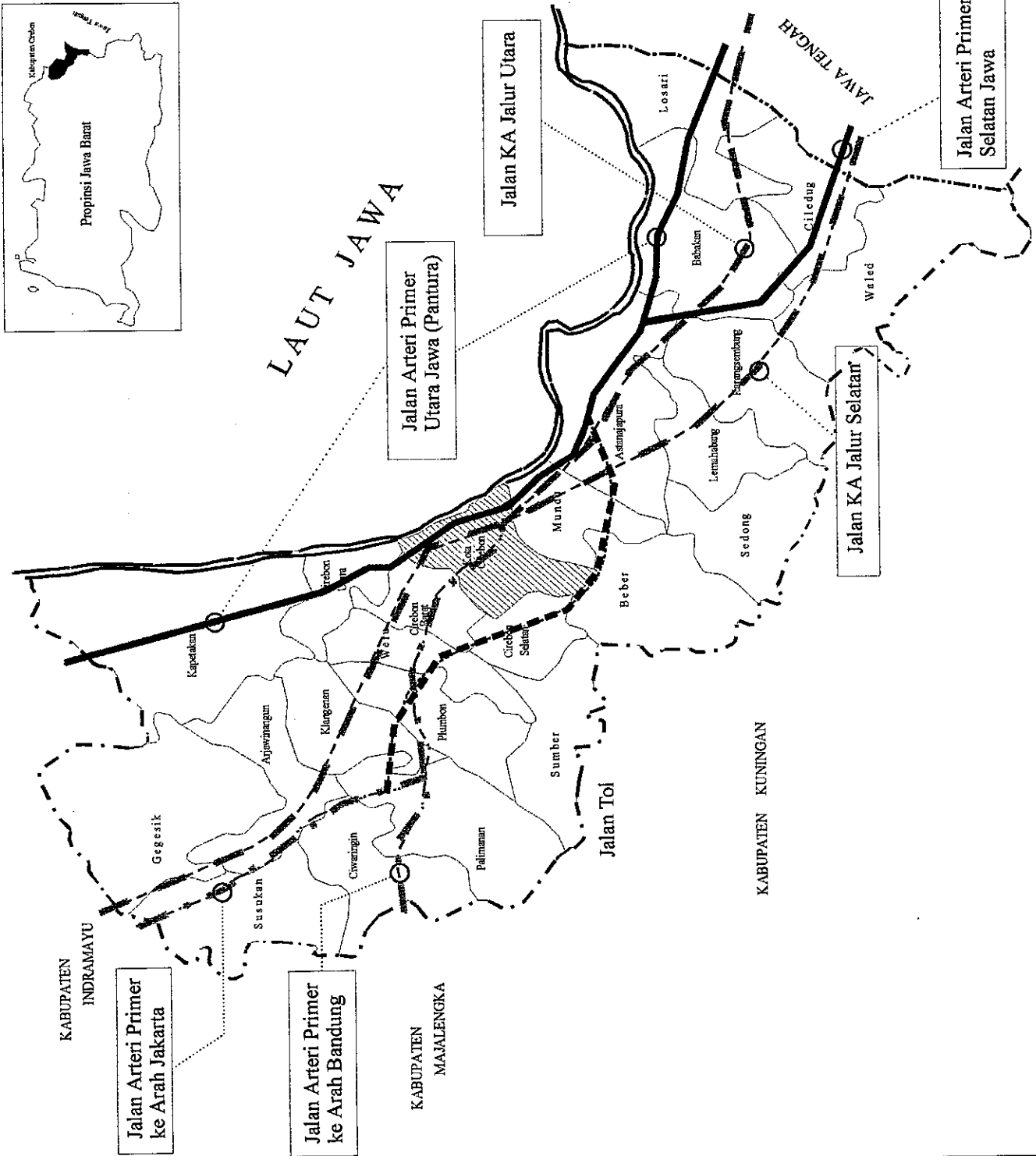
- Jalan Nasional
- - - Jalan Propinsi
- Jalan TOL
- . - . - Jalan Kereta Api
-  = Wilayah Kota Cirebon



Skala 1 : 200.000




MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2002



Gambar 4.6.

Lokasi Cab PDAM Dan Wilayah Pelayanannya

Keterangan :

- Jalan Nasional
- - - Jalan Propinsi
- Jalan TOL
- . - . - . Jalan Kereta Api
-  = Wilayah KotaCirebon



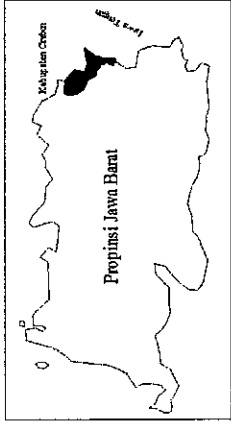
Skala 1 : 200.000

MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2002



LAUT JAWA

JAWA TENGAH

Cab. PDAM Karangsambung

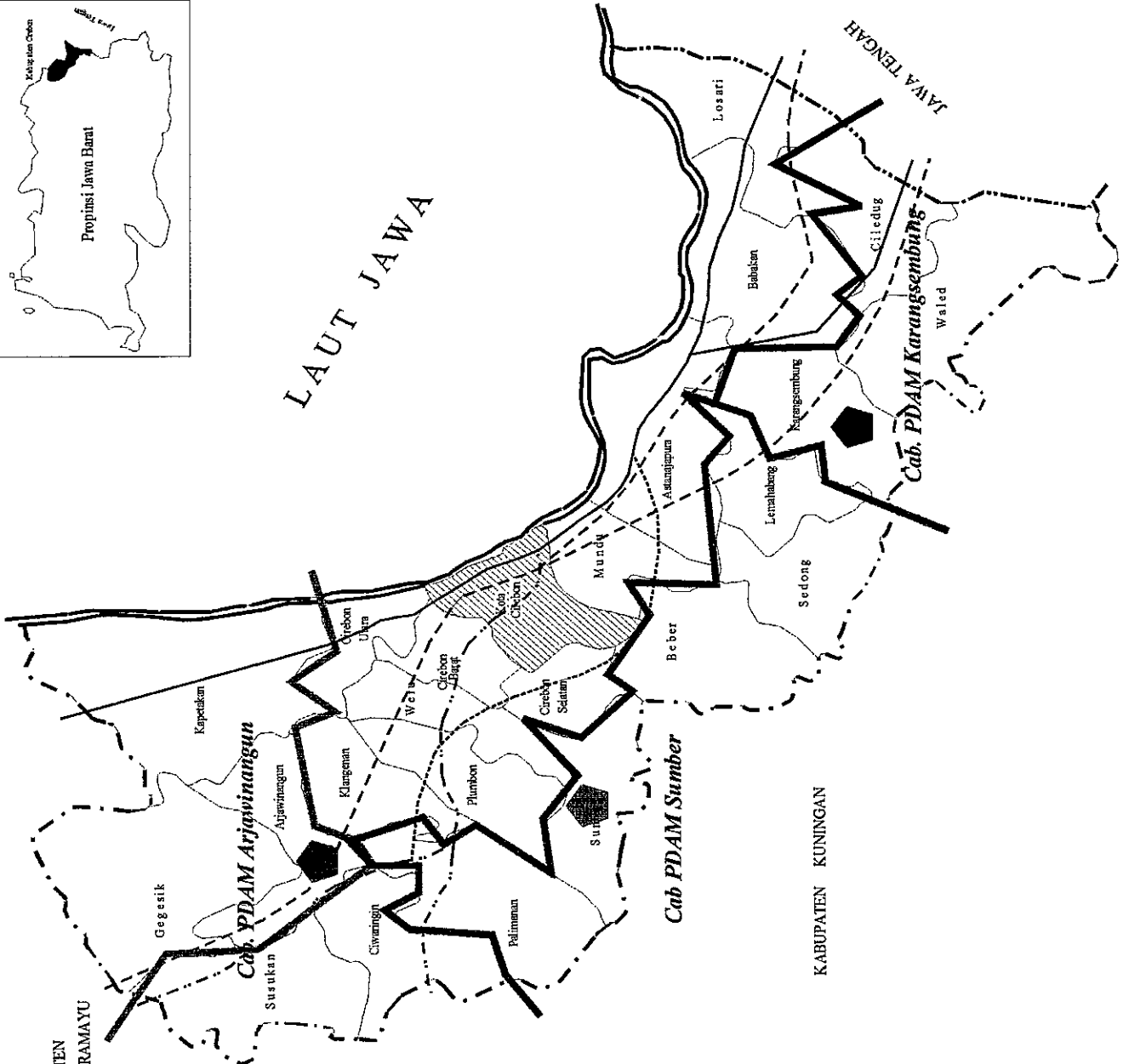
Cab PDAM Sumber

KABUPATEN KUNINGAN

KABUPATEN MAJALENGKA

KABUPATEN INDRAMAYU

Cab. PDAM Arjawinangun



c. Jaringan Telekomunikasi

Prasarana telekomunikasi di wilayah Kabupaten Cirebon, khususnya jaringan telepon, telah memadai dari segi jangkauan pelayanan maupun jumlah satuan sambungan yang sudah terpasang. Adapun jumlah kapasitas Sentral dan pelanggan dari masing-masing STO (Sentral Telepon Otomat) sampai dengan tahun 1999 terurai pada Tabel IV.2. berikut :

TABEL IV.2.
KAPASITAS DAN PELANGGAN TELEPON PER STO TAHUN 1999

No	STO	Kapasitas Sentral	Jumlah Pelanggan
1	Arjawinangun (Kec. Arjawinangun)	2.324	2.122
2	K a n c i (Kec. Astanajapura)	624	509
3	Jamblang (Kec. Klangenan)	2.960	2.451
4	L o s a r i (Kec. Losari)	1.696	810
5	Pabuaran (Kec. Ciledug)	2.962	2.168
6	P l e r e d (Kec. Weru)	4.564	2.895
7	Sindanglaut	2.680	2.394

Sumber : Telkom Cirebon

Untuk lebih jelasnya lokasi STO dan wilayah pelayanannya dapat dilihat pada Gambar 4.7.

d. Jaringan Kelistrikan

Jaringan listrik di Kabupaten Cirebon telah dapat mencukupi kebutuhan masyarakat dengan jangkauannya hampir ke seluruh pelosok wilayah dengan jumlah pelanggan yang dapat digambarkan dalam Gambar 4.8.

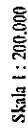
Gambar 4.7.
Sentral Telepon Otomat
Kabupaten Cirebon

Keterangan :

————	Jalan Nasional
- - - -	Jalan Propinsi
.....	Jalan TOL
- . - . - .	Jalan Kereta Api

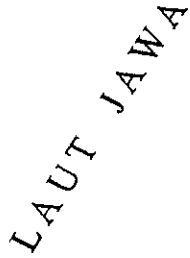
● = Lokasi Sentral Telepon Otomat

—————	Jalan Nasional
- - - - -	Jalan Propinsi
.....	Jalan TOL
—+—+—+—	Jalan Kereta Api



UNIVERSITAS DIPONEGORO

2002



STO Losari
1.696 Sat. Sambungan

STO Kanci
624 Sat. Sambungan

STO Jambang
2.960 Sat. Sambungan

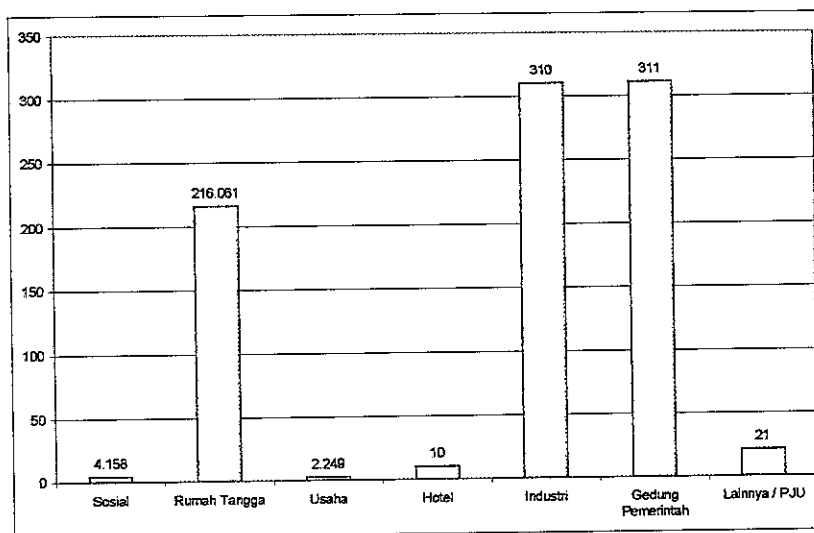
STO Pabuaran
2.962 Sat. Sambilan

*STO Sindanglaut
2.680 Sat. Sambungan*

STO Plered
4.564 Sat. Sambungan

**STO Arjawanangun
2.324 Sat. Sambungan**

GAMBAR 4.8.
JUMLAH PELANGGAN LISTRIK DI KABUPATEN CIREBON TAHUN 1999



Sumber : PT. PLN (Persero) Cabang Cirebon

Dari gambaran diatas terlihat bahwa penggunaan listrik terbesar dilakukan oleh sektor pemerintahan, industri dan rumah tangga, dari data tersebut dapat diindikasikan bahwa sektor-sektor industri baik itu industri sedang, besar dan industri kecil (*home industri*) mempunyai aktifitas yang tinggi dibandingkan dengan kegiatan lain, selain itu penggunaan listrik oleh rumah tangga juga mengindikasikan bahwa jaringan listrik sudah dapat dinikmati oleh sebagian besar masyarakat Kabupaten Cirebon.

4.4 Kota-kota Pusat Pertumbuhan

4.4.1 Kondisi Fisik Geografis

Kota-kota pusat pertumbuhan di Kabupaten Cirebon ditetapkan dalam RUTRD Kabupaten Cirebon tahun 1991-2011 dengan fungsi sebagai penggerak pertumbuhan dan perkembangan perekonomian wilayah serta perkembangan kota-kotanya. Adapun kota-kota tersebut adalah Kota Arjawinangun, Kota Sumber, Kota Astanajapura dan Kota

Ciledug. Kota Sumber selain sebagai kota pusat pertumbuhan juga sebagai ibu kota Kabupaten Cirebon.

Secara fisik geografis kota-kota tersebut berada pada dataran rendah dengan ketinggian berkisar antara 0 – 10 m di atas permukaan air laut. Kota Sumber selain sebagai kota pusat pertumbuhan juga sebagai ibu kota Kabupaten Cirebon, kota ini dapat diakses dari seluruh jurusan. Kota Arjawinangun dilalui oleh Jalur Pantura dan merupakan kota yang terletak di bagian utara Kabupaten Cirebon menuju Kabupaten Indramayu. Kota Astanajapura terletak dibagian utara Kabupaten Cirebon dan dilalui Jalur Pantura sedangkan Kota Ciledug berada pada bagian selatan Kabupaten Cirebon menuju ke arah Jawa Tengah bagian selatan.

4.4.2 Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Kependudukan merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong perkembangan suatu kota dengan aktifitas yang dilakukannya. Kondisi kependudukan di kota-kota pusat pertumbuhan dapat dilihat pada Tabel IV.3.

TABEL IV.3.
TABEL JUMLAH PENDUDUK DI KOTA-KOTA PUSAT PERTUMBUHAN
TAHUN 1999

No	Kota	Jumlah Penduduk (jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
1	Astanajapura	31.924	1,24
2	Ciledug	75.128	2,1
3	Sumber	48.300	1,6
4	Arjawinangun	60.624	1,9

Sumber : Kabupaten Cirebon Dalam Angka 1999.

Dari tabel terlihat bahwa kota Ciledug memiliki jumlah penduduk yang lebih besar dibandingkan dengan kota-kota lainnya demikian juga Kota Arjawinangun menempati urutan kedua setelah Ciledug. Melihat pola tersebut mengacu kepada teori bahwa pertumbuhan penduduk suatu kota disebabkan oleh 2 (dua) hal, yaitu secara alami (kelahiran dan kematian) dan migrasi (penduduk yang masuk dan penduduk yang keluar), Kota Ciledug dan Kota Arjawinangun jumlah penduduk yang lahir lebih banyak daripada yang meninggal serta penduduk yang masuk lebih banyak dari pada yang keluar. Pertumbuhan berdasarkan migrasi ini mengindikasikan bahwa Kota Ciledug dan Kota Arjawinangun lebih menarik bagi penduduk daerah belakangnya untuk tinggal di kedua kota tersebut.

4.4.3 Struktur Perekonomian

Kegiatan perekonomian yang utama dari kota-kota pusat pertumbuhan lebih didominasi oleh sektor perdagangan, hal ini terlihat dalam Tabel IV.4. berikut ini :

Tabel IV.4.
DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB KOTA-KOTA PUSAT PERTUMBUHAN
TAHUN 1999
(atas dasar harga konstan dalam %)

No	Lapangan Usaha	K o t a			
		Sumber	Arjaw	Asjap	Ciledug
1	Pertanian	19,30	16,20	27,44	17,26
2	Pertambangan dan Penggalian	1,17	0,0	2,53	0,02
3	Industri Pengolahan	1,95	1,68	22,09	6,46
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	11,43	4,70	0,0	7,87
5	Bangunan / Konstruksi	8,17	7,58	6,60	6,96
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	22,86	35,72	14,65	34,02
7	Pengangkutan dan Komunikasi	11,89	9,39	6,01	6,09
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	8,79	5,60	6,02	5,55
9	Jasa-jasa	14,45	19,14	14,66	15,77
	PDRB	100	100	100	100

Sumber : PDRB Kecamatan Kabupaten Cirebon, 1999

Terlihat bahwa kota-kota Sumber, Arjawinangun dan Ciledug persentase terbesar terhadap PDRB nya berasal dari sektor perdagangan, sedangkan kota Astanajapura lebih banyak berasal dari sektor pertanian dan industri pengolahan, dan dilihat dari sektor industri, Kota Astanajapura ini kontribusi sektor industrinya lebih besar dibandingkan dengan kota-kota pusat pertumbuhan lainnya. Keadaan tersebut juga mengindikasikan bahwa tenaga kerja yang dapat diserap di sektor-sektor lapangan kerja, untuk semua kota pusat pertumbuhan sektor perdagangan lebih dominan dibandingkan dengan sektor lainnya, Kota Arjawinangun dan Kota Ciledug kontribusi sektor perdagangannya mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap PDRB-nya dibandingkan dengan kota-kota pusat pertumbuhan lainnya. Keadaan ini ditunjang oleh lokasi Kota Arjawinangun dan Kota Ciledug yang berada pada daerah yang berbatasan dengan Propinsi Jawa Tengah (Kota Ciledug) dan Kabupaten Indramayu (Kota Arjawinangun), lihat Gambar 4.9.

Posisi ini menguntungkan bagi sektor perdagangan kedua kota karena interaksi yang terjadi tidak hanya antar kota dengan daerah belakang saja melainkan juga dengan wilayah lain yang lebih luas. Selain itu kegiatan perdagangan ditunjang oleh ketersediaan jaringan transportasi dalam wilayah yang memadai maupun tingkat keterhubungan yang tinggi dengan daerah di luar wilayah kabupaten. Dengan adanya jalur-jalur transportasi yang memadai, kegiatan koleksi dan distribusi barang hasil produksi antar pusat-pusat kegiatan penduduk atau kota-kota di Kabupaten Cirebon maupun wilayah luar dapat berlangsung dengan lancar. Untuk sektor industri Kota Astanajapura mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak, kondisi ini didukung dengan adanya zona industri yang ada di wilayah Kecamatan Astanajapura. Untuk sektor pertanian Kota Ciledug menempati urutan teratas dalam penyerapan tenaga kerja, hal ini berasal dari produksi pertanian tanaman sayuran terutama bawang merah, cabe serta kacang panjang yang berskala regional

Gambar 4.9.

Kedudukan

Kota Arjawinangun dan Kota Ciledug

Keterangan :

- Jalan Nasional
- - - Jalan Propinsi
- Jalan TOL
- . - . - Jalan Kereta Api



0 2 4 8 10Km

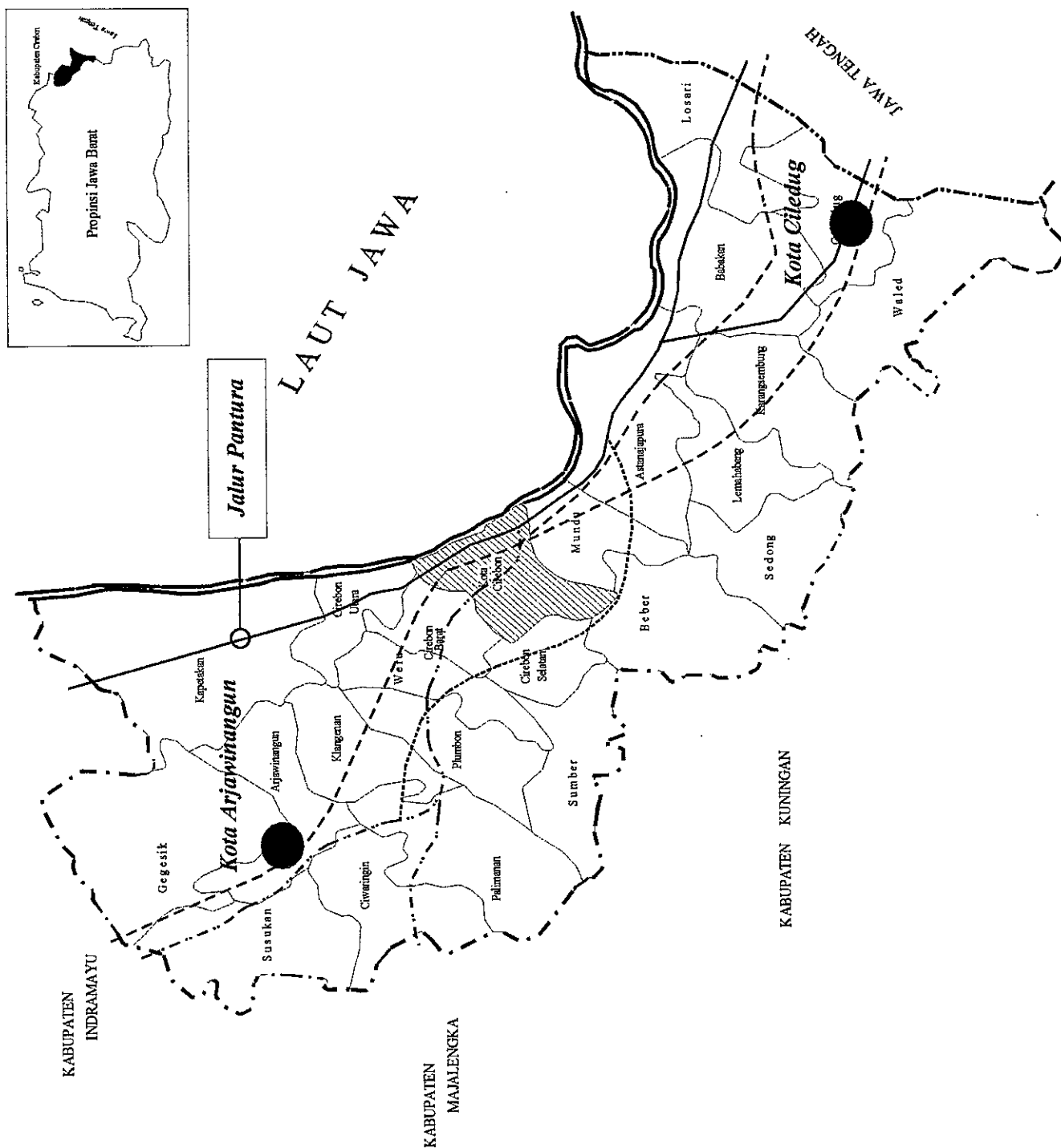
Skala 1 : 200.000

MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2002



4.4.4 Jaringan Prasarana

Jaringan prasarana yang dimiliki oleh kota-kota pusat pertumbuhan pada umumnya sudah memadai, jaringan ini meliputi :

1. Jaringan Jalan.

Jaringan jalan yang ada di kota-kota pusat pertumbuhan terdiri dari jalan negara, jalan kabupaten dan jalan desa. Jaringan jalan tersebut telah dapat menjangkau seluruh wilayah kota, selain itu jaringan jalan tersebut juga ditunjang dengan terminal angkutan kota yang melayani angkutan kota dan pedesaan yang memiliki trayek melewati kota-kota tersebut. Ruas-ruas jalan yang menghubungkan kota-kota pusat pertumbuhan dengan daerah belakangnya memiliki tingkat kualitas jalan sangat baik dengan lapisan hot mix dan memiliki tingkat LHR (Lalu-lintas Harian Rata-rata) yang tinggi. Jalur jalan yang melewati daerah daerah belakang tersebut merupakan jalan nasional Cirebon-Bandung, Cirebon-Indramayu dan Cirebon-Jawa Tengah yang mempunyai tingkat aksesibilitas dan nilai ekonomis yang tinggi sebagai jalur yang menghubungkan Jawa Barat dengan Jawa Tengah.

2. Jaringan Prasarana Air Bersih

Penyediaan air bersih bagi kota-kota pusat pertumbuhan saat ini dilayani oleh sistem perpipaan dan non perpipaan, sistem perpipaan dilakukan dengan menyadap air dari sistem BPT Kota Cirebon dengan kapasitas 5 liter / detik. Kecuali Kota Astanajapura yang sampai saat ini belum terlayani air bersih dengan system perpipaan

3. Jaringan Listrik dan Telepon

Jaringan listrik sudah dapat menjangkau seluruh wilayah di kota-kota pusat pertumbuhan demikian pula dengan jaringan telepon yang dilayani oleh STO Plered, Arjawinangun, Pabuaran dan Kanci.

BAB V

ANALISIS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PRASARANA KOTA DALAM MENUNJANG KINERJA PUSAT PERTUMBUHAN DI KABUPATEN CIREBON

Dalam kerangka pengembangan wilayah, pusat pertumbuhan ditetapkan dalam upaya untuk menimbulkan pertumbuhan ke dalam daerah-daerah belakang (*hinterland*) melalui pemusatan suatu kegiatan perekonomian utama. Pusat-pusat pertumbuhan ini nantinya akan berfungsi sebagai penggerak perekonomian daerah dalam konstelasi regional dan secara spasial akan membangkitkan perkembangan kota-kota yang ada dalam wilayahnya. Untuk mendukung hal tersebut salah satu elemen yang dapat meningkatkan pembangunan ekonomi serta untuk menstimulasi masuknya investasi didalam konsep pusat pertumbuhan ini adalah adanya kebijakan pemerintah daerah dalam upaya membangun dan melengkapi infrastrukturnya terutama di kota-kota yang ditetapkan menjadi pusat pertumbuhan.

5.1 Analisis Muatan Terhadap Program Pembangunan Prasarana Kota

5.1.1 Program Pembangunan Prasarana Kota Tahun 1989/1990-1993/1994

Sejalan dengan prioritas pembangunan nasional dan pembangunan Jawa Barat, pembangunan daerah Kabupaten Cirebon pada kurun waktu 1989/1990 sampai dengan 1993/1994 diprioritaskan kepada pembangunan ekonomi yang dititik beratkan pada pembangunan sektor pertanian dan sektor industri dalam rangka mewujudkan struktur ekonomi yang seimbang. Pada hakekatnya hal tersebut merupakan dasar-dasar

perencanaan pembangunan yang dalam pelaksanaannya dijabarkan secara lebih lanjut dalam bentuk kebijakan-kebijakan sektoral dan spasial, dari uraian diatas diketahui bahwa pendekatan yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi sedangkan pembangunan di bidang-bidang lainnya hanya bersifat menunjang dan mempercepat pertumbuhan bidang ekonomi.

Kondisi seperti diatas akan mengandung konsekuensi program-program pembangunan yang disusun bertujuan untuk mencapai hasil-hasil yang sifatnya ekonomi, akan tetapi tidak disangkal bahwa kebijaksanaan dan program-program ekonomi tersebut secara langsung atau tidak akan mempunyai pengaruh dan hasil yang sifatnya sosial, demikian pula sebaliknya. Dalam konteks strategi pusat pertumbuhan, menurut Myrdal (1957) dalam Richardson (1976:169) bahwa perencanaan pembangunan harus difokuskan pada peningkatan pendidikan, transportasi dan komunikasi terutama di daerah yang terdepresi. Dalam pandangannya kutub pertumbuhan adalah bukan merupakan suatu alat untuk menolong kebijakan yang egalitarian akan tetapi disebabkan oleh ketimpangan wilayah yang harus diperbaiki dengan kebijakan pembangunan yang layak.

Dalam kaitannya dengan pusat pertumbuhan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon pada tahun 1991 dalam upaya menggerakan pertumbuhan ekonomi daerah dan berperan sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi, maka upaya untuk mendukung pusat pertumbuhan agar bekerja secara optimal adalah dengan membuat program-program pembangunan terutama pembangunan prasarana kota sedapat mungkin dikonsentrasikan ke kota-kota yang menjadi pusat pertumbuhan.

Dalam Repetada tahun anggaran 1992/1993 (lihat lampiran 2) program-program pembangunan terutama pembangunan prasarana dasar prioritas penanganan dan

pembangunannya pada pusat-pusat pertumbuhan, hal ini terlihat dari program-program sektoral pada tahun tersebut, program penambahan jaringan telekomunikasi diutamakan ke daerah-daerah permukiman, sentra-sentra industri dan kota-kota pusat pertumbuhan selain itu sub sektor prasarana jalan salah satu programnya adalah pembangunan jalan dan jembatan baru yang berkaitan dengan pengembangan wilayah serta dapat menghubungkan antar pusat pertumbuhan dan sub wilayah pembangunan.

Pada tahun 1993/1994 program-program pembangunan yang tertuang dalam Repetada 1993/1994 pembangunan prasarana kota masih diprioritaskan pada kota-kota strategis termasuk di dalamnya kota-kota pusat pertumbuhan, terutama jaringan listrik, telekomunikasi, jalan dan air bersih (lihat lampiran 2). Pada tahun anggaran ini juga telah disusun PJM prasarana kota untuk kota-kota Gegesik, Sumber, Losari dan Ciledug. Pemikiran yang mendasari program pembangunan prasarana pada tahun ini adalah dengan menambah dan melengkapi prasarana yang ada terutama penambahan jaringan listrik dan air bersih.

5.1.2 Program Pembangunan Prasarana Kota Tahun 1994/1995-1998/1999

Pada Pola Dasar tahun 1994/1995-1998/1999 kebijakan umum yang ditetapkan masih dalam kerangka trilogi pembangunan yang dititik beratkan pada *pembangunan ekonomi* dengan peningkatan dan pengembangan industri yang diarahkan pada pengisian / pemanfaatan kawasan industri, zona industri dan sentra industri, sarana dan prasarana penunjang yang dikaitkan dengan prospek pertumbuhan industri, zona industri dan sentra industri, menciptakan iklim usaha yang kondusif, berlanjut dan konsisten untuk mendorong

penanaman modal baik domestik maupun asing, meningkatnya industri menengah, kecil dan industri rumah tangga serta perluasan lapangan kerja.

Dari uraian di atas pada dasarnya pendekatan pertumbuhan ekonomi masih dipergunakan dengan peningkatan dan pengembangan industri yang didukung oleh sarana dan prasarana yang menunjang pertumbuhan industri. Secara teoritis pertumbuhan industri dapat terjadi dengan masuknya aliran investasi di bidang industri. Investasi ini akan meningkatkan jumlah produk yang dihasilkan oleh daerah dan dipasarkan ke luar daerah, sehingga dari aliran barang yang berasal dari daerah ke luar daerah akan diimbangi oleh masuknya aliran uang (*capital*) ke dalam daerah (Glasson; 1978:84) yang selanjutnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan. Hal tersebut akan sulit untuk diwujudkan apabila kondisi sarana dan prasarana kotanya tidak memadai terutama untuk mendistribusikan barang.

Untuk mendukung dan melaksanakan kebijakan baik sektoral maupun spasial, maka disusun rencana pembangunan tahunan daerah yang berisi program-program tahunan pembangunan yang berfungsi sebagai acuan. Pada Repetada tahun anggaran 1994/1995 program-program pembangunan prasarana kota di titikberatkan pada kota-kota strategis termasuk di dalamnya kota-kota pusat pertumbuhan. Prasarana yang mendapat perhatian besar adalah prasarana jalan, air bersih serta lingkungan perkotaan yang meliputi drainase, pembuangan limbah dan persampahan. Program-program pembangunan prasarana kota yang telah dijabarkan dalam Repetada tahun 1994/1995 (lihat lampiran 2) adalah dalam upaya melengkapi prasarana di kota-kota strategis termasuk di dalamnya kota-kota pusat pertumbuhan terutama peningkatan pelayanan air bersih dan peningkatan jaringan jalan serta penggantian jembatan. Peningkatan jalan dan penggantian jembatan ini adalah dalam

rangka meningkatkan kapasitas jalan dan melancarkan lalu lintas terutama dari dan menuju kota-kota pusat pertumbuhan.

Pada tahun anggaran 1995/1996 program-program pembangunan yang ditetapkan terutama adalah prasarana air bersih, jalan, telekomunikasi dan lingkungan kota. Kota-kota pusat pertumbuhan mendapat prioritas utama dalam upaya melengkapi dan membangun prasarana kota ini. Pada tahun 1996/1997 dalam program-program pembangunan prasarana kotanya mengisyaratkan prioritas pada kota-kota strategis hal ini terlihat dari program-program yang dibuat, mencakup air bersih, jalan, telekomunikasi dan lingkungan kota yang berupa program penanganan kebersihan dan persampahan. Pada tahun anggaran ini pula telah dapat disusun PJM P3KT untuk kota-kota Sumber, Weru, Arjawinangun, Ciledug dan Palimanan.

Program-program pembangunan pada tahun anggaran 1997/1998 ditekankan pada pemenuhan kebutuhan prasarana kota terutama jaringan telekomunikasi dan jaringan jalan pada kota-kota pusat pertumbuhan. Pada tahun anggaran 1998/1999 kebijakan pembangunan prasarana di kota-kota pusat pertumbuhan tetap dilanjutkan untuk meningkatkan perkembangan perekonomian. Pada tahun anggaran ini kegiatan pembangunan lebih diarahkan dan diprioritaskan pada penanganan terhadap dampak krisis ekonomi yang bersifat *rescue*. Kegiatan-kegiatan yang sifatnya pembangunan fisik dikurangi, akan tetapi hampir seluruh pembangunan prasarana kota di konsentrasikan di kota-kota pusat pertumbuhan. Pada tahun anggaran 1999/2000 kebijakan dan program-program yang ada menunjukkan upaya untuk melengkapi prasarana di kota-kota strategis termasuk didalamnya kota-kota pusat pertumbuhan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa pembangunan dan penambahan jaringan telekomunikasi serta prasarana jalan selalu ada pada setiap tahun anggaran mulai tahun 1992/1993 sampai dengan tahun 1999/2000. Jaringan telekomunikasi merupakan salah satu jalur penghubung antara satu kota/daerah/wilayah dengan kota/daerah/wilayah lainnya seperti halnya prasarana jalan peningkatan jaringan telekomunikasi akan meningkatkan arus informasi dari dan ke luar daerah yang pada gilirannya akan meningkatkan perkembangan daerah. Demikian pula halnya jalan yang secara teoritis merupakan prasarana terjadinya interaksi antar daerah, dalam hal ini antara pusat pertumbuhan dengan daerah-daerah belakangnya. Selain itu dengan adanya interaksi yang tinggi yang ditunjang oleh prasarana jalan yang memadai akan meningkatkan pula pergerakan orang dan barang dari dan keluar daerah.

Menurut Glasson (1978:65) perkembangan suatu kota akan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam wilayah itu sendiri dimana proses perkembangan wilayah didasarkan pada asumsi bahwa kenaikan pendapatan perkapita akan diikuti oleh relokasi sumberdaya. Faktor-faktor internal ini berupa faktor-faktor produksi (tanah, tenaga kerja dan modal). Sedangkan faktor eksternal berasal dari luar wilayah tersebut, dimana perkembangan suatu wilayah dipengaruhi oleh eksploitasi sumberdaya alam dan pertumbuhan basis ekspor wilayah yang bersangkutan yang dipengaruhi oleh tingkat permintaan dari wilayah lainnya. Pendapatan yang diperoleh dari ekspor tersebut mengakibatkan berkembangnya kegiatan penduduk setempat, perpindahan modal dan tenaga kerja. Dari gambaran tersebut jelas pengembangan prasarana jalan ini akan sangat menentukan perkembangan kota yang bersangkutan.

Konsep yang tertuang dalam program-program pembangunan prasarana kota dari tahun 1989 sampai dengan tahun 1999 adalah adanya upaya untuk mengembangkan jalur perhubungan baik transportasi maupun telekomunikasi sebagai langkah awal peningkatan aksesibilitas ke kota-kota pusat pertumbuhan dan permukiman yang strategis. Secara teoritis semakin tinggi tingkat aksesibilitas ke suatu daerah semakin tinggi semakin luas dan besar fungsi pelayanannya sebagai pusat transportasi dan telekomunikasi yang menghubungkan dengan kota-kota disekitarnya (Rondinelli : 1984:125). Dengan begitu diharapkan interaksi antar pusat (*core area*) dan daerah belakangnya dapat berlangsung dengan baik yang pada gilirannya nanti akan menggerakkan aktifitas perekonomian daerah. Dari gambaran tersebut jelas bahwa pada tahun pertama setelah ditetapkan strategi pusat pertumbuhan di Kabupaten Cirebon, program-program yang disusun telah memperlihatkan upaya untuk menunjang kinerja kota-kota pusat pertumbuhan tersebut dengan membangun dan melengkapi prasarananya.

Prasarana lain yang juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan menjadi prioritas pada program pembangunan prasarana kota di Kabupaten Cirebon adalah penambahan jaringan listrik pada setiap tahun anggaran. Secara teoritis kapasitas terpasang jaringan listrik akan dapat mendukung kinerja suatu industri yang selanjutnya akan dapat meningkatkan produktifitasnya secara lebih efektif dan efisien. Kurangnya pasokan listrik akan menyebabkan kinerja industri terganggu sehingga mengakibatkan produktifitasnya rendah. Apabila produktifitas rendah, maka barang yang dihasilkan juga akan sedikit yang di keluarkan sehingga menyebabkan kelangkaan barang produksi di pasaran, apabila barang sulit didapatkan di pasaran, maka harga barang tersebut akan cenderung naik dan pada gilirannya akan menyebabkan inflasi yang tentunya akan merugikan bagi

pertumbuhan perekonomian. Oleh sebab itu pemerintah Kabupaten Cirebon telah berupaya untuk menambah jaringan listrik bagi kota-kota strategisnya.

Demikian pula halnya untuk jaringan air bersih, dari hasil wawancara dengan beberapa pengusaha industri yang beraktifitas di Kabupaten Cirebon, salah satu hal yang menjadi pertimbangan dalam menetapkan suatu daerah untuk menanamkan modalnya adalah ketersediaan prasarananya terutama telekomunikasi, air bersih, listrik dan jaringan jalan. Jadi jelas disini bahwa air bersih juga merupakan salah satu pertimbangan bagi masuknya para investor, selain itu ketersediaan air bersih bagi perumahan dan permukiman juga akan turut meningkatkan kualitas hidup (*Quality of Life*) masyarakat di perkotaan, dengan tingginya kualitas hidup, diharapkan kinerja dan produktifitas masyarakatnya juga akan tinggi yang akhirnya akan turut meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah.

Dari gambaran di atas dan hasil analisis terhadap muatan dari program-program tersebut secara umum program pembangunan prasarana yang ada di Kabupaten Cirebon telah mempunyai dampak terhadap pengkonsentrasian pembangunan prasarana di kota-kota pusat pertumbuhan, namun kebijakan pembangunan prasarana kota ini baru sebatas memenuhi kebutuhan akan pelayanan prasarana kota belum pada tahap kebijakan yang mempunyai tujuan untuk menarik investasi terutama sektor industri, hal ini didukung oleh hasil wawancara baik itu dengan Ir. Tatit Konitat maupun dengan Ir. Widjayanto yang mengungkapkan bahwa secara konseptual dan kebijakan, program-program pembangunan prasarana telah diprioritaskan dan dikonsentrasikan di kota-kota strategis termasuk kota-kota pusat pertumbuhan untuk meningkatkan kinerja kota-kota tersebut dalam melakukan tugas pelayanannya namun baru sebatas untuk memenuhi kebutuhan akan pelayanan prasarana kota.

5.2 Analisis Terhadap Implementasi Program Pembangunan Prasarana Kota di Kota Pusat Pertumbuhan

Menurut Friedmann (1966:97), kebijakan perwilayahan suatu wilayah seperti halnya yang diambil Kabupaten Cirebon dengan kebijakan penetapan kota-kota pusat pertumbuhan akan mempunyai implikasi terhadap kebijaksanaan pembangunan yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah terutama untuk memastikan bagaimana proses penjalaran dan pertumbuhan ekonomi dari pusat pertumbuhan ke wilayah pengaruhnya dapat berjalan, kebijakan ini kemudian dijabarkan dalam bentuk program-program pembangunan. Program-program pembangunan yang telah disusun tersebut pada hakekatnya harus diimplementasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan (proyek) untuk mencapai tujuan dan sasarnya. Analisis terhadap proyek-proyek ini untuk mengetahui apakah pembangunan prasarana kota sudah dikonsentrasikan di kota-kota pusat pertumbuhan atau belum. Dengan menganalisis kondisi tersebut diharapkan dapat terlihat aspek spasialnya serta seberapa besar investasi yang telah ditanamkan pemerintah daerah untuk prasarana kota ini.

Dengan berdasarkan pada tabel 1 pada lampiran 3 terlihat bahwa jumlah alokasi dana untuk pembangunan prasarana kota di kota-kota pusat pertumbuhan mencapai rata-rata 55,6 % dari total jumlah dana yang dialokasikan untuk pembangunan prasarana kota di Kabupaten Cirebon, hal ini juga diperkuat dari hasil wawancara dengan Ir. Tatit Konitat Kepala Sub Bidang Pengembangan Kawasan Bappeda Kabupaten Cirebon yang menjelaskan bahwa pembangunan prasarana kota diprioritaskan pada kota-kota pusat pertumbuhan, kota-kota ini juga dalam konstelasi perwilayah Kabupaten Cirebon memiliki hirarki yang lebih tinggi dibandingkan dengan kota-kota lainnya.

Dari uraian di atas terlihat persentase jumlah dana proyek-proyek pembangunan prasarana kota yang dilaksanakan di kota-kota pusat pertumbuhan rata-rata lebih dari 50 %, artinya kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan prasarana kota yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon telah memenuhi apa yang disyaratkan dalam strategi pusat pertumbuhan yang dimukakan oleh Parr (1999), dimana pembangunan prasarana kota harus di kosentrasikan di kota-kota pusat pertumbuhan yang secara teoritis hal ini dimaksudkan untuk menstimulasi masuknya investasi terutama sektor industri.

Hal tersebut memperlihatkan adanya konsistensi dari pemerintah Kabupaten Cirebon dalam mengimplementasikan program-program pembangunan prasarana kota yang telah disusunnya, selain itu kebijakan pembangunan prasarana kota yang dibuat mempunyai dampak terhadap pengkonsentrasian pembangunan prasarana kota di kota-kota pusat pertumbuhan. Menurut konsep pengembangan jaringan prasarana akan mempunyai peranan yang penting didalam proses pembangunan kota salah satunya karena dalam pelaksanaan pembangunan prasarana kota ada konsistensi dengan rencana yang sudah menjadi Lampiran Peraturan Daerah.

5.3 Analisis Efektifitas Pembangunan Prasarana Kota Dalam Menarik Investasi

Seperti telah diketahui bahwa secara teoritis kelengkapan prasarana kota akan berdampak pada masuknya investasi ke wilayah yang bersangkutan terutama industri. Investasi di bidang industri ini akan menimbulkan *multiplier effect* ke sektor-sektor lain misalnya perdagangan dan jasa sehingga aktifitas perekonomian di kota tersebut meningkat dan pada gilirannya akan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi kota yang bersangkutan dan regionalnya.

Berdasarkan hasil analisis ditambah dengan hasil wawancara dengan para investor dan calon investor, kondisi industri di Kabupaten Cirebon didominasi oleh industri pengolahan yang berupa industri makanan dan minuman serta industri kayu dan barang-barang dari kayu terutama rotan yang kebanyakan berlokasi di kecamatan Weru, Plumbon, Mundu, Ciledug dan Astanajapura. Kecamatan-kecamatan tersebut juga merupakan wilayah-wilayah yang paling banyak diminati oleh para investor terutama bidang industri, hal ini diperkuat oleh informasi dari Bidang Penanaman Modal Daerah (PMD) Bappeda Kabupaten Cirebon di mana izin prinsip yang dikeluarkan bagi para investor didominasi oleh wilayah-wilayah tersebut.

Sistem produksi pada industri rotan adalah sistem sub produksi, produksi pada tahap awal dilakukan oleh pengusaha-pengusaha kecil yang kebanyakan industri rumahan (*home industry*). Bahan baku rotan yang digunakan dipasok dari perusahaan utamanya. Produk rotan pada tahap ini biasanya berupa perangkat mebelair seperti kursi, meja dan sejenisnya mulai dirakit, pada tahap selanjutnya hasil dari sub produksi ini disalurkan ke perusahaan yang lebih besar, masing-masing perusahaan ini biasanya mempunyai sub-sub pengusaha sendiri yang secara rutin dan tetap memasok hasil produksinya. Pada perusahaan yang lebih besar proses produksi yang dilakukan sebatas pada tahap penyempurnaan (*finishing*) dan pemasaran.

Pada kegiatan produksi di bidang rotan ini jelas terlihat kebutuhan prasarana kota terutama jalan sangat berperan dalam melancarkan jalur pasokan hasil produksi dari perusahaan-perusahaan sub produksi ke perusahaan utama dan jalur pasokan bahan baku dari perusahaan utama ke perusahaan-perusahaan sub-nya. Untuk pemasaran mereka memasarkan produknya terutama ke Amerika Serikat, Eropa dan Taiwan melalui

pelabuhan Tanjung Priok serta sebagian dipasarkan untuk konsumsi lokal dan regional. Para investor di jenis industri rotan sebagian besar berasal dari investor lokal, Jakarta dan sebagian kecil yang berasal dari luar negeri.

Dari hasil wawancara dengan salah satu perusahaan rotan yang sudah beroperasi, yaitu PT. Inti Mekar serta salah satu calon investor yang akan menanamkan modalnya di wilayah Kabupaten Cirebon, yaitu PT. Global Transarana Indonesia yang berasal dari Jakarta yang akan menanamkan modalnya dalam industri logam yang memproduksi komponen alat berat, mengungkapkan bahwa yang menjadi bahan pertimbangan mereka untuk berinvestasi adalah aspek-aspek :

- Prasarana Kota, yaitu : Jaringan telepon, air bersih dan listrik serta transportasi (jaringan jalan) ke Jakarta (untuk ekspor) mudah,
- Lokasi, yaitu harga lahan yang masih relatif murah,
- Keamanan dan birokrasi yang mendukung,

Dari fakta di atas memperlihatkan bahwa tingkat kelengkapan prasarana akan mempengaruhi minat investor untuk menanamkan modalnya di suatu daerah. Jenis prasarana kota yang sangat diperhatikan oleh para investor adalah jaringan jalan, jaringan telekomunikasi, air bersih dan jaringan listrik, hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Parr (1999:1261), bahwa pemusatan prasarana kota pada pusat-pusat pertumbuhan yang meliputi jaringan jalan yang menghubungkan antara pusat pertumbuhan dengan daerah-daerah belakangnya, jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi dan dari hasil analisis didapat jaringan air bersih juga menjadi bahan pertimbangan para calon investor untuk berinvestasi disamping tiga jenis prasarana yang disebutkan oleh Parr. Prasarana yang berskala luas ini akan menciptakan eksternalitas, hal ini akan membuat daerah

menjadi lebih atraktif bagi perusahaan dalam konteks lokasi dan menstimulasi masuknya investasi kedalam pusat pertumbuhan.

Dari hasil analisis terhadap implementasi dari program pembangunan prasarana terungkap bahwa dana yang dialokasikan untuk proyek pembangunan prasarana kota di kota-kota pusat pertumbuhan terlihat secara kuantitatif persentasenya lebih dari 50 % dari jumlah keseluruhan proyek pembangunan prasarana. Secara teoritis kondisi seperti tersebut di atas akan menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Cirebon karena kota-kota tersebut menarik bagi investor, hal ini terlihat dari data yang didapat dari kantor Deperindag Kabupaten Cirebon menunjukkan nilai investasi sektor industri yang masuk ke Kabupaten Cirebon cenderung meningkat, kondisi tersebut dapat dilihat pada Tabel V.1. berikut :

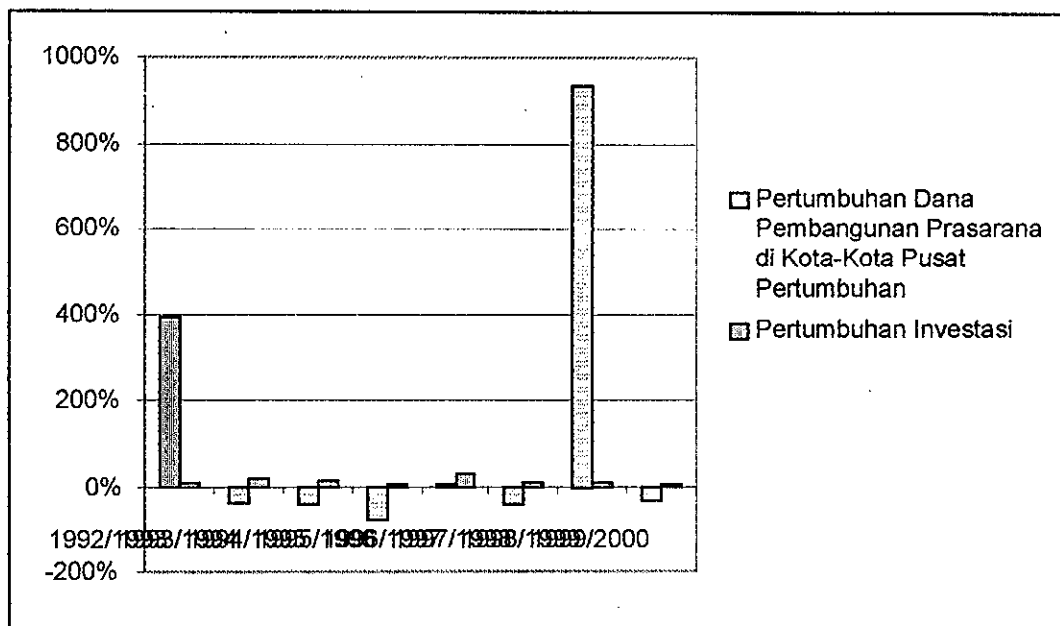
TABEL V.1.
PENGARUH TINGKAT PEMBANGUNAN PRASARANA KOTA DI KOTA-KOTA
PUSAT PERTUMBUHAN TERHADAP PERTUMBUHAN SEKTOR INDUSTRI
DI KABUPATEN CIREBON

TA	Dana Pembangunan Prasarana Yang Dialokasikan di Kota-Kota Pusat Pertumbuhan	Kenaikan	Nilai Investasi Yang Masuk Pada Sektro Industri	Kenaikan
1991/1992	1,292,637,000.00		287,461,112,000.0	
1992/1993	6,360,644,010.00	392%	343,214,070,000.0	19%
1993/1994	3,935,385,020.00	-38%	393,909,627,000.0	15%
1994/1995	2,283,265,961.00	-42%	403,466,328,000.0	2%
1995/1996	544,281,000.00	-76%	514,174,021,000.0	27%
1996/1997	552,929,000.00	2%	552,335,301,000.0	7%
1997/1998	313,753,000.00	-43%	594,372,166,000.0	8%
1998/1999	3,239,825,000.00	933%	611,187,021,000.0	3%
1999/2000	2,190,564,000.00	-32%	632,153,978,000.0	3%

Sumber : Kantor Deperindag Kabupaten Cirebon, diolah

Apabila dilihat dari besarnya nilai investasi sektor industri yang masuk terlihat memiliki kecenderungan yang meningkat, namun apabila dilihat dari tingkat pertumbuhannya cenderung mengalami penurunan mulai tahun 1996/1997 dan seterusnya. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 5.1. berikut :

GAMBAR 5.1.
PENGARUH TINGKAT PEMBANGUNAN PRASARANA KOTA DI KOTA-KOTA
PUSAT PERTUMBUHAN TERHADAP PERTUMBUHAN SEKTOR INDUSTRI
DI KABUPATEN CIREBON



Sumber : Hasil Analisis

Kondisi tersebut menandakan bahwa proyek-proyek pembangunan prasarana kota yang dilaksanakan di kota-kota pusat pertumbuhan belum dapat menstimulasi masuknya investasi ke dalam wilayah Kabupaten Cirebon. Dari hasil analisis ada beberapa hal yang diindikasikan menjadi penyebab terjadinya penurunan tingkat pertumbuhan investasi ini di antaranya adalah tingkat kelengkapan prasarana kota baik kualitas maupun kuantitasnya belum sesuai dengan yang diinginkan oleh para calon investor, hal ini disebabkan karena

pembangunan prasarana kotanya masih diarahkan pada pemenuhan kebutuhan akan pelayanan.

Selain prasarana, aspek lain yang mempengaruhi adalah aspek lahan, lahan yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon masih banyak yang dimiliki oleh perorangan atau badan-badan sehingga harga lahan masih relatif bervariasi dan memiliki kecenderungan harganya semakin mahal seiring dengan semakin baiknya jaringan jalan yang ada, hal ini yang menyebabkan biaya yang harus dikeluarkan untuk lahan menjadi besar, dari hasil analisis juga diindikasikan birokrasi yang menyangkut perijinan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan itu masih belum dapat memenuhi keinginan para calon investor, panjangnya birokrasi dan sulitnya memperoleh kepastian waktu penyelesaian suatu perijinan yang menyebabkan para calon investor menjadi malas untuk berinvestasi.

Untuk lebih jelasnya dalam melihat efektifitas pembangunan prasarana kota dalam menarik investasi pada kota-kota di wilayah Kabupaten Cirebon termasuk di dalamnya kota-kota pusat pertumbuhan pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2000 dapat dilihat pada Tabel 5.II yang memperlihatkan besarnya dana pembangunan prasarana kota dan besarnya nilai investasi serta rasio keduanya untuk dapat menggambarkan dalam Gambar 5.2. kota-kota mana yang memenuhi kriteria efektifitas, artinya dengan rasio dana pembangunan prasarana kota yang kecil namun mampu untuk menarik investasi.

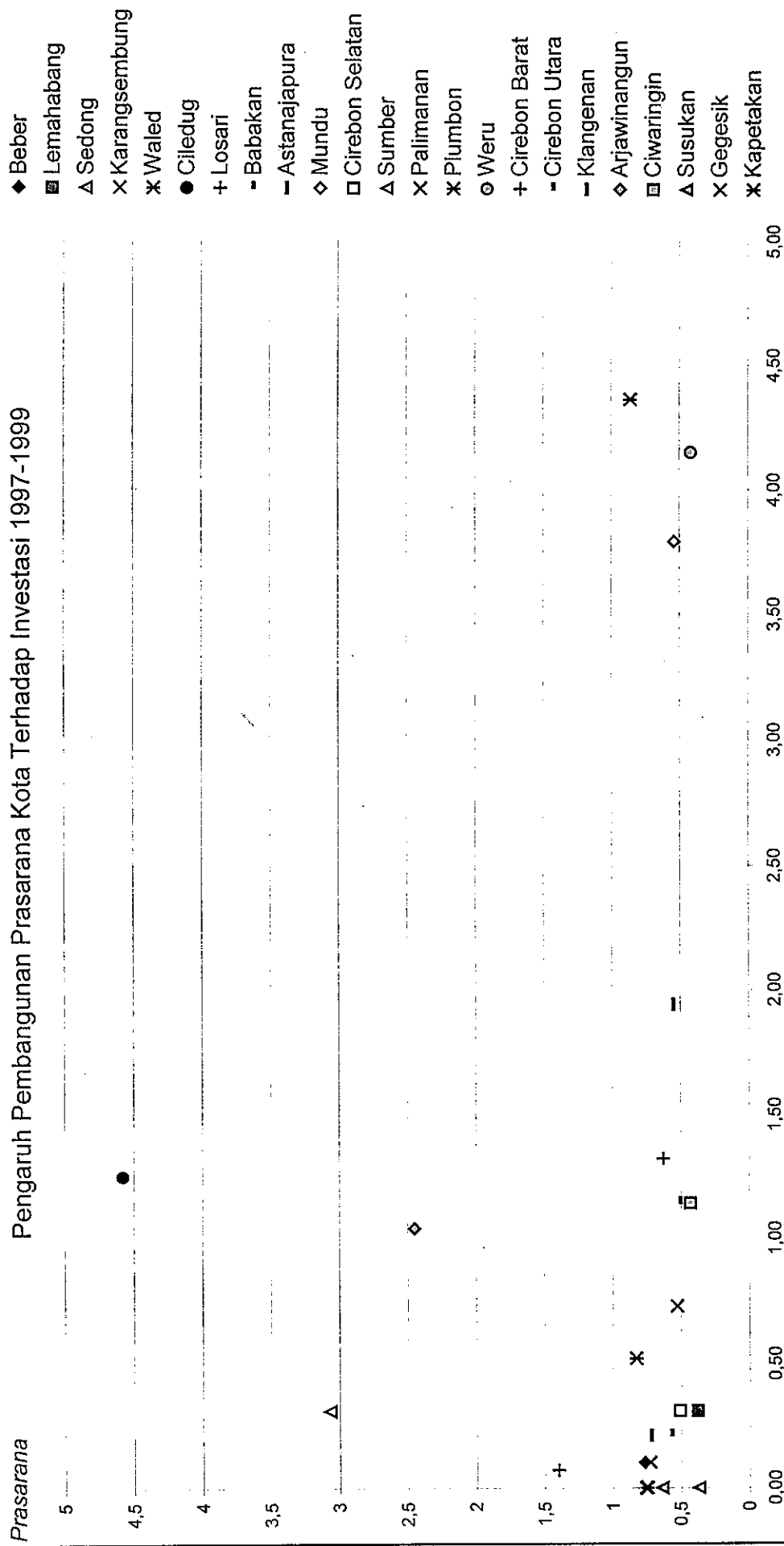
Tabel 5.III.

TabelPembangunan Prasarana Terhadap Investasi Tahun 1997 - 2000

No	Kecamatan	97/98		98/99		99/2000		Rasio	
		Nilai Investasi	Dana Prasarana	Nilai Investasi	Dana Prasarana	Nilai Investasi	Dana Prasarana	Rasio Prasarana	Rasio Investasi
1	Beber	2,606,895,465	156,123,000	2,803,610,189	-	2,886,547,845	281,000,000	0.77	0.10
2	Lemahabang	7,815,463,874	126,598,470	8,410,830,564	-	8,659,643,534	90,500,000	0.38	0.31
3	Sedong	-	125,658,900	-	-	-	87,650,000	0.37	0.00
4	Karangsembung	2,606,895,465	115,000,000	2,896,512,365	-	2,597,463,586	300,000,000	0.73	0.10
5	Waled	13,034,477,325	285,670,000	14,018,050,940	-	14,432,739,224	187,450,000	0.83	0.52
6	Ciledug	31,282,745,579	169,853,000	33,643,322,257	1,370,035,000	34,638,574,137	1,075,000,000	4.58	1.25
7	Losari	-	250,000,000	2,756,459,863	-	2,906,783,521	551,235,000	1.40	0.07
8	Babakan	5,213,790,930	169,450,000	5,607,220,376	-	5,773,095,689	158,475,000	0.57	0.21
9	AstanaJapura	46,924,118,368	-	53,268,593,573	182,000,000	54,884,409,050	131,500,000	0.55	1.94
10	Mundu	114,703,400,456	186,250,000	89,715,526,018	-	98,142,626,721	123,000,000	0.54	3.79
11	Cirebon Selatan	7,853,695,248	132,000,000	8,411,765,821	-	8,732,589,654	158,000,000	0.51	0.31
12	Sumber	7,963,258,455	3,000,000	8,512,698,457	1,687,790,000	8,659,643,534	62,500,000	3.07	0.31
13	Pallimanan	18,248,268,254	275,000,000	19,625,271,317	-	20,205,834,913	25,000,000	0.53	0.73
14	Plumbon	109,489,609,526	158,675,000	117,751,627,899	295,320,000	121,235,009,479	38,740,000	0.86	4.36
15	Weru	104,275,818,596	100,000,000	112,144,407,523	-	115,461,913,790	138,650,000	0.42	4.15
16	Cirebon Barat	33,889,641,044	168,950,000	36,446,932,445	-	35,198,752,268	191,000,000	0.63	1.32
17	Cirebon Utara	28,675,850,114	210,000,000	30,839,712,069	-	31,398,256,125	75,000,000	0.50	1.14
18	Klangenan	5,043,432,538	325,000,000	5,697,226,987	-	5,733,095,692	87,000,000	0.72	0.21
19	Arjawinangun	26,068,954,649	140,900,000	28,036,101,881	-	28,865,478,447	1,259,064,000	2.45	1.04
20	Ciwarungin	28,675,850,114	123,000,000	30,601,150,456	-	31,741,520,791	125,000,000	0.43	1.14
21	Susukan	-	250,000,000	-	-	-	113,259,000	0.64	0.00
22	Gegesik	-	220,560,000	-	-	-	215,000,000	0.76	0.00
23	Kapetakan	-	258,000,000	-	-	-	169,450,000.00	0.75	0.00
		594,372,166,000	3,949,688,370	611,187,021,000	3,535,145,000	632,153,978,000	5,643,473,000	23	23

Sumber : Kantor Diperindag Kabupaten Cirebon dan Buku APBD II Kabupaten Cirebon, diolah

Gambar 5.2.
Pengaruh Pembangunan Prasarana Kota Terhadap Investasi 1997-1999



Sumber Data : Hasil Analisis

Investasi

Dari tabel dan gambar tersebut terlihat bahwa kota-kota yang memiliki kemampuan menarik investasi dengan dana pembangunan prasarana yang kecil adalah **Kota Plumbon, Weru, Mundu dan Astanajapura**. Dilihat dari aspek lokasi kota-kota tersebut merupakan kota-kota dimana aglomerasi sektor industri terutama industri pengolahan berada, sedangkan dilihat dari aspek kelengkapan prasarana kota, kota-kota tersebut memiliki prasarana kota yang lebih lengkap dibandingkan dengan kota-kota lain, selain itu jika dilihat dari aspek geografis lokasi kota-kota tersebut dilalui jaringan transportasi regional dari Jawa Barat ke Jawa Tengah atau Jalur Pantura (lihat Gambar 5.3.). Disamping itu jaringan jalan kotanya sendiri memang sudah lengkap serta jaringan jalan kereta api menuju Jawa Tengah yang selanjutnya menuju Surabaya melalui jalur utara. Dengan demikian jaringan jalan kota dan jalur pantura yang merupakan jaringan jalan primer yang menghubungkan kota-kota Plumbon, Weru, Mundu dan Astanajapura dengan kota-kota lain dengan berbagai hirarki dalam wilayah yang lebih luas, dengan demikian daya tarik kota-kota ini dalam menarik investasi cukup besar. Kota-kota pusat pertumbuhan yang ada, kecuali Kota Astanajapura tidak memiliki kemampuan untuk menarik investasi meskipun pembangunan prasarana kotanya telah dikonsentrasikan di kota-kota tersebut, hal ini dikarenakan sektor-sektor yang dominan di kota-kota tersebut bukan merupakan sektor industri (lihat tabel IV.4.), secara teoritis sektor industri memiliki *multiplier effect* yang besar yang dapat menggerakkan perekonomian, disamping itu investasi di sektor industri cenderung untuk masuk ke wilayah yang telah ada aglomerasi industrinya dan didukung oleh lokasi yang menguntungkan seperti halnya kota-kota Mundu, Astanajapura, Weru dan Plumbon yang selain telah memiliki aglomerasi industri juga didukung oleh lokasinya yang menguntungkan dengan dilewati oleh jalur Pantura.

Gambar 5.3.

Kota Plumbon, Wern, Mundu
dan Kota Astanajapura

Keterangan :

- Jalan Nasional
- - - Jalan Propinsi
- Jalan TOL
- - - Jalan Kereta Api
- = Wilayah Kota Cirebon



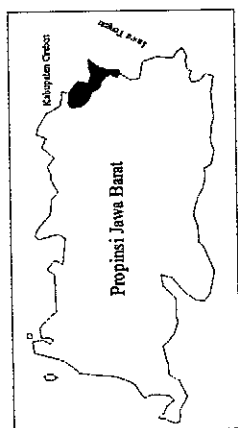
Skala 1 : 200.000

MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2002



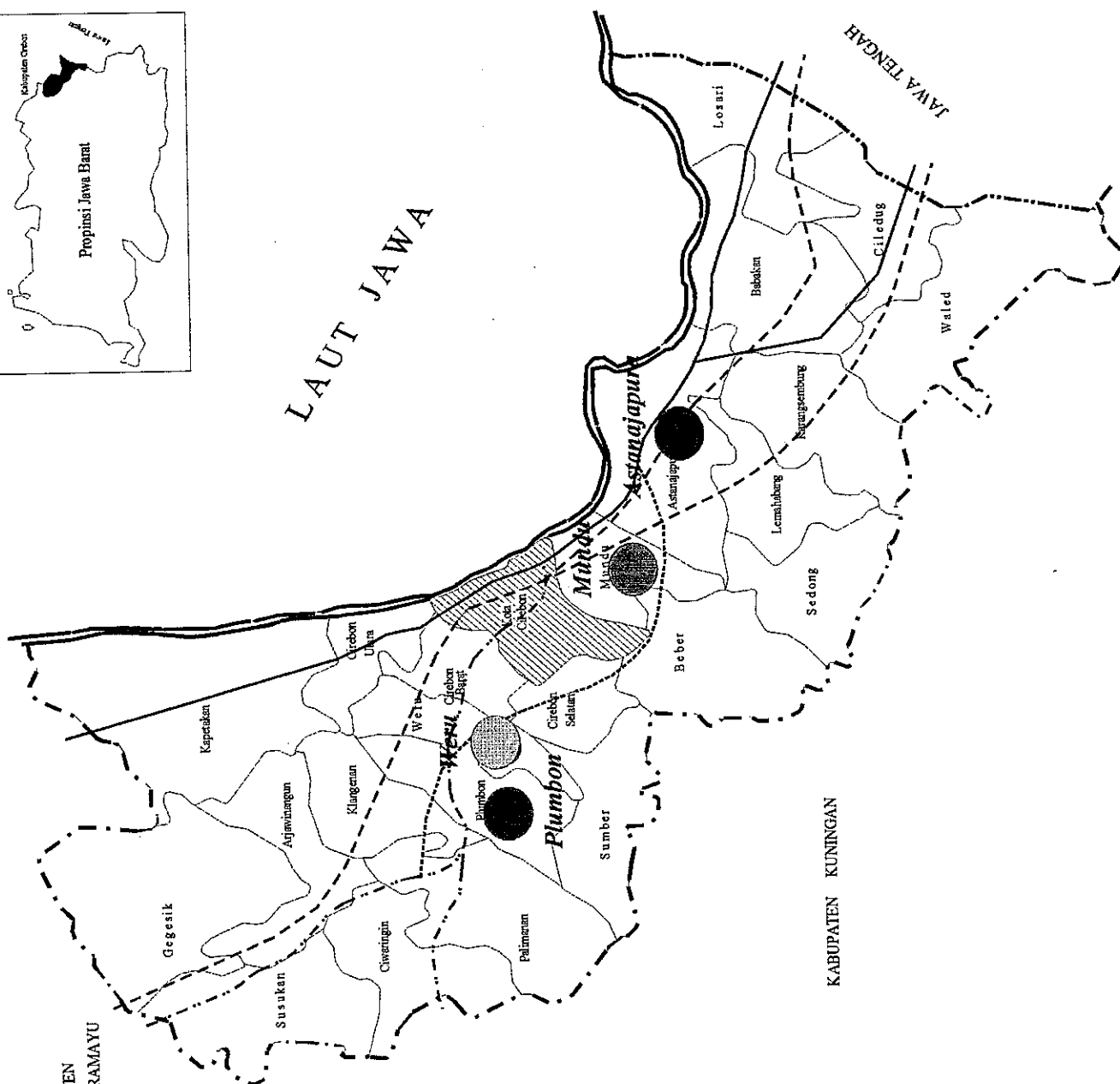
LAUT JAWA

JAWA TENGAH

KABUPATEN KUNINGAN

KABUPATEN
INDRAMAYU

KABUPATEN
MAJALENGA



Menurut Mc.Crone (1969) dalam Gore (1984:32) sebuah kutub pertumbuhan adalah merupakan suatu kompleks industrial yang terpilih dari industri yang saling terkait yang mempunyai keunggulan ekonomis dan keuntungan lokasional. Dari konsep dan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa faktor keberadaan dan aglomerasi industri dan aspek keuntungan lokasional akan turut menentukan suatu kota atau daerah untuk dapat menjadi kutub pertumbuhan, keunggulan ekonomis dan keuntungan lokasional menjadi turut mempengaruhi masuknya investasi disamping kelengkapan prasarana kota yang ada dimana kota tersebut menjadi lebih atraktif untuk menarik investasi.

Jika dilihat dari jumlah investasi yang masuk ke Kota Weru, Plumbon, Mundu dan Astanajapura, keempat kota tersebut memiliki nilai investasi yang masuk lebih besar jika dibandingkan dengan kota-kota lain di wilayah Kabupaten Cirebon. Namun demikian kondisi yang dimiliki oleh keempat kota tersebut, keuntungan lokasional, aglomerasi industri dan kelengkapan prasarana belum dapat meningkatkan laju pertumbuhan investasi secara regional.

5.5. Analisis Pengaruh Pembangunan Prasarana di Kota Pusat Pertumbuhan Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi

Secara konseptual kondisi perekonomian suatu daerah diindikasikan oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan gambaran kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki, hal ini dapat dilihat dari nilai tambah yang mampu diciptakan akibat timbulnya berbagai aktifitas perekonomian dalam wilayahnya. Selain itu dilihat pula indikator yang menunjukkan naik

tidaknya produk yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan perekonomian di wilayah tersebut disebut Laju Pertumbuhan Ekonomi.

Secara teoritis kelengkapan prasarana kota yang dimiliki oleh suatu kota pusat pertumbuhan akan membuat kota tersebut lebih berkembang, tingkat kelengkapan prasarana ini juga merupakan salah satu alat untuk meningkatkan perekonomian. Dengan lengkapnya prasarana yang dimiliki suatu kota akan lebih menarik bagi masuknya investasi dan dengan prasarana yang lengkap pula aktifitas perekonomian masyarakat kota tersebut akan lebih berkembang, dengan makin berkembangnya aktifitas perekonomian suatu kota akan meningkatkan pertumbuhan perekonomiannya dan pada gilirannya nanti akan memacu perkembangan kota itu sendiri. Peningkatan perekonomian terjadi karena adanya arus investasi yang masuk dengan ditandai oleh berkembangnya industri yang mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja. Kota pusat pertumbuhan dalam konteks pengembangan wilayah ditetapkan dalam rangka untuk dapat menggerakkan pertumbuhan perekonomian daerah agar lebih meningkat melalui induksi yang ditimbulkannya terhadap daerah-daerah belakangnya. Data yang memperlihatkan laju pertumbuhan ekonomi dengan dana yang dialokasikan untuk pembangunan prasarana kota di masing-masing kota dapat dilihat pada Tabel V.3., dan hasil uji Korelasi Pearson yang dimuat dalam Tabel V.4. berikut ini :

Tabel V.3.

Tabel Pengaruh Pembangunan Prasarana Terhadap LPE Tahun 1997/1998

No	Kecamatan	97/98		98/99		99/2000		Rata-rata	
		LPE (%)	Rp	LPE (%)	Rp	LPE (%)	Prasarana Rp	LPE (%)	Prasarana Rp
1	Beber	13.20	156,123,000	38.54	-	15.81	281,000,000	27.18	140,500,000
2	Lemahabang	9.21	126,598,470	30.11	-	12.35	90,500,000	21.23	45,250,000
3	Sedong	12.31	125,658,900	50.05	-	11.00	87,650,000	30.53	43,825,000
4	Karangsembung	6.57	115,000,000	35.92	-	16.13	300,000,000	26.03	150,000,000
5	Waled	2.44	285,670,000	26.63	-	20.13	187,450,000	23.38	93,725,000
6	Citedug	13.34	169,853,000	38.73	1,370,035,000	10.21	1,075,000,000	24.47	1,222,517,500
7	Losari	2.75	250,000,000	46.29	-	18.31	551,235,000	32.30	275,617,500
8	Babakan	7.17	169,450,000	45.20	-	12.79	158,475,000	29.00	79,237,500
9	Astana Japura	14.41	-	24.92	182,000,000	13.08	131,500,000	19.00	156,750,000
10	Mundu	14.04	186,250,000	37.25	-	12.88	123,000,000	25.07	61,500,000
11	Cirebon Selatan	11.12	132,000,000	30.99	-	12.25	158,000,000	21.62	79,000,000
12	Sumber	12.98	3,000,000	28.43	1,687,790,000	8.55	62,500,000	18.49	875,145,000
13	Palimanan	14.50	275,000,000	19.07	-	10.59	25,000,000	14.83	12,500,000
14	Plumbon	15.35	158,675,000	30.62	295,320,000	10.25	38,740,000	20.44	167,030,000
15	Weru	13.85	100,000,000	17.61	-	9.50	138,650,000	13.56	69,325,000
16	Cirebon Barat	11.41	168,950,000	15.61	-	9.79	191,000,000	12.70	95,500,000
17	Cirebon Utara	9.77	210,000,000	31.87	-	11.67	75,000,000	21.77	37,500,000
18	Klangenan	12.99	325,000,000	38.15	-	13.52	87,000,000	25.84	43,500,000
19	Arjawinangun	12.93	140,900,000	35.78	-	12.13	1,259,064,000	23.96	629,532,000
20	Ciwaringin	7.67	123,000,000	37.24	-	15.69	125,000,000	26.47	62,500,000
21	Susukan	14.13	250,000,000	46.45	-	12.73	113,259,000	29.59	56,629,500
22	Gegesik	14.50	220,560,000	52.27	-	18.00	215,000,000	35.14	107,500,000
23	Kapetakan	8.53	258,000,000	47.30	-	14.05	169,450,000,00	30.68	84,725,000
							5,643,473,000		4,589,309,000

LPE Atas dasar harga berlaku

Sumber : Buku APBD II Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Cirebon Dalam Angka 1999

TABEL V.4.
HASIL UJI KORELASI PEARSON

		LPE	DANA
Pearson Correlation	LPE	1.000	-.009
	DANA	-.009	1.000
Sig. (1-tailed)	LPE	-	.483
	DANA	.483	-
N	LPE	23	23
	DANA	23	23

Sumber : Hasil Perhitungan SPSS

Dari hasil uji Pearson tersebut terlihat bahwa antara pembangunan prasarana kota dengan laju pertumbuhan ekonomi memiliki nilai $r = -0.009$, jika dikaitkan dengan kriteria yang tercantum pada Tabel III.1 hal ini berarti antara pembangunan prasarana kota dengan laju pertumbuhan ekonomi memiliki tingkat hubungan yang sangat rendah (tidak berkorelasi). Jadi dengan demikian laju pertumbuhan ekonomi yang konstan yang dialami Kabupaten Cirebon tidak secara langsung disebabkan oleh pembangunan prasarananya yang kurang akan tetapi disebabkan oleh tidak adanya investasi yang masuk ke wilayah Kabupaten Cirebon. Menurut teori pertumbuhan ekonomi ditandai dengan adanya arus investasi yang masuk terutama sektor industri yang mampu menyerap banyak tenaga kerja yang kemudian serta perdagangan dan jasa, sektor industri ini memiliki efek pengganda ke sektor-sektor lainnya sehingga dapat menggerakkan perekonomian secara keseluruhan yang pada gilirannya akan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi wilayah. Agar investasi dapat masuk, kota harus atraktif untuk itu, oleh karenanya tingkat kelengkapan prasarana kota menjadi salah satu faktor penarik bagi masuknya investasi. Jadi jelas disini bahwa pembangunan prasarana kota tidak berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi wilayah yang bersangkutan, akan tetapi prasarana kota tersebut dapat menstimulasi masuknya investasi sebagai pra-kondisi bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Selain

itu dikaitkan dengan sifat pembangunan prasarana yang merupakan investasi jangka panjang dalam arti hasil dari investasi pembangunan prasarana tersebut dapat diketahui dalam waktu lama ke depan.

5.5 Efektifitas Kebijakan Pembangunan Prasarana Kota Dalam Menunjang Kinerja Pusat Pertumbuhan Di Kabupaten Cirebon

Dari hasil analisis terhadap kebijakan pembangunan prasarana kota, analisis terhadap efektifitas pembangunan prasarana kota dalam menarik investasi serta analisis terhadap pengaruh pembangunan prasarana terhadap laju pertumbuhan ekonomi diperoleh beberapa temuan yang berkaitan dengan efektifitas kebijakan pembangunan prasarana kota dalam mendukung kinerja pusat pertumbuhan di Kabupaten Cirebon, yaitu :

1. Program pembangunan prasarana kota telah mengarah pada dikonsentrasikannya pembangunan prasarana kota di kota-kota pusat pertumbuhan, hal ini telah sesuai dengan apa yang disyaratkan dalam teori, akan tetapi kota-kota pusat pertumbuhannya tidak memiliki kemampuan untuk menarik investasi kecuali Kota Astanajapura. Jadi dapat dikatakan bahwa kebijakan pembangunan prasarana kota yang telah dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon sudah efektif dalam mendukung kinerja pusat pertumbuhan hanya saja kota-kota pusat pertumbuhan yang ada tidak memiliki kemampuan untuk menarik investasi, ketidak mampuan ini disebabkan karena sektor-sektor perekonomian yang dominan di kota-kota tersebut bukan sektor industri, sedangkan secara teoritis sektor industri ini memiliki efek pengganda yang besar dalam menggerakkan perekonomian wilayah, dan investasi sektor industri ini cenderung untuk masuk

ke wilayah yang telah ada aglomerasi industri disamping keuntungan lokasional yang dimilikinya,

2. Dari 23 kota yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon, Kota Plumbon, Weru, Mundu dan Astanajapura termasuk kota yang efektif, artinya dengan dana dan jumlah proyek pembangunan prasarana kota yang sedikit, namun kota-kota tersebut mampu untuk menarik investasi, akan tetapi investasi yang masuk ke kota-kota tersebut lebih banyak disebabkan karena faktor lokasional yang menguntungkan (dilewati jalur Pantura) serta karena adanya aglomerasi industri. Hal ini sesuai dengan teori bahwa kutub pertumbuhan adalah merupakan suatu aglomerasi ruang dari industri yang saling terkait. Menurut Mc.Crone (1969) dalam Gore (1984:32) sebuah kutub dari pertumbuhan terdiri dari suatu kompleks industrial yang terpilih dari industri yang saling terkait yang mempunyai keunggulan ekonomis dan keuntungan lokasional.
3. Tingkat pertumbuhan investasi yang cenderung menurun diindikasikan disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: kota-kota pusat pertumbuhan yang diharapkan dapat berfungsi sebagai penggerak utama perekonomian wilayah tidak dapat menjalankan fungsinya, kecuali Kota Astanajapura, hal ini dikarenakan kota-kota tersebut tidak memiliki kemampuan untuk menarik investasi, prasarana kota yang ada belum mampu memenuhi aspek kualitas maupun kuantitas yang diminta oleh para calon investor, selain itu ada faktor-faktor lain diantaranya harga lahan yang sudah relatif mahal serta birokrasi yang masih belum dapat mendukung kebutuhan para calon investor.

BAB VI

P E N U T U P

6.1 K e s i m p u l a n

Dari seluruh analisis yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya dapat dilihat bahwa kebijakan pembangunan prasarana kota yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam rangka menunjang kinerja strategi pusat pertumbuhan, secara garis besar telah memenuhi kriteria efektivitas. Efektifnya program tersebut terlihat dari hasil analisis terhadap muatan dan konsep serta sasaran dan tujuan dari kebijakan pembangunan prasarana kota tersebut mempunyai dampak terhadap pengkonsentrasian pembangunan prasarana kota di kota-kota pusat pertumbuhan, artinya apabila kebijakan tersebut dilaksanakan akan mengakibatkan pembangunan prasarana terkonsentrasi di kota-kota pusat pertumbuhan. Akan tetapi keefektifan kebijakan pembangunan prasarana kota yang ada belum dapat membuat kota-kota pusat pertumbuhan yang ada, kecuali Kota Astanajapura, mampu untuk menarik investasi, hal ini dikarenakan sektor perekonomian kota-kota tersebut bukan sektor industri sedangkan investasi yang diharapkan masuk adalah sektor industri yang kecenderungannya akan masuk ke wilayah dimana telah ada aglomerasi industri dan juga melihat faktor keuntungan lokasionalnya.

Dari 23 kota yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon, Kota Plumbon, Weru, Mundu dan Astanajapura termasuk kota yang dengan dana dan jumlah proyek pembangunan prasarana kota yang sedikit, namun kota-kota tersebut mampu untuk menarik investasi, hal ini lebih banyak disebabkan oleh aglomerasi industri pengolahan yang terdapat di kota-kota tersebut.

Dari seluruh analisis yang telah diuraikan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian, yaitu bahwa: kebijakan pembangunan prasarana kota yang telah dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon efektif untuk meningkatkan kinerja pusat pertumbuhan, namun efektifitas ini tidak disertai dengan kemampuan kota-kota pusat pertumbuhan untuk menarik investasi sektor industri, kecuali Kota Astanajapura.

6.2 Rekomendasi

6.2.1 Aspek Kebijakan

Dari kesimpulan yang telah ditarik dengan mempertimbangkan hasil analisis dan kondisi serta fenomena yang ada di wilayah penelitian, maka arahan yang direkomendasikan untuk meningkatkan kinerja pusat pertumbuhan yang ditetapkan, yaitu :

1. Agar kebijakan pembangunan prasarana kota lebih efektif lagi dalam mendukung kinerja pusat pertumbuhan yang ditetapkan, maka kebijakan pembangunan prasarana kota yang diambil agar berorientasi kepada upaya menarik investasi khususnya untuk kota-kota pusat pertumbuhan, tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan akan pelayanan. Untuk keperluan menarik investasi melalui pembangunan prasarana kota ini direkomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk membuat kebijakan pembangunan prasarana kota yang khusus untuk kota-kota pusat pertumbuhan, hal ini dimaksudkan agar pembangunan prasarana kota di kota-kota pusat pertumbuhan ini diarahkan untuk menarik investasi, sedangkan kebijakan pembangunan yang lain diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan akan pelayanan.

2. Untuk menggerakkan perekonomian daerah melalui strategi pusat pertumbuhan ini seyogyanya Pemerintah Kabupaten Cirebon mengevaluasi kembali penetapan kota-kota pusat pertumbuhan, karena dari hasil analisis ada 4 kota yang mampu menarik investasi dengan dana pembangunan prasarana kota yang kecil (efektif) yaitu Kota Weru, Plumbon, Mundu dan Astanajapura (kota pusat pertumbuhan). Berdasarkan kondisi tersebut serta dengan melihat letak geografis kota-kotanya, maka dapat diambil suatu kebijakan spasial dengan menggunakan :

1. 2 (dua) Kawasan Pertumbuhan, yaitu Kawasan Pusat Pertumbuhan Weru (meliputi Kota Weru dan Plumbon) dan Kawasan Pusat Pertumbuhan Astanajapura (meliputi Kota Astanajapura dan Mundu) dengan kegiatan ekonomi utama sektor industri ditambah dengan
2. 3 (tiga) kota penunjang kawasan pusat pertumbuhan, yaitu Kota Sumber, Kota Ciledug dan Kota Arjawinangun dengan kegiatan ekonomi utama perdagangan dan jasa.

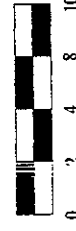
Untuk lebih jelasnya lihat Gambar 6.1.

Gambar 6.1.

Konsep Struktur Ruang Kabupaten Cirebon

Keterangan :

- Jalan Nasional
- Jalan Propinsi
- Jalan TOL
- Jalan Kereta Api



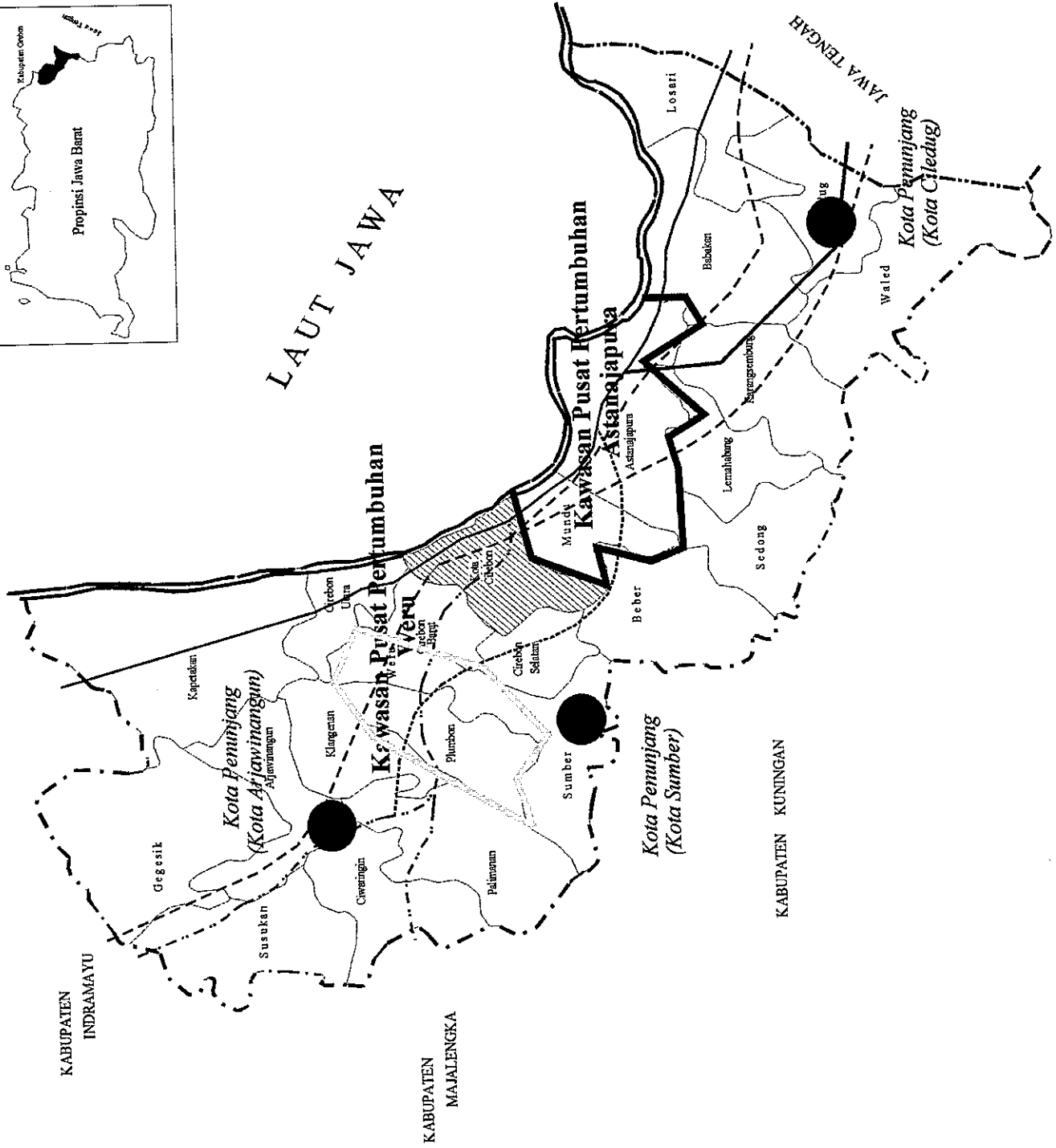
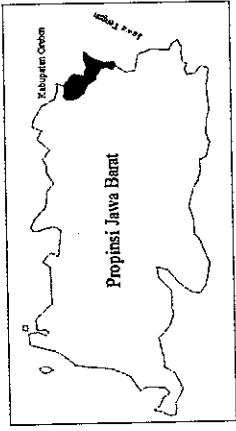
Skala 1 : 200.000

MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2002



6.2.2 Usulan Penelitian Lanjutan

Dengan melihat hasil analisis, kesimpulan dan ruang lingkup materi yang dibahas dalam penelitian ini, maka untuk itu perlu dilakukan penelitian lanjutan yang diarahkan untuk menganalisis aspek perekonomiannya terutama industri yang dimiliki, dengan melihat *production linkages* yang meliputi keterkaitan kebelakang (*backward linkage*) dan keterkaitan kedepannya (*forward linkage*). Hal ini untuk melihat apakah industri-industri yang dimiliki termasuk industri propulsif seperti yang disyaratkan dalam strategi pusat pertumbuhan atau tidak. Selain itu perlu pula studi mengenai kebijakan pembangunan prasarana kota yang khusus diterapkan untuk pusat pertumbuhan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU REFERENSI

- Alexander, JW., 1963, *Economic Geography, University of Wisconsin*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.
- Arikunto, Suharsimi., (1993), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Berry, B.J.L., (1967), *Geography of Market Centers and Retail Distribution*, Prentice Hall.
- Blakely, Edward J., (1994), *Planning Local Economic Development*, SAGE Publications, Thousands Oaks, London, New Delhi
- Blair, John P., (1995), *Local Economic Development (Analysis and Practice)*, SAGE Publications, Thousands Oaks, London, New Delhi
- Brannen, Julia (1987), *Mixing Methods : Qualitative and Quantitative Research*, London: Allen and Uwin.
- Chapin, F. Stuart and Kaisser Edward, J., (1985), *Urban Land Use Planning*, University of Illinois Press, Urbana and Chicago.
- Denzin, K. (1997), *The Research Act in Sociology in Fourth Edition*, McGraw-Hill Book Company, USA.
- Denzin, K. (1994), *Handbook of Qualitative Research*, Sage Publication, Thousand Dallas, Ca.
- Daldjoeni, N., (1997), *Geografi Baru Organisasi Keruangan Dalam Teori dan Praktek*, Alumni Bandung.
- Dunn, William, N., (1994), *Public Policy Analysis : An Introduction Second Edition*, Prentice Hall, University of Pittsburgh.
- Freeman, TW., (1968), *Geography and Planning*, Hutchinson University Library, London.
- Friedmann, J. (1956), *Locational Aspects of Economic Development*, Land Economics, MIT Press.
- Friedmann, J and Alonso, W. (1964), *Regional Development and Planning : a Reader*, Cambridge, Mass., MIT Press.

- Friedmann, J and Alonso, W. (1975), *Regional Policy : Readings in Theory and Application*, Cambridge, Mass., MIT Press.
- Glasson, John., (1978), *An Introduction to Regional Planning*, Hutchinson of London.
- Jayadinata, Johara T., (1986), *Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan dan Wilayah*, Penerbit ITB, Bandung.
- Jhingan, M.L. (1990), *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Rajawali Pres, Jakarta.
- Kachigan, Sam K., (1982), *Statistical Analysis An Interdisciplinary Introduction to Univariate and Multivariate Methods*, Radius Press, New York.
- Mc Loughlin, JB., (1970), *Urban and Regional Planning*, Faber and Faber London.
- Methuen C. Gore, (1984), *Regions In Questions : Space, Developmen Theory and Regional Policy*, London & New York.
- Moleong, Lexy J. (2000), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nazir, Moh., (1983), *Metode Penelitian*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Neuman, W. Lawrence (2000), *Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approaches*, A Pearson Education Company, Masschusetts.
- Potter, RB and SL Evans. (1998) *The City in The Developing World*, Wesley Longman UK.
- Richardson, Harry, W., (1989) *Elements of Regional Economics*, Penguin Books, Ltd.
- Richardson, Harry, W., (1977) *The Economics of Urban Size*, Farnborough, Saxonhouse.
- Rondinelli, D.A. (1983), *Spatial Linkage Analysis : Applied Methods of Regional Analysis The Spatial Dimensions of Development Policy*, Cambridge, Mass., MIT Press.
- Soesilo Nining I (2000), *Manajemen Strategik*, Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Tjokroamidjojo, Bintoro (1995), *Perencanaan Pembangunan*, PT. Gunung Agung, Jakarta.
- Yunus, HS., (2000), *Struktur Tata Ruang Kota*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

B. TERBITAN TERBATAS

Sutriah, Siti., (1985), *Pengantar Pengembangan Wilayah*, Diktat Kuliah Jurusan Teknik Planologi FTSP-ITB.

Firman, Tomy, (1985), *Perspektif Neo Klasik, Dependensi dan Humanitarian Dalam Teori-Teori Pembangunan, Keterbelakangan dan Pengembangan Wilayah*, Diktat Kuliah Jurusan Teknik Planologi FTSP-ITB.

Parr, John B. (1999), *Growth-pole Strategies in Regional Economic Planning : A Restropective View*, Urban Studies Vol. 36 No. 8 1247-1268, 1999.

C. TESIS / DISERTASI

Hardjoko, Arief Tri; *Arahan Pengembangan Kawasan Strategis SUBOSUKO*; Tesis MPWK-ITB 1998.

Hardijanto, Didiek, *Kajian Basis Data Dalam Sistem Informasi Terpadu Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Perkotaan di Kota Besar (Studi Kasus : Kota Bekasi)*, Tesis MTPK-UNDIP, 1999.

Miyoshi, Takahiro, *Successes and Failures Associated With the Growth Pole Strategies*, Disertasi-University of Manchester, 1997

D. BUKU DATA

-----, (1997), *Penataan Ruang Wilayah, Daerah dan Kota*, Prisma.

-----, (1994), *Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon 1994/1995 – 1998/1999*.

-----, (1994), *Pola Dasar Pembangunan Daerah Jawa Barat 1994/1995-1998/1999*.

-----, (1994), *Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Dalam Angka 1993*.

-----, (1994), *PDRB Kecamatan 1993-1996*.

-----, (2000), *PDRB Kabupaten Cirebon 1995-1999*.

-----, (2000), *Kabupaten Cirebon Dalam Angka 1999*.

-----, (2000), *PDRB Kecamatan 1995-1999*.